



LAPORAN MONITORING DAN HASIL EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN CAPAIAN TARGET KINERJA TRIWULAN II (B06)



**REFORMASI
HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**





**LAPORAN MONITORING DAN HASIL EVALUASI PERJANJIAN
KINERJA DAN TARGET KINERJATRIWULAN II (B06)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA TAHUN 2022**

A. Pendahuluan

1. Umum

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Selain perjanjian kinerja salah satu strategi untuk peningkatan kinerja secara terstruktur dan berjenjang adalah dengan melaksanakan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.HH- 1.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022. Target kinerja dilaksanakan dengan merujuk kepada target-target yang harus diselesaikan Kementerian Hukum dan HAM sepanjang tahun 2022 yang termaktub dalam RPJMN, Renstra dan RKP Tahun 2022. Target Kinerja ini juga merupakan hasil kolaborasi pemikiran dari para Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri bersamaan seluruh Pimpinan Unit Eselon I. Kantor wilayah pada tahun 2022 memiliki 39 target kinerja dan total anggaran sebesar Rp.98.467.785.000.- (Sembilan puluh delapan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pelaksanaan kinerja anggaran dibuat berdasarkan perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga, juga sebagai penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana kerja kementerian/lembaga dalam satu tahun anggaran Dibagi menjadi 4 (empat) triwulan B03, B06, B09 dan B12

dengan target penyerapan di masing masing triwulan sesuai dengan surat Sekertariat Jenderal Nomor : SEK.PR.01.04-68 tentang Penyampaian Pagu Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM TA 2022. Dengan target Disbursement Plan Rencana Penarikan dana setiap Triwulan adalah TW I : 25% , TW II : 50% , TW III : 75% dan TW IV : 100% dengan berdasarkan ketentuan tersebut diatas Kementerian Hukum dan HAM telah mencapai target pada TW II (B06) sebesar 47,79 % dari target 50% yang ditargetkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan ada beberapa satuan kerja menggunakan PNBK, hal tersebut menyebabkan penyesuaian dengan penerimaan PNBK sehingga ada beberapa satuan kerja yang tidak mencapai target 50%. Namun demikian target kinerja pada pelaporan TW II B06, satuan kerja sudah menyampaikan pelaporan pada aplikasi Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM dengan penyampaian pelaporan 100%.

Berdasarkan latar belakang diatas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara pada setiap triwulan akan melaksanakan Monitoring dan Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja untuk memenuhi data dukung berbagai program kegiatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diantaranya Data Dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi, Data Dukung Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai di Kantor Wilayah Maluku Utara.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari pelaksanaan Monitoring dan Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja adalah untuk mengetahui sejauh mana capaian Perjanjian Kinerja dan Capaian Target Kinerja sampai dengan Triwulan II B06 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara serta melakukan evaluasi terhadap capaian kegiatan tersebut.

3. Ruang Lingkup

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Serta Target Kinerja merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga, juga sebagai penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana kerja kementerian/lembaga dalam satu tahun anggaran.

Ruang lingkup kegiatan ini adalah seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan HAM baik di tingkat pusat maupun daerah dan pada khusus pada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

4. Dasar

- a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-1.PR.01,03 Tahun 2022 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- c. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-OT.03-005 Tanggal 4 Januari 2022 Perihal Pedoman Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja, dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2022;
- d. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-OT.03-006 Tanggal 4 Januari 2022 Perihal Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja, dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2022;
- e. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-OT.03-73 Tanggal 11 Januari 2022 Perihal Penyampaian Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022;
- f. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-OT.03-151 Tanggal 7 Maret 2022 Perihal Penyampaian Rencana Kerja WBK/WBBM Tahun 2022.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan pada Pelaksanaan Monitoring dan Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja yaitu dengan hasil yang dilaporkan pada triwulan II B06 adalah telah dilaksanakan oleh para Pejabat Tinggi Pratama baik Kepala Kantor Wilayah maupun para Kepala Divisi diantaranya, pada tanggal 4 Juni 2022 dengan mengadakan evaluasi capaian pelaksanaan anggaran antara Pimpinan Tinggi Pratama dengan Kepala Kantor Wilayah serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Masyarakat dan Imigrasi dengan Kepala Kantor Wilayah serta melaksanakan evaluasi terhadap capaian laporan perjanjian kinerja melalui E-Performance serta laporan Target Kinerja pada Triwulan II B06.

C. Hasil yang dicapai

Capaian Perjanjian Kinerja Telah dituangkan kedalam laporan Perjanjian dan Realisasi Kinerja atau melalui aplikasi E-Performance telah dilaksanakan dan dilaporkan sesuai dengan Target yang telah ditentukan dan telah dievaluasi kantor wilayah Maluku Utara melakukan rapat evaluasi capaian target kinerja berdasarkan data yang ada pada aplikasi E-Performance Kemenkumham dengan rincian data sebagai berikut:

1. Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien pada Triwulan II B06 Terealisasi sebesar **100%**;
2. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah pada Triwulan II B06 Terealisasi sebesar **100%**;
3. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar pada Triwulan II B06 Terealisasi sebesar **100%**;
4. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi pada Triwulan II B06 Terealisasi sebesar **100%**;
5. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar pada Triwulan II B06 Terealisasi sebesar **100%**;
6. Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar pada Triwulan II B06 Terealisasi sebesar **100%**;
7. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar pada Triwulan II B06 Terealisasi sebesar **100%**;
8. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban pada Triwulan II B06 Terealisasi sebesar **100%**;
9. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar pada Triwulan II B06 Terealisasi sebesar **100%**;
10. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah pada Triwulan II B06 Terealisasi sebesar **100%**;
11. Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum pada Triwulan II B06 Terealisasi sebesar **100%**;
12. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD pada Triwulan II B06 Terealisasi sebesar **100%**;
13. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada Triwulan II B06 Terealisasi sebesar **100%**;
14. Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal pada Triwulan II B06 Terealisasi sebesar

100%;

15. Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia pada Triwulan II B06 Terealisasi sebesar **100%**;
16. Terefasilitasinya rancangan produk hukum di daerah pada Triwulan II B06 Terealisasi sebesar **150%**;
17. Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah pada Triwulan II B06 Terealisasi sebesar **100%**;
18. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM pada Triwulan II B06 Terealisasi sebesar **100%**;
19. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah pada Triwulan II B06 Terealisasi sebesar **100%**;

E-PERFORMANCE SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN: 2022
 UNIT KERJA: KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA
 TAHUN : 2022
 KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA

| NO | SISARAN STRATEGIS | NO | INDIKATOR KINERJA | CASCADING | | TARGET | | | | REALISASI | | CATATAN MONITORING | BSC | | | |
|----|---|----|---|-----------|-------|------------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|---|----------|-------|----------|---|
| | | | | KELUAR | MASUK | WAKTU PENYELESAIAN | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | (%) | URAIAN | | LAMPIRAN | BOBOT | SCORE/CM | |
| 1. | Terwujudnya layanan administrasi dan fasilitasi Kantor Wilayah yang efektif dan efisien | 1 | Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah | | | 3.1 Indeks Triwulan IV | TW1 | 3.1 | Indeks | 3.1 | 100 | Januari: Terewujudnya layanan admin positif dan fasilitasi Kantor Wilayah yang efektif dan efisien. Februari: Terewujudnya layanan administrasi dan fasilitasi Kantor Wilayah yang efektif dan efisien. Maret: Terewujudnya layanan admin positif dan fasilitasi Kantor Wilayah yang efektif dan efisien. | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | TW2 | 3.1 | Indeks | 3.1 | 100 | April: Mei: Juni: Terewujudnya layanan administrasi dan fasilitasi Kantor Wilayah yang efektif dan efisien. | | | | |
| | | | | | | | TW3 | 3.1 | Indeks | 0 | | Juli: Agustus: September: | | | | |
| | | | | | | | TW4 | 3.1 | Indeks | 0 | | Oktober: November: Desember: | | | | |
| 2. | Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan administrasi yang berkualitas di wilayah | 2 | Indeks penyelenggaraan pelayanan administrasi di wilayah | | | 81 Persen; Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari: Februari: Maret: Indeks penyelenggaraan administrasi di wilayah. | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April: Mei: Juni: Indeks penyelenggaraan administrasi di wilayah. | | | | |
| | | | | | | | TW3 | 60 | Persen | 0 | | Juli: Agustus: September: | | | | |
| | | | | | | | TW4 | 81 | Persen | 0 | | Oktober: November: Desember: | | | | |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | 3 | Persentase meningkatnya tahanan yang berkualitas | | | 80 Persen; Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari: Februari: Maret: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar. | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April: Mei: Juni: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar. | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------|-----|-----|--------|----|-----|--|--|---|---|
| | 6 | 2 | <p>Persentase Menunjang Anak yang mendapatkan bantuan di dana keluarga</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai:</p> | 50 Persen; Triwulan III | TW1 | 10 | Persen | 10 | 100 | <p>Januari: Februari Maret: Menengkapi pelayanan pembimbingan klien pama-jerawatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar</p> | | 0 | 0 |
| | | | | | TW2 | 20 | Persen | 20 | 100 | <p>April: Mei Juni: Menengkapi pelayanan pembimbingan klien pama-jerawatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar</p> | | | |
| | | | | | TW3 | 40 | Persen | 0 | | <p>Juli: Agustus September</p> | | | |
| | | | | | TW4 | 60 | Persen | 0 | | <p>Oktober: November Desember</p> | | | |
| | 6 | 3 | <p>Persentase Klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai:</p> | 30 Persen; Triwulan III | TW1 | 0 | | 0 | | <p>Januari: Februari Maret</p> | | 0 | 0 |
| | | | | | TW2 | 15 | Persen | 15 | 100 | <p>April: Mei Juni: Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya</p> | | | |
| | | | | | TW3 | 0 | | 0 | | <p>Juli: Agustus September</p> | | | |
| | | | | | TW4 | 30 | Persen | 0 | | <p>Oktober: November Desember</p> | | | |
| 1 | 7 | 1 | <p>Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Peningkatan Anak di wilayah sesuai standar</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai:</p> | 75 Persen; Triwulan III | TW1 | 10 | Persen | 10 | 100 | <p>Januari: Februari Maret: Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Peningkatan Anak di wilayah sesuai standar</p> | | 0 | 0 |
| | | | | | TW2 | 30 | Persen | 30 | 100 | <p>April: Mei Juni: Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Peningkatan Anak di wilayah sesuai standar</p> | | | |
| | | | | | TW3 | 50 | Persen | 0 | | <p>Juli: Agustus September</p> | | | |
| | | | | | TW4 | 75 | Persen | 0 | | <p>Oktober: November Desember</p> | | | |
| | 7 | 2 | <p>Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai:</p> | 100 Persen; Triwulan III | TW1 | 25 | Persen | 25 | 100 | <p>Januari: Februari Maret: Menengkapi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Peningkatan Anak di wilayah sesuai standar</p> | | 0 | 0 |
| | | | | | TW2 | 50 | Persen | 50 | 100 | <p>April: Mei Juni: Menengkapi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Peningkatan Anak di wilayah sesuai standar</p> | | | |
| | | | | | TW3 | 75 | Persen | 0 | | <p>Juli: Agustus September</p> | | | |
| | | | | | TW4 | 100 | Persen | 0 | | <p>Oktober: November Desember</p> | | | |
| | 7 | 3 | <p>Persentase Anak yang memperoleh hak Penguatan sesuai standar</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai:</p> | 80 Persen; Triwulan III | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | <p>Januari: Februari Maret: Menengkapi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Peningkatan Anak di wilayah sesuai standar</p> | | 0 | 0 |
| | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | <p>April: Mei Juni: Menengkapi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Peningkatan Anak di wilayah sesuai standar</p> | | | |
| | | | | | TW3 | 60 | Persen | 0 | | <p>Juli: Agustus September</p> | | | |
| | | | | | TW4 | 80 | Persen | 0 | | <p>Oktober: November Desember</p> | | | |
| | 7 | 4 | <p>Persentase anak yang menerima pendidikan formal dan non formal</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai:</p> | 30 Persen; Triwulan III | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | <p>Januari: Februari Maret: Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Peningkatan Anak di wilayah sesuai standar</p> | | 0 | 0 |
| | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | <p>April: Mei Juni: Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Peningkatan Anak di wilayah sesuai standar</p> | | | |
| | | | | | TW3 | 60 | Persen | 0 | | <p>Juli: Agustus September</p> | | | |
| | | | | | TW4 | 80 | Persen | 0 | | <p>Oktober: November Desember</p> | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|--|--------------------------|---------------------------|-----|---------|---------|-----|---|--|---|---|---|
| | | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April: Mei: Meningkatnya Pelayanan Keamanatan dan Ketertarikan di wilayah sesuai standar | | | | |
| | | | | | | TW3 | 60 | Persen | 0 | | Juni: Agustus: September | | | | |
| | | | | | | TW4 | 80 | Persen | 0 | | Oktober: November: Desember | | | | |
| | 9 | 4 | Persentase pemulih kondisi keamanan pada sambungan kabel di lokasi tertentu | | 70 Persen Triwulan IV | TW1 | 10 | Persen | 10 | 100 | Januari: Februari: Maret: Meningkatnya Pelayanan Keamanatan dan Ketertarikan di wilayah sesuai standar | | 0 | 0 | |
| | | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | | TW2 | 20 | Persen | 20 | 100 | April: Mei: Meningkatnya Pelayanan Keamanatan dan Ketertarikan di wilayah sesuai standar | | | | |
| | | | | | | TW3 | 50 | Persen | 0 | | Juni: Agustus: September | | | | |
| | | | | | | TW4 | 70 | Persen | 0 | | Oktober: November: Desember | | | | |
| 10. | | 10 | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Komigrasi di Wilayah | | 3,2 Indeks Triwulan IV | TW1 | 3,2 | Indeks | 3,2 | 100 | Januari: Februari: Maret: Meningkatnya kualitas pelayanan tugas dan fungsi Komigrasi di Wilayah | | 0 | 5 |
| | | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | | TW2 | 3,2 | Indeks | 3,2 | 100 | April: Mei: Meningkatnya kualitas pelayanan | | | | |
| | | | | | | TW3 | 3,2 | Indeks | 0 | | Juni: Agustus: September | | | | |
| | | | | | | TW4 | 3,2 | Indeks | 0 | | Oktober: November: Desember | | | | |
| | 10 | 2 | Indeks Penguasaan Kelembagaan di Wilayah | | 3 Indeks Triwulan IV | TW1 | 2 | Indeks | 3 | 100 | Januari: Februari: Maret: Meningkatnya kualitas pelayanan tugas dan fungsi Kelembagaan di Wilayah | | 0 | 0 | |
| | | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | | TW2 | 2 | Indeks | 3 | 100 | April: Mei: Meningkatnya kualitas pelayanan tugas dan fungsi Kelembagaan di Wilayah | | | | |
| | | | | | | TW3 | 2 | Indeks | 0 | | Juni: Agustus: September | | | | |
| | | | | | | TW4 | 2 | Indeks | 0 | | Oktober: November: Desember | | | | |
| 11. | | 11 | 1 | Persentase peningkatan minat Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang berprestasi hukum | | 5 Persen Triwulan IV | TW1 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | | TW2 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | TW3 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | TW4 | 5 | Persen | | | | | | | |
| 12. | | 12 | 1 | Persentase penyelesaian sengketa pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah | | 80 Persen Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari: Februari: Maret: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD | | 6 | 5 |
| | | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April: Mei: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD | | | | |
| | | | | | | TW3 | 60 | Persen | 0 | | Juni: Agustus: September | | | | |
| | | | | | | TW4 | 82 | Persen | 0 | | Oktober: November: Desember | | | | |
| 13. | | 13 | 1 | Terselenggaranya pelayanan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | 20 Layanan Triwulan IV | TW1 | 5 | Layanan | 5 | 100 | Januari: Februari: Maret: Terselenggaranya pelayanan tugas intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | 0 | 0 |
| | | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | | TW2 | 10 | Layanan | 10 | 100 | April: Mei: Meningkatnya pelayanan keajaiban intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | | | |
| | | | | | | TW3 | 15 | Layanan | 0 | | Juni: Agustus: September | | | | |
| | | | | | | TW4 | 20 | Layanan | 0 | | Oktober: November: Desember | | | | |
| | 13 | 2 | Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan promosi keajaiban intelektual oleh Kantor Wilayah | | 1 Lokasi Triwulan IV | TW1 | 0 | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | TW2 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | TW3 | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|--|---------------------------|-----------------------|-----|---------|------|-----|---|---------------------------------|---|---|
| 14. Terelemparnya Penegakan Hukum di Bidang Kelayakan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal | 14 | 1 | Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kelayaan Intelektual | 100 Persen Triwulan IV | TW1 | 25 | Persen | 25 | 100 | Januari: Februari: Maret: Terelemparnya Penegakan Hukum di Bidang Kelayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | 0 | 0 | |
| | | | | | TW2 | 50 | Persen | 50 | 100 | April: Mei: Juni: Terelemparnya Penegakan Hukum di Bidang Kelayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | | | |
| | | | | | TW3 | 75 | Persen | 0 | 0 | Juli: Agustus: September: | | | |
| | | | | | TW4 | 100 | Persen | 0 | 0 | Oktober: November: Desember: | | | |
| 14 | 2 | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pelanggaran Kelayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah | | 5 Lokus Triwulan IV | TW1 | 1 | Lokus | 1 | 100 | Januari: Februari: Maret: Terelemparnya Penegakan Hukum di Bidang Kelayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | 0 | 0 | |
| | | | | | TW2 | 2 | Lokus | 2 | 100 | April: Mei: Juni: Terelemparnya Penegakan Hukum di Bidang Kelayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | | | |
| 14 | 8 | Kegiatan Pemertuaan Produk Kayaan Intelektual di Wilayah | | 4 Laporan Triwulan IV | TW1 | 1 | Laporan | 1 | 100 | Januari: Februari: Maret: Terelemparnya Penegakan Hukum di Bidang Kelayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | 0 | 0 | |
| | | | | | TW2 | 2 | Laporan | 2 | 100 | April: Mei: Juni: Terelemparnya Penegakan Hukum di Bidang Kelayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | | | |
| | | | | | TW3 | 3 | Laporan | 0 | 0 | Juli: Agustus: September: | | | |
| | | | | | TW4 | 4 | Laporan | 0 | 0 | Oktober: November: Desember: | | | |
| 15. Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia | 15 | 1 | Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia | 70 Persen Triwulan IV | TW1 | 10 | Persen | 10 | 100 | Januari: Februari: Maret: Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia | 0 | 0 | |
| | | | | | TW2 | 30 | Persen | 30 | 100 | April: Mei: Juni: Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia | | | |
| | 15 | 2 | Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang dipublikasikan di wilayah | | 3 Buku Triwulan IV | TW1 | 0 | | 0 | 0 | Juli: Agustus: September: | 0 | 0 |
| | | | | | | TW2 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | TW4 | 1 | Buku | 0 | 0 | 0 | | |
| 16. Terfaktalkanya rancangan produk hukum di daerah | 16 | 1 | Persentase rancangan produk yang difaktalka oleh kantor wilayah ke gubernur | 80 Persen Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 30 | 150 | Januari: Terfaktalkanya rancangan produk hukum di daerah Februari: Terfaktalkanya rancangan produk hukum di daerah Maret: Terfaktalkanya rancangan produk hukum di daerah | 0 | 0 | |
| | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April: Mei: Juni: Terfaktalkanya rancangan produk hukum di daerah | | | |
| | | | | | TW3 | 60 | Persen | 0 | 0 | Juli: Agustus: September: | | | |
| | | | | | TW4 | 80 | Persen | 0 | 0 | Oktober: November: Desember: | | | |
| 17. Terelemparnya pembinaan beranang peraturan perundang-undangan | 17 | 1 | Jumlah peninjauan keabsahan perundang-undangan | 12 Orang Triwulan IV | TW1 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | TW2 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | TW3 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | TW4 | 12 | Orang | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|------------------------|-----|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 18. Tersingkapnya fasilitas pertahanan serta pemantauan dan pengamanan pada sarana produksi hukum daerah | 18 | 1 | Jumlah kegiatan pembinaan pemantauan dan pengamanan produk hukum daerah | 3 Kegiatan Triwulan IV | TW1 | 0 | 0 | 0 | Januari : Februari : Maret : | 0 | 0 | |
| | | | | | TW2 | 1 | 1 | 100 | April : Mei : Juni : Jumlah kegiatan pembinaan dan pemantauan produk hukum daerah | | | |
| | | | | | TW3 | 2 | 0 | 0 | Juli : Agustus : September : | | | |
| | | | | | TW4 | 3 | 0 | 0 | Oktober : November : Desember : | | | |
| Sasaran Kinerja Pegawai : | | | | | | | | | | | | |
| 19. Meningkatkan kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | 19 | 1 | Perentase permohonan bantuan hukum gratis yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang undangan | 31 Persen Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari : Februari : Maret : Meningkatkan kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | 0 | 0 |
| | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April : Mei : Juni : Meningkatkan kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | | |
| | | | | | TW3 | 60 | Persen | 0 | 0 | Juli : Agustus : September : | | |
| | | | | | TW4 | 81 | Persen | 0 | 0 | Oktober : November : Desember : | | |
| Sasaran Kinerja Pegawai : | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 2 | Perentase permohonan bantuan hukum non gratis yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang undangan | 30 Persen Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari : Februari : Maret : Meningkatkan kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | 0 | 0 | |
| | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April : Mei : Juni : Meningkatkan kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | | | |
| | | | | TW3 | 60 | Persen | 0 | 0 | Juli : Agustus : September : | | | |
| | | | | TW4 | 80 | Persen | 0 | 0 | Oktober : November : Desember : | | | |
| Sasaran Kinerja Pegawai : | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 2 | Indeks kepuasan layanan bantuan hukum | 76,61 Persen Triwulan IV | TW1 | 10 | Persen | 10 | 100 | Januari : Februari : Maret : Meningkatkan kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | 0 | 0 | |
| | | | | TW2 | 30 | Persen | 30 | 100 | April : Mei : Juni : Meningkatkan kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | | | |
| | | | | TW3 | 60 | Persen | 0 | 0 | Juli : Agustus : September : | | | |
| Sasaran Kinerja Pegawai : | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 4 | Perentase jumlah sasar hukum yang terakuis di masing-masing wilayah | 70 Persen Triwulan IV | TW1 | 10 | Persen | 10 | 100 | Januari : Februari : Maret : Meningkatkan kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | 0 | 0 | |
| | | | | TW2 | 30 | Persen | 30 | 100 | April : Mei : Juni : Meningkatkan kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | | | |
| | | | | TW3 | 50 | Persen | 0 | 0 | Juli : Agustus : September : | | | |
| | | | | TW4 | 70 | Persen | 0 | 0 | Oktober : November : Desember : | | | |
| Sasaran Kinerja Pegawai : | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 8 | Perentase website anggota JDIH yang terintegrasi dengan portal sistem integrasi JDIH | 20 Persen Triwulan IV | TW1 | 0 | Persen | 0 | 0 | Januari : Februari : Maret : | 0 | 0 | |
| | | | | TW2 | 10 | Persen | 10 | 100 | April : Mei : Juni : Perentase website anggota JDIH yang terintegrasi dengan portal sistem integrasi JDIH | | | |
| | | | | TW3 | 0 | Persen | 0 | 0 | Juli : Agustus : September : | | | |
| | | | | TW4 | 20 | Persen | 0 | 0 | Oktober : November : Desember : | | | |
| Sasaran Kinerja Pegawai : | | | | | | | | | | | | |

➤ Divisi Administrasi

**SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI ADMINISTRASI**

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|-----------------------------------|--|---|--|----------------|
| KEPALA DIVISI ADMINISTRASI | | | | |
| 1 | Peningkatan Kapasitas SDM Wilayah Melalui Implementasi Corporate University | | | |
| | B04 | - | - | - |
| | B05 | - | - | - |
| | B06 | Pelaksanaan workshop/sosialisasi terkait Nilai-Nilai Reformasi Birokrasi | Subbag Kepegawaian dan Humas RB | Sudah Diunggah |
| 2 | Tersusunnya Best Practice di Kantor Wilayah | | | |
| | B04 | - | - | - |
| | B05 | - | - | - |
| | B06 | Tersusunnya 2 (dua) best practice Kementerian Hukum dan HAM Corporate University dalam bidang Masyarakat dan Imigrasi | Subbag Kepegawaian dan Divisi Pas, Divisi Imigrasi | Sudah Diunggah |
| 3 | Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Inspektorat Jenderal) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | | | |
| | B04 | Monitoring dan percepatan TLHP BPK dan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal | Subbag Program dan Pelaporan | Sudah Diunggah |
| | B05 | Monitoring dan percepatan TLHP BPK dan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal | Subbag Program dan Pelaporan | Sudah Diunggah |
| | B06 | Pelaksanaan percepatan TLHP BPK dan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal | Subbag Program dan Pelaporan | Sudah Diunggah |
| 4 | Penetapan status penggunaan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 80% | | | |
| | B04 | Inventarisasi data penggunaan BMN berdasarkan aplikasi SIMAN pada kanwil dan UPT di bawah 70% | Subbag Keu dan BMN | Sudah Diunggah |
| | B05 | Melakukan pengusulan penetapan status penggunaan BMN berdasarkan kewenangannya | Subbag Keu dan BMN | Sudah Diunggah |
| | B06 | Inventarisasi data penggunaan BMN berdasarkan aplikasi SIMAN pada kanwil dan UPT di bawah 80% | Subbag Keu dan BMN | Sudah Diunggah |
| 5 | Nilai Pengawasan Kearsipan Pengelolaan Arsip Dinamis 70 | | | |
| | B04 | Pelaksanaan Pengawasan Lapangan Pengelolaan Kearsipan (Arsip Aktif dan Inaktif) pada Unit Pelaksana Teknis | Subbag Kepegawaian | Sudah Diunggah |
| | B05 | - | - | - |
| | B06 | - | - | - |
| 6 | Penerapan Protokol Kesehatan di Perkantoran di masa Adaptasi Kebiasaan Baru, 0 orang terpapar covid | | | |
| | B04 | - | - | - |
| | B05 | - | - | - |

**SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI ADMINISTRASI**

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|-----------|---|--|------------------------------|----------------|
| | B06 | Monitoring status covid pegawai dan WBP serta penanganan pegawai dan WBP yang terpapar covid Triwulan II | Subbag Kepegawaian | Sudah Diunggah |
| 7 | Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA dan SMART) Kantor Wilayah, 95 | | | |
| | B04 | Evaluasi nilai IKPA Kantor Wilayah dan UPT Triwulan I | Subbag Keu dan BMN | Sudah Diunggah |
| | B05 | - | - | - |
| | B06 | - | - | - |
| 8 | Penyelesaian Pengaduan pada Aplikasi LAPOR | | | |
| | B04 | Penyelesaian pengaduan pada aplikasi LAPOR! Tahun 2022 | Subbag Humas RB, TI | Sudah Diunggah |
| | B05 | Penyelesaian pengaduan pada aplikasi LAPOR! Tahun 2022 | Subbag Humas RB, TI | Sudah Diunggah |
| | B06 | 1. Penyelesaian pengaduan pada aplikasi LAPOR! 2. Evaluasi pelayanan pada UPT yang mendapat pengaduan aduan pada aplikasi LAPOR! Semester I | Subbag Humas RB, TI | Sudah Diunggah |
| 9 | Pembinaan untuk Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | | | |
| | B04 | - | - | - |
| | B05 | - | - | - |
| | B06 | Penyusunan Laporan Tahunan SPIP | Subbag Humas RB, TI | Sudah Diunggah |
| 10 | Pelaksanaan Manajemen Risiko | | | |
| | B04 | - | - | - |
| | B05 | - | - | - |
| | B06 | 1. Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Risiko Triwulan II 2. Penyusunan Laporan Pengendalian Risiko Semester I | Subbag Humas RB, TI | Sudah Diunggah |
| 11 | Tersusunnya LKIP Kantor Wilayah dan Pelaporan E-Performance Tepat Waktu | | | |
| | B04 | 1. Evaluasi capaian PK Kantor Wilayah dan UPT; 2. Pelaporan capaian perjanjian kinerja pada aplikasi e-performance | Subbag Program dan Pelaporan | Sudah Diunggah |
| | B05 | Pelaporan capaian perjanjian kinerja pada aplikasi e-performance | Subbag Program dan Pelaporan | Sudah Diunggah |
| | B06 | Pelaporan capaian perjanjian kinerja pada aplikasi e-performance | Subbag Program dan Pelaporan | Sudah Diunggah |

Data per tanggal 1 Juli 2022

➤ **Divisi Pelayanan Hukum dan HAM**

**SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|--|---|---|----------------------|----------------|
| KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM | | | | |
| 1 | 80% Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | | |
| | B04 | Terfasilitasinya rancangan peraturan daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah | Bidang Hukum | Sudah Diunggah |
| | B05 | Terfasilitasinya rancangan peraturan daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah | Bidang Hukum | Sudah Diunggah |
| | B06 | Terfasilitasinya rancangan peraturan daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah | Bidang Hukum | Sudah Diunggah |
| 2 | 40 % Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia | | | |
| | B04 | Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B04 | Bidang HAM | Sudah Diunggah |
| | B05 | Pemantauan Pelaporan Aksi HAM Daerah Periode B04 | Bidang HAM | Sudah Diunggah |
| | B06 | Koordinasi dan Konsultasi Persiapan Pelaporan Aksi HAM Periode B08 | Bidang HAM | Sudah Diunggah |
| 3 | 70% Desa/Kelurahan Sadar Hukum | | | |
| | B04 | Evaluasi DSH secara administratif (apakah desa masih ada atau tidak atau masih tercatat pada administratif pemerintahan) Tahap I | Bidang Hukum | Sudah Diunggah |
| | B05 | - | - | - |
| | B06 | Penyusunan laporan hasil evaluasi DSH berdasarkan syarat administratif | Bidang Hukum | Sudah Diunggah |
| 4 | Tersedianya rekomendasi hasil kajian/analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah | | | |
| | B04 | 1. Analisis data hasil survei online 3AS Triwulan I (Januari-Maret) 2. Pelaksanaan verifikasi lapangan evaluasi hasil survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi (lanjutan) 3. Data monitoring hasil survei online IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan April | Bidang HAM | Sudah Diunggah |
| | B05 | 1. Pengolahan dan analisa data hasil verifikasi lapangan evaluasi hasil survei IPK-IKM serta indeks integritas organisasi 2. Penyusunan draf laporan akhir evaluasi hasil survei IPK-IKM serta indeks integritas 3. Presentasi draf laporan akhir evaluasi hasil survei IPK-IKM serta indeks integritas 4. Penyempurnaan laporan akhir evaluasi hasil survei IPK-IKM serta indeks integritas 5. Data monitoring hasil survei online IPK-IKM serta indeks integritas organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Mei | Bidang HAM | Sudah Diunggah |
| | B06 | 1. Penyampaian Laporan Akhir Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan | Bidang HAM | Sudah Diunggah |

**SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|----------|---|---|------------------------|----------------|
| | | Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kantor Wilayah serta Kepala UPT terkait. 2. Data monitoring hasil survei online IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Juni | | |
| 5 | Tersedianya rekomendasi hasil analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM guna mendukung pembuatan kebijakan di wilayah | | | |
| | B04 | Penyusunan inventarisasi dan identifikasi data pelayanan publik/permasalahan hukum/permasalahan HAM sesuai aplikasi SIPKUMHAM | Bidang HAM | Sudah Diunggah |
| | B05 | 1. Pelaksanaan verifikasi pengumpulan data lapangan 2. Pengolahan dan analisis data hasil verifikasi lapangan 3. Penyusunan draf laporan analisis kebijakan yang berisi rekomendasi | Bidang HAM | Sudah Diunggah |
| | B06 | 1. Pembahasan draf laporan analisis kebijakan dengan melibatkan stakeholders 2. Penyempurnaan laporan analisis kebijakan yang berisi rekomendasi 3. Penginputan laporan analisis kebijakan pada aplikasi SIPKUMHAM 4. Penyampaian laporan analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM kepada Kepala kantor wilayah | Bidang HAM | Sudah Diunggah |
| 6 | Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM | | | |
| | B04 | Mengunggah dokumen pelaporan KKP HAM pemda masing-masing wilayah ke website aplikasi (kkpnam.kemenkumham.go.id) | Bidang HAM | Sudah Diunggah |
| | B05 | Menginventarisir hasil pelaporan KKP HAM | Bidang HAM | Sudah Diunggah |
| | B06 | Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengisian formulir indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM | Bidang HAM | Sudah Diunggah |
| 7 | Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM | | | |
| | B04 | Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh kanwil pada Triwulan I | Bidang HAM | Sudah Diunggah |
| | B05 | Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh kanwil pada Triwulan I | Bidang HAM | Sudah Diunggah |
| | B06 | Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh kanwil pada Triwulan I | Bidang HAM | Sudah Diunggah |
| 8 | Tercapainya pelaksanaan Pengawas Wilayah dan Daerah terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah | | | |
| | B04 | Pengawasan Penerapan PMPJ oleh Tm Audit Pengawas Kepatuhan kepada notaris di wilayah periode I (April hingga Juni 2022) | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diunggah |
| | B05 | Pengawasan Penerapan PMPJ oleh Tm Audit | Bidang Pelayanan | Sudah |

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|----|--|--|------------------------|----------------|
| | | Pengawas Kepatuhan kepada notaris di wilayah periode I (April hingga Juni 2022) | Hukum | Diunggah |
| | B06 | Pengawasan Penerapan PMPJ oleh Tm Audit Pengawas Kepatuhan kepada notaris di wilayah periode I (April hingga Juni 2022) | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diunggah |
| 9 | Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran 50% data PPNS melalui aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham | | | |
| | B04 | | | |
| | B05 | | | |
| | B06 | Koordinasi terkait pelaksanaan pelaporan pelantikan PPNS di wilayah melalui aplikasi PPNS | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diunggah |
| 10 | Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi layanan AHU di wilayah, (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Partai Politik, Perseroan Perorangan dan Apostille) | | | |
| | B04 | Diseminasi Layanan Perseroan Perorangan | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diunggah |
| | B05 | Diseminasi Layanan Perseroan Perorangan | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diunggah |
| | B06 | Diseminasi Layanan Kewarganegaraan & Pewarganegaraan | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diunggah |
| 11 | Terlaksananya kegiatan-kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas permohonan bersama dengan stakeholder di wilayah | | | |
| | B04 | Melaksanakan kegiatan edukasi/sosialisasi/diseminasi kepada stakeholder (akademisi, mahasiswa, siswa/siswi sekolah, penggiat seni, dll) terkait dengan Hak Cipta dikaitkan dengan tema IP Youth | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diunggah |
| | B05 | Persiapan pelaksanaan implementasi MoU/PKS atau penandatanganan MoU/PKS baru semester I | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diunggah |
| | B06 | Implementasi kerjasama dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas permohonan bersama dengan stakeholder di wilayah | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diunggah |
| 12 | Peningkatan permohonan Indikasi Geografis melalui kerjasama dengan MPIG/Pemerintah Daerah/stakeholder terkait | | | |
| | B04 | Sosialisasi dan pelaksanaan penyusunan dokumen deskripsi IG (permohonan IG) | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diunggah |
| | B05 | - | - | - |
| | B06 | Pelaksanaan penyusunan dokumen deskripsi IG (permohonan IG) | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diunggah |
| 13 | Mendorong pertumbuhan HKI di wilayah melalui pembangunan IP Clinic atau Mobile IP Clinic | | | |
| | B04 | 1. Pelaksanaan layanan HKI oleh tim IP Clinic atau MIC; 2. Pelaksanaan edukasi/sosialisasi/diseminasi HKI kepada masyarakat dengan narasumber TIM MIC (kegiatan diselenggarakan kanwil/pemda) | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diunggah |
| | B05 | 1. Pelaksanaan layanan HKI oleh tim IP Clinic atau MIC; 2. Pelaksanaan edukasi/sosialisasi/diseminasi HKI kepada masyarakat dengan narasumber TIM MIC (kegiatan diselenggarakan kanwil/pemda) | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diunggah |
| | B06 | 1. Pelaksanaan layanan HKI oleh tim IP Clinic atau MIC; 2. Pelaksanaan edukasi/sosialisasi/diseminasi HKI kepada masyarakat dengan narasumber TIM MIC (kegiatan diselenggarakan kanwil/pemda) | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diunggah |
| 14 | Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual | | | |
| | B04 | 1. Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait sertifikasi pusat perbelanja; 2. Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diunggah |
| | B05 | 1. Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait sertifikasi pusat perbelanja; 2. Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diunggah |
| | B06 | 1. Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait sertifikasi pusat perbelanja; 2. Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diunggah |

➤ Divisi Pemasyarakatan

**SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI PEMASYARAKATAN**

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|-------------------------------------|---|---|----------------------|----------------|
| KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN | | | | |
| 1 | Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar, dengan terlaksananya deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada lapas, rutan dan LPKA | | | |
| | B04 | 1. Melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban 2. Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan membuat laporan kegiatan intelijen | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| | B05 | Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan membuat laporan kegiatan intelijen | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| | B06 | 1. Melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan hasil identifikasi instrument deteksi dini B03 2. Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan membuat laporan kegiatan intelijen | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| 2 | Seluruh Lapas, Rutan dan LPKA melaksanakan input data pada SDP fitur keamanan | | | |
| | B04 | Sebanyak 30% Lapas, Rutan dan LPKA telah melaksanakan input data keamanan pada SDP fitur keamanan | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| | B05 | Operator SDP Keamanan Kantor Wilayah dan UPT melaporkan hambatan dan kendala teknis dalam penginputan data keamanan | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| | B06 | Sebanyak 60% Lapas, Rutan dan LPKA telah melaksanakan input data keamanan pada SDP fitur keamanan | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| 3 | Redistribusi pada UPT dengan tingkat overcrowding di atas 300% | | | |
| | B04 | Pelaksanaan Redistribusi Narapidana dari Lapas over crowding di atas 300 % ke Lapas yang tidak over crowding di dalam atau luar wilayah | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| | B05 | Pelaksanaan Redistribusi Narapidana dari Lapas over crowding di atas 300 % ke Lapas yang tidak over crowding di dalam atau luar wilayah | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| | B06 | Pelaksanaan Redistribusi Narapidana dari Lapas over crowding di atas 300 % ke Lapas yang tidak over crowding di dalam atau luar wilayah | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| 4 | Penerapan SPPT-TI pada 213 UPT Lapas/Rutan/Bapas Pilot Project | | | |
| | B04 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan/Download Data SPPT TI oleh UPT Pemasyarakatan melalui Aplikasi SDP | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| | B05 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan/Download Data SPPT TI oleh UPT Pemasyarakatan melalui Aplikasi SDP | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| | B06 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan/Download Data SPPT TI oleh UPT Pemasyarakatan melalui Aplikasi SDP | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| 5 | Terseleenggaranya Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Narapidana | | | |
| | B04 | Mentoring kepada UPT Pemasyarakatan | DIV PAS | Sudah |

**SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI PEMASYARAKATAN**

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|----------|---|---|----------------------|----------------|
| | | Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan oleh Tim Mentor Kantor Wilayah | | Diunggah |
| | B05 | Mentoring kepada UPT Pemasarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan oleh Tim Mentor Kantor Wilayah | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| | B06 | Monitoring Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan Melalui SDP Fitur Watkesrehab | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| 6 | 80% Narapidana memperoleh pendidikan vokasi bersertifikasi melalui pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa) | | | |
| | B04 | Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di lapas seluruh Indonesia | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| | B05 | Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di lapas seluruh Indonesia | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| | B06 | Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di lapas seluruh Indonesia | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| 7 | 45% Narapidana memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berwirausaha 1. Pengembangan Lapas Produktif sesuai dengan kebutuhan Industri saat ini; 2. Pelaksanaan Pembinaan melalui Saran Asimilasi dan Edukasi (SAE) di wilayah | | | |
| | B04 | 1. Implementasi Lapas Produktif; 2. Implementasi Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| | B05 | 1. Implementasi Lapas Produktif; 2. Implementasi Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| | B06 | 1. Implementasi Lapas Produktif; 2. Implementasi Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| 8 | 65% Narapidana yang dinilai dengan menggunakan instrumen SPPN memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian | | | |
| | B04 | Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| | B05 | Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| | B06 | Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| 9 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Basan Baran di Rupbasan | | | |
| | B04 | Penyampaian Perjanjian Kerjasama dengan DJKN-BPSDM Kemenkumham RI terkait penilaian dan pelatihan keahlian penaksiran/penilaian | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| | B05 | Penyampaian Perjanjian Kerjasama dengan DJKN-BPSDM Kemenkumham RI terkait penilaian dan pelatihan keahlian penaksiran/penilaian | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| | B06 | Penyampaian Perjanjian Kerjasama dengan DJKN-BPSDM Kemenkumham RI terkait penilaian dan pelatihan keahlian penaksiran/penilaian | DIV PAS | Sudah Diunggah |

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|----|---|---|----------------------|----------------|
| 10 | Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa pada 10 Kota: 1. Kota Banda Aceh, Aceh; 2. Kota Tanjung Pinang, Kepri; 3. Palembang, Sumsel; 4. Yogyakarta, DIY; 5. Tanjung Selor, Kalimantan Utara; 6. Kupang, NTT; 7. Kota Gorontalo, Gorontalo; 8. Kota Palu, Sulteng; 9. Ternate, Maluku utara; 10. Kota Jayapura, Papua. | | | |
| | B04 | Pelaksanaan Pedoman Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| | B05 | Pelaksanaan Pedoman Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| | B06 | Pelaksanaan Pedoman Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan | DIV PAS | Sudah Diunggah |
| 11 | Manajemen mitigasi bencana dalam rangka pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemasarakatan | | | |
| | B04 | - | - | - |
| | B05 | - | - | - |
| | B06 | Pembentukan SK Tim | DIV PAS | Sudah Diunggah |

Data per tanggal 4 Juli 2022

➤ Divisi Keimigrasian

**SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI KEIMIGRASIAN**

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|-----------------------------------|--|--|----------------------|-------------------------------------|
| KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN | | | | |
| 1 | Tersedianya Data Cekal di Divisi Keimigrasian dan Terselenggaranya Pengusulan Cekal yang Cepat, Tepat dan Berbasis IT | | | |
| | B02 | Uji coba aplikasi cekal online di satuan kerja | Divisi Keimigrasian | 100 |
| | B05 | Tersedianya data cekal di UPT | Divisi Keimigrasian | Sudah Mengunggah Data Dukung |
| | B08 | Tersedianya data cekal di UPT | Divisi Keimigrasian | |
| | B11 | 1. Inventarisasi permasalahan cekal online 2. Terselenggaranya aplikasi cekal online 3. Usulan pengembangan aplikasi dan kebijakan | Divisi Keimigrasian | |
| 2 | Penegakan Hukum Berbasis SOPAP dan Regulasi | | | |
| | B02 | Uji coba SOPAP Penegakan Hukum Keimigrasian di UPT | Divisi Keimigrasian | 100 |
| | B05 | 1. Penerapan SOPAP 2. Database Penegakan Hukum | Divisi Keimigrasian | Sudah Mengunggah Data Dukung |
| | B08 | 1. Penerapan SOPAP 2. Database Penegakan Hukum | Divisi Keimigrasian | |
| | B11 | Evaluasi SOPAP Penegakan Hukum Keimigrasian | Divisi Keimigrasian | |
| 3 | Implementasi Mobile Paspur | | | |
| | B02 | 1. Penyusunan rencana kegiatan; 2. Sosialisasi layanan Mobile Paspur ke masyarakat, instansi pemerintah/BUMN/swasta/komunitas | Divisi Keimigrasian | 100 |
| | B05 | 1. Melakukan sosialisasi layanan Mobile Paspur; 2. Melaksanakan Mobile Paspur | Divisi Keimigrasian | Sudah Mengunggah Data Dukung |
| | B08 | 1. Melaksanakan kegiatan Mobile Paspur; 2. Melakukan monitoring kepada Unit Pelaksana Teknis implementasi Mobile Paspur | Divisi Keimigrasian | |
| | B11 | 1. Melaksanakan kegiatan Mobile Paspur; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan Mobile Paspur pada UPT | Divisi Keimigrasian | |

➤ **Data Capaian Kinerja TW II Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Maluku Utara**

PENERAPAN ANGGARAN
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
PER 30 JUNI 2022

| No | Kode Nama Satkor | Pegawai | | | Barang | | | Modal | | | Total | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | Pagu | Real | % | Pagu | Real | % | Pagu | Real | % | Pagu | Real | % |
| 1 | 692722 RUPASAN TERNATE | 1.187.415.000 | 716.924.178 | 60,38% | 834.381.000 | 544.330.000 | 65,24% | 150.000.000 | 147.770.509 | 98,51% | 2.171.796.000 | 1.409.004.667 | 64,88% |
| 2 | 352614 LPKA TERNATE | 2.639.715.000 | 1.648.777.674 | 62,46% | 1.507.204.000 | 751.279.842 | 49,85% | 150.000.000 | 149.800.000 | 99,87% | 4.296.919.000 | 2.349.857.516 | 54,71% |
| 3 | 649027 DITJEN PP | - | - | - | 247.000.000 | 143.786.000 | 58,21% | - | - | - | 247.000.000 | 143.786.000 | 58,21% |
| 4 | 497840 LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO | 1.770.543.000 | 1.255.918.946 | 70,93% | 1.826.908.000 | 760.150.486 | 41,61% | 150.000.000 | 149.796.044 | 99,86% | 3.747.451.000 | 2.165.865.476 | 57,80% |
| 5 | 684003 RUTAN WEDA | 972.514.000 | 639.649.552 | 65,77% | 1.225.857.000 | 554.299.717 | 45,22% | 150.000.000 | 149.422.500 | 99,62% | 2.348.371.000 | 1.343.371.769 | 57,26% |
| 6 | 649028 DITJEN HAM | - | - | - | 273.061.000 | 154.721.000 | 56,66% | - | - | - | 273.061.000 | 154.721.000 | 56,66% |
| 7 | 632047 BAPAS KELAS II TIDORE | 694.184.000 | 553.331.614 | 79,71% | 1.245.000.000 | 452.024.470 | 36,31% | 150.000.000 | 149.734.881 | 99,82% | 2.089.184.000 | 1.155.090.965 | 55,29% |
| 8 | 649029 BPHN | - | - | - | 1.199.088.000 | 680.195.100 | 57,56% | - | - | - | 1.199.088.000 | 680.195.100 | 57,56% |
| 9 | 649023 DITJEN AHU | - | - | - | 2.031.284.000 | 1.025.293.759 | 50,48% | - | - | - | 2.031.284.000 | 1.025.293.759 | 50,48% |
| 10 | 649030 BALITBANGHAM | - | - | - | 235.670.000 | 118.922.450 | 50,46% | - | - | - | 235.670.000 | 118.922.450 | 50,46% |
| 11 | 649025 DITJEN IMIGRASI | - | - | - | 1.462.670.000 | 735.618.379 | 50,29% | - | - | - | 1.462.670.000 | 735.618.379 | 50,29% |
| 12 | 649026 DITJEN KI | - | - | - | 913.009.000 | 457.736.500 | 50,10% | - | - | - | 913.009.000 | 457.736.500 | 50,10% |
| 13 | 649022 SETJEN | 7.217.601.000 | 3.397.408.445 | 47,07% | 5.917.838.000 | 3.322.746.576 | 56,15% | 304.390.000 | - | 0,00% | 13.439.879.000 | 6.720.155.021 | 49,99% |
| 14 | 652827 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE | 3.732.598.000 | 1.810.436.716 | 48,50% | 4.780.633.000 | 2.378.579.839 | 49,76% | 130.000.000 | 129.339.016 | 99,49% | 8.643.231.000 | 4.318.755.571 | 49,97% |
| 15 | 109153 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO | 2.750.632.000 | 1.534.863.536 | 55,80% | 2.661.996.000 | 1.092.390.887 | 41,04% | 150.000.000 | 148.973.612 | 99,32% | 5.562.628.000 | 2.776.128.035 | 49,91% |
| 16 | 662968 KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO | 1.418.144.000 | 749.236.880 | 52,83% | 3.816.718.000 | 1.788.882.293 | 46,87% | 148.400.000 | 148.395.000 | 100,00% | 5.383.262.000 | 2.686.514.173 | 49,90% |
| 17 | 407499 RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE | 2.907.790.000 | 1.628.338.075 | 56,00% | 2.579.133.000 | 1.018.466.433 | 39,49% | 145.765.000 | 145.465.936 | 99,81% | 5.632.688.000 | 2.792.310.444 | 49,57% |
| 18 | 407503 LAPAS KELAS III LABUHA | 1.761.309.000 | 908.283.288 | 51,57% | 2.070.896.000 | 886.545.737 | 42,81% | 150.000.000 | 149.464.235 | 99,64% | 3.982.205.000 | 1.944.293.260 | 48,82% |
| 19 | 109153 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA | 3.013.380.000 | 1.559.608.172 | 51,76% | 2.496.770.000 | 1.049.921.271 | 42,05% | 150.000.000 | 148.976.800 | 99,32% | 5.660.150.000 | 2.758.506.243 | 48,74% |
| 20 | 602616 BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE | 1.909.234.000 | 1.125.904.883 | 58,97% | 1.360.737.000 | 444.899.100 | 32,70% | 150.000.000 | 70.297.980 | 46,87% | 3.439.971.000 | 1.641.101.963 | 47,75% |
| 21 | 521891 RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU | 2.723.091.000 | 1.082.549.396 | 39,75% | 1.533.160.000 | 813.952.830 | 53,09% | 150.000.000 | 149.859.000 | 99,91% | 4.406.251.000 | 2.046.361.226 | 46,44% |
| 22 | 480505 KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE | 2.826.275.000 | 1.506.723.687 | 53,31% | 5.700.213.000 | 2.539.198.837 | 44,55% | 1.399.631.000 | 424.585.901 | 30,34% | 9.926.119.000 | 4.470.508.425 | 45,04% |
| 23 | 649024 DITJEN PEMASYARAKATAN | - | - | - | 1.027.254.000 | 419.244.900 | 40,81% | - | - | - | 1.027.254.000 | 419.244.900 | 40,81% |
| 24 | 438350 LAPAS PEREMPULAN TERNATE | 2.887.801.000 | 1.418.959.921 | 49,14% | 1.564.213.000 | 774.758.926 | 49,53% | 5.916.050.000 | 402.001.395 | 6,80% | 10.368.064.000 | 2.595.720.242 | 25,04% |
| TOTAL | | 40.412.276.000 | 21.536.914.963 | 53,29% | 48.511.273.000 | 22.858.335.732 | 47,12% | 9.544.236.000 | 2.663.902.809 | 27,81% | 98.467.785.000 | 47.059.153.504 | 47,79% |

sumber : <http://spanirt.kemenkeu.go.id/>

4 Juli 2022 pukul 17.30 WIT

D. Simpulan dan Saran

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja melalui Aplikasi E-Performance serta pelaksanaan Target Kinerja B06 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah dilaksanakan 100%. Penyampaian Data Dukung seluruh satuan kerja telah terupload pada aplikasi Target Kinerja Kemenkumham. Kantor Wilayah beserta jajaran terus berkomitmen melaksanakan semua target kinerja yang telah ditentukan oleh masing masing unit eselon I dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH.1.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022. Hal tersebut merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan Anggaran lewat Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Tahun Anggaran 2022 Kantor wilayah secara keseluruhan tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya walaupun mengalami keterlambatan dalam pengesahan yang di lakukan oleh masih masing unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM. Hanya saja ada pembaharuan dalam penyampaian data dukung pelaporan pada aplikasi Target Kinerja Kemenkumham, dimana penyampaian data dukung laporan harus di sampaikan setiap bulannya, akan tetapi tetap mengikuti matriks Target Kinerja yang sudah disampaikan. Pelaksana target kinerja di lingkungan Kantor Wilayah mengingat ada beberapa target kinerja yang bekerja sama dengan pemerintah daerah atau kabupaten, pelaksanaannya sewaktu waktu dapat berubah dengan mempertimbangkan kondisi alam,

mengingat secara geografis Provinsi Maluku Utara terdiri beberapa kepulauan sehingga faktor alam bisa menjadi kendala atau penghambat pemenuhan target kinerja yang telah disusun pelaksanaannya. Pada TW II kantor wilayah tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan target kinerja, dengan didukung SDM yang memadai juga didukung dengan faktor alam yakni cuaca yang mendukung dalam pelaksanaan target kinerja pada TW II.

Dari beberapa faktor diatas kantor wilayah tetap berupaya untuk dapat melaksanakan target kinerja yang telah ditentukan dengan, melaksanakan kegiatan yang sudah di rencanakan baik secara luring maupun daring melihat situasi dan kondisi khususnya apabila pelaksanaan kegiatan yang harus kerkoordinasi dengan pemerintah daerah apabila terkendala dengan faktor alam (cuaca) dapat dilaksanakan secara daring atau virtual. Dengan tidak mengurangi manfaat yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah Kerja Provinsi Maluku Utara.

E. Penutup

Capaian Perjanjian Kinerja dan Capaian Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada Triwulan II B06 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan Matriks Target Kinerja. Pelaksanaan Target Kinerja pada masing masing satuan kerja juga telah sesuai. Mulai dari tahapan kegiatan sampai dengan output / data dukung yang dihasilkan. Secara keseluruhan tim evaluasi capaian target kinerja pada TW II di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tidak menemukan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pemenuhan Target kinerja B06. Semuanya berjalan sesuai Disbursement Plan dan Rencana Kerja Tahun 2022 (Renja) yang telah disusun pada awal tahun 2022. Untuk pelaporan pada Triwulan ke II B06 Kantor wilayah dan jajaran tetap berkomitmen dapat melaksanakan Target Kinerja dan memaksimalkan penyerapan anggaran sehingga Kinerja Kantor Wilayah Maluku Utara berkontribusi yang positif dalam pelaksanaan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Demikian Laporan Evaluasi Capaian Target Kinerja Triwulan II B06 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Kepala kantor Wilayah dan Menteri

Ternate, 4 Juni 2022
Kepala Divisi Administrasi



Andi Basmal
NIP. 197202151992031002

LAMPIRAN DOKUMENTASI RAPAT MONITORING DAN HASIL EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA TRIWULAN II (B06)







LAPORAN MONITORING DAN HASIL EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN CAPAIAN TARGET KINERJA TRIWULAN III (B09)



**REFORMASI
HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**





**LAPORAN MONITORING DAN HASIL EVALUASI PERJANJIAN
KINERJA DAN TARGET KINERJA TRIWULAN III (B09)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA TAHUN 2022**

A. Pendahuluan

1. Umum

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Selain perjanjian kinerja salah satu strategi untuk peningkatan kinerja secara terstruktur dan berjenjang adalah dengan melaksanakan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.HH- 1.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022. Target kinerja dilaksanakan dengan merujuk kepada target-target yang harus diselesaikan Kementerian Hukum dan HAM sepanjang tahun 2022 yang termaktub dalam RPJMN, Renstra dan RKP Tahun 2022. Target Kinerja ini juga merupakan hasil kolaborasi pemikiran dari para Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri bersamaan seluruh Pimpinan Unit Eselon I. Kantor Wilayah pada tahun 2022 memiliki 39 target kinerja dan total anggaran sebesar Rp.98.467.785.000.- (Sembilan puluh delapan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pelaksanaan kinerja anggaran dibuat berdasarkan perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga, juga sebagai penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana kerja kementerian/lembaga dalam satu tahun anggaran Dibagi menjadi 4 (empat) triwulan B03, B06, B09 dan B12

dengan target penyerapan di masing masing triwulan sesuai dengan surat Sekertariat Jenderal Nomor : SEK.PR.01.04-68 tentang Penyampaian Pagu Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM TA 2022. Dengan target Disbursement Plan Rencana Penarikan dana setiap Triwulan adalah TW I : 25% , TW II : 50% , TW III : 75% dan TW IV : 100% dengan berdasarkan ketentuan tersebut diatas Kementerian Hukum dan HAM telah mencapai target pada TW III (B09) sebesar Rp. 71.626.547.518,- dengan persentase 72,81 % dari target 75% yang telah ditargetkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan ada beberapa satuan kerja belum maksimal dalam realisasi, sehingga ada beberapa satuan kerja yang tidak mencapai target 75%. Namun demikian target kinerja pada pelaporan TW III B09, satuan kerja sudah menyampaikan pelaporan pada aplikasi Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM dengan penyampaian pelaporan 100%.

Berdasarkan latar belakang diatas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara pada setiap triwulan akan melaksanakan Monitoring dan Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja untuk memenuhi data dukung berbagai program kegiatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diantaranya Data Dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi, Data Dukung Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai di Kantor Wilayah Maluku Utara.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari pelaksanaan Monitoring dan Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja adalah untuk mengetahui sejauh mana capaian Perjanjian Kinerja dan Capaian Target Kinerja sampai dengan Triwulan III B09 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara serta melakukan evaluasi terhadap capaian kegiatan tersebut.

3. Ruang Lingkup

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Serta Target Kinerja merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga, juga sebagai penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana kerja kementerian/lembaga dalam satu tahun anggaran.

Ruang lingkup kegiatan ini adalah seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan HAM baik di tingkat pusat maupun daerah dan pada khusus pada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

4. Dasar

- a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-1.PR.01,03 Tahun 2022 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- c. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-OT.03-005 Tanggal 4 Januari 2022 Perihal Pedoman Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja, dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2022;
- d. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-OT.03-006 Tanggal 4 Januari 2022 Perihal Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja, dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2022;
- e. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-OT.03-73 Tanggal 11 Januari 2022 Perihal Penyampaian Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022;
- f. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-OT.03-151 Tanggal 7 Maret 2022 Perihal Penyampaian Rencana Kerja WBK/WBBM Tahun 2022.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan pada Pelaksanaan Monitoring dan Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja yaitu dengan hasil yang dilaporkan pada triwulan III B09 adalah telah dilaksanakan oleh para Pejabat Tinggi Pratama baik Kepala Kantor Wilayah maupun para Kepala Divisi diantaranya, pada tanggal 13 September 2022 dengan mengadakan evaluasi capaian pelaksanaan anggaran antara Pimpinan Tinggi Pratama dengan Kepala Kantor Wilayah serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Masyarakat dan Imigrasi dengan Kepala Kantor Wilayah serta melaksanakan evaluasi terhadap capaian laporan perjanjian kinerja melalui E-Performance serta laporan Target Kinerja pada Triwulan III B09.

C. Hasil yang dicapai

Capaian Perjanjian Kinerja Telah dituangkan kedalam laporan Perjanjian dan Realisasi Kinerja atau melalui aplikasi E-Performance telah dilaksanakan dan dilaporkan sesuai dengan Target yang telah ditentukan dan telah dievaluasi Kantor Wilayah Maluku Utara melakukan rapat evaluasi capaian target kinerja berdasarkan data yang ada pada aplikasi E-Performance Kemenkumham dengan rincian data sebagai berikut:

1. Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien pada Triwulan III B09 Terealisasi sebesar **100%**;
2. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah pada Triwulan III B09 Terealisasi sebesar **100%**;
3. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar pada Triwulan III B09 Terealisasi sebesar **100%**;
4. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi pada Triwulan III B09 Terealisasi sebesar **100%**;
5. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar pada Triwulan III B09 Terealisasi sebesar **100%**;
6. Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar pada Triwulan III B09 Terealisasi sebesar **100%**;
7. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar pada Triwulan III B09 Terealisasi sebesar **100%**;
8. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban pada Triwulan III B09 Terealisasi sebesar **100%**;
9. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar pada Triwulan III B09 Terealisasi sebesar **100%**;
10. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah pada Triwulan III B09 Terealisasi sebesar **100%**;
11. Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum pada Triwulan III B09 Terealisasi sebesar **100%**;
12. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD pada Triwulan III B09 Terealisasi sebesar **100%**;
13. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada Triwulan III B09 Terealisasi sebesar **100%**;
14. Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM yang Handal pada Triwulan III B09 Terealisasi sebesar **100%**;

15. Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia pada Triwulan III B09 Terealisasi sebesar **100%**;
16. Terefasilitasinya rancangan produk hukum di daerah pada Triwulan III B09 Terealisasi sebesar **100%**;
17. Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah pada Triwulan III B09 Terealisasi sebesar **100%**;
18. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM pada Triwulan III B09 Terealisasi sebesar **100%**;
19. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah pada Triwulan III B09 Terealisasi sebesar **100%**;

E-PERFORMANCE SISTEM AKUN

https://e-performance.kemkumham.go.id/main.php?mod=kinerja&ed_tahun=2022&ed_unit_kerja=51

Home Dashboard BSC Data Master Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

E-PERFORMANCE
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN: 2022

UNIT KERJA: KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA

Tampilkan Tambah

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN : 2022
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA

| NO | SASARAN STRATEGIS | NO | INDIKATOR KINERJA | CASCADING | | TARGET | | | | REALISASI | | CATATAN MONITORING | BSC | | | |
|----|---|----|-------------------|---|-------|--------------------|-------------------------|--------|------------|-----------|----------|--------------------|--|----------|---|---|
| | | | | KELUAR | MASUK | WAKTU PENYELESAIAN | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH (%) | URAIAN | LAMPIRAN | | BOBOT | SCORE(%) | | |
| 1. | Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien | 1 | 1 | Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah | | | 3.1 Indeks: Triwulan IV | TW1 | 3.1 | Indeks | 3.1 | 100 | Januari : Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien Februari: Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien Maret: Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien | | 0 | 0 |
| | | | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | | | TW2 | 3.1 | Indeks | 3.1 | 100 | April : Mei: Juni: Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien | | | |
| | | | | | | | | TW3 | 3.1 | Indeks | 3.1 | 100 | Juli : Agustus: September: Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien | | | |
| | | | | | | | | TW4 | 3.1 | Indeks | 0 | | Oktober: November: Desember: | | | |
| 2. | Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah | 2 | 1 | Indeks penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah | | | 81 Persen: Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari : Februari: Indeks penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah | | 0 | 0 |
| | | | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April : Mei: Juni: Indeks penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah | | | |
| | | | | | | | | TW3 | 60 | Persen | 60 | 100 | Juli : Agustus: September: Indeks penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah | | | |
| | | | | | | | | TW4 | 81 | Persen | 0 | | Oktober: November: Desember: | | | |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | 3 | 1 | Persentase menurunnya tahanan yang overstaying | | | 80 Persen: Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari : Februari: Maret: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------|---|------------------------|--|--|--|--|-----|----|--------|----|-----|--|--|---|---|
| | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April: Mei: Juni: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | | | |
| | | | | | | | | | TW3 | 60 | Persen | 60 | 100 | Juli: Agustus: September: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | | | |
| | | | | | | | | | TW4 | 80 | Persen | 0 | | Oktober: November: Desember: | | | |
| | 3 | 2 | Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum     | 80 Persen: Trivulan IV | | | | | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari: Februari: Maret: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | | 0 | 0 |
| | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April: Mei: Juni: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | | | |
| | | | | | | | | | TW3 | 60 | Persen | 60 | 100 | Juli: Agustus: September: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | | | |
| | | | | | | | | | TW4 | 80 | Persen | 0 | | Oktober: November: Desember: | | | |
| | 3 | 3 | Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum     | 80 Persen: Trivulan IV | | | | | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari: Februari: Maret: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | | 0 | 0 |
| | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April: Mei: Juni: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | | | |
| | | | | | | | | | TW3 | 60 | Persen | 60 | 100 | Juli: Agustus: September: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | | | |
| | | | | | | | | | TW4 | 80 | Persen | 0 | | Oktober: November: Desember: | | | |
| 4. | | | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi  | 65 Persen: Trivulan IV | | | | | TW1 | 10 | Persen | 10 | 100 | Januari: Februari: Maret: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | | 0 | 0 |
| | 4 | 1 | Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian     | | | | | | TW2 | 30 | Persen | 30 | 100 | April: Mei: Juni: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | | | |
| | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | | | | | | TW3 | 50 | Persen | 50 | 100 | Juli: Agustus: September: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | | | |
| | | | | | | | | | TW4 | 65 | Persen | 0 | | Oktober: November: Desember: | | | |
| | 4 | 2 | persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi     | 98 Persen: Trivulan IV | | | | | TW1 | 25 | Persen | 25 | 100 | Januari: Februari: Maret: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | TW2 | 50 | Persen | 50 | 100 | April: Mei: Juni: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | | | |
| | | | | | | | | | TW3 | 75 | Persen | 75 | 100 | Juli: Agustus: September: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | | | |
| | | | | | | | | | TW4 | 98 | Persen | 0 | | Oktober: November: Desember: | | | |
| | 4 | 3 | persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi     | 80 Persen: Trivulan IV | | | | | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari: Februari: Maret: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | | 0 | 0 |
| | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April: Mei: Juni: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | | | |
| | | | | | | | | | TW3 | 60 | Persen | 60 | 100 | Juli: Agustus: September: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|------------------------|-----|----|--------|----|-----|--|--|--|---|---|
| | 7 | 3 | <p>Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengantunan sesuai standar</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai:</p> | 80 Persen; Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | <p>Januari:</p> <p>Februari:</p> <p>Maret: Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengantunan Anak di wilayah sesuai standar</p> | | | 0 | 0 |
| | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | <p>April:</p> <p>Mei:</p> <p>Juni: Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengantunan Anak di wilayah sesuai standar</p> | | | | |
| | | | | | TW3 | 60 | Persen | 60 | 100 | <p>Juli:</p> <p>Agustus:</p> <p>September: Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengantunan Anak di wilayah sesuai standar</p> | | | | |
| | | | | | TW4 | 80 | Persen | 0 | | <p>Oktober:</p> <p>November:</p> <p>Desember:</p> | | | | |
| | 7 | 4 | <p>Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai:</p> | 80 Persen; Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | <p>Januari:</p> <p>Februari:</p> <p>Maret: Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengantunan Anak di wilayah sesuai standar</p> | | | 0 | 0 |
| | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | <p>April:</p> <p>Mei:</p> <p>Juni: Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengantunan Anak di wilayah sesuai standar</p> | | | | |
| | | | | | TW3 | 60 | Persen | 60 | 100 | <p>Juli:</p> <p>Agustus:</p> <p>September: Meningkatnya</p> | | | | |
| 8. | 8 | 1 | <p>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakan di Bidang Keamanan dan Ketertiban</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai:</p> | 80 Persen; Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | <p>Januari:</p> <p>Februari:</p> <p>Maret: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakan di Bidang Keamanan dan Ketertiban</p> | | | 0 | 0 |
| | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | <p>April:</p> <p>Mei:</p> <p>Juni: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakan di Bidang Keamanan dan Ketertiban</p> | | | | |
| | | | | | TW3 | 60 | Persen | 60 | 100 | <p>Juli:</p> <p>Agustus:</p> <p>September: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakan di Bidang Keamanan dan Ketertiban</p> | | | | |
| | | | | | TW4 | 80 | Persen | 0 | | <p>Oktober:</p> <p>November:</p> <p>Desember:</p> | | | | |
| | 8 | 2 | <p>Persentase pencegahan gangguan kambuh</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai:</p> | 70 Persen; Triwulan IV | TW1 | 10 | Persen | 10 | 100 | <p>Januari:</p> <p>Februari:</p> <p>Maret: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakan di Bidang Keamanan dan Ketertiban</p> | | | 0 | 0 |
| | | | | | TW2 | 30 | Persen | 30 | 100 | <p>April:</p> <p>Mei:</p> <p>Juni: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakan di Bidang Keamanan dan Ketertiban</p> | | | | |
| | | | | | TW3 | 50 | Persen | 50 | 100 | <p>Juli:</p> <p>Agustus:</p> | | | | |
| | 8 | 2 | <p>Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Karapidana/Anak Pelaku gangguan Kambuh</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai:</p> | 80 Persen; Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | <p>Januari:</p> <p>Februari:</p> <p>Maret: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakan di Bidang Keamanan dan Ketertiban</p> | | | 0 | 0 |
| | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | <p>April:</p> <p>Mei:</p> <p>Juni: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakan di Bidang Keamanan dan Ketertiban</p> | | | | |
| | | | | | TW3 | 60 | Persen | 60 | 100 | <p>Juli:</p> <p>Agustus:</p> <p>September: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakan di Bidang Keamanan dan Ketertiban</p> | | | | |
| | | | | | TW4 | 80 | Persen | 0 | | <p>Oktober:</p> <p>November:</p> <p>Desember:</p> | | | | |
| | 8 | 4 | <p>Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kambuh secara tuntas</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai:</p> | 70 Persen; Triwulan IV | TW1 | 10 | Persen | 10 | 100 | <p>Januari:</p> <p>Februari:</p> <p>Maret: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakan di Bidang Keamanan dan Ketertiban</p> | | | 0 | 0 |
| | | | | | TW2 | 30 | Persen | 30 | 100 | <p>April:</p> <p>Mei:</p> <p>Juni: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakan di Bidang Keamanan dan Ketertiban</p> | | | | |
| | | | | | TW3 | 50 | Persen | 50 | 100 | <p>Juli:</p> <p>Agustus:</p> <p>September: Meningkatnya</p> | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|---|---|-------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|--|--|--|---|---|
| 9. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 9 | 1 | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 80 Persen: Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari : Februari : Maret :Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | | 0 | 0 |
| | | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April : Mei : Juni :Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | | | |
| | | | | | | TW3 | 60 | Persen | 60 | 100 | Juli : Agustus : September :Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | | | |
| | | | | | | TW4 | 80 | Persen | 0 | | Oktober : November : Desember : | | | | |
| | | 9 | 2 | Persentase gangguan kambo yang dapat dicegah | 70 Persen: Triwulan IV | TW1 | 10 | Persen | 10 | 100 | Januari : Februari : Maret :Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | | 0 | 0 |
| | | | | | | TW2 | 30 | Persen | 30 | 100 | April : Mei : Juni :Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | | | |
| | | | | | | TW3 | 50 | Persen | 50 | 100 | Juli : Agustus : September :Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | | | |
| | | | | | | TW4 | 70 | Persen | 0 | | Oktober : November : Desember : | | | | |
| | | 9 | 3 | Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak peka/gangguan kambo | 80 Persen: Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari : Februari : Maret :Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | | 0 | 0 |
| | | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April : Mei : Juni :Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | | | |
| | | | | | | TW3 | 60 | Persen | 60 | 100 | Juli : Agustus : September :Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | | | |
| | | | | | | TW4 | 80 | Persen | 0 | | Oktober : November : Desember : | | | | |
| | | 9 | 4 | Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kambo secara tuntas | 70 Persen: Triwulan IV | TW1 | 10 | Persen | 10 | 100 | Januari : Februari : Maret :Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | | 0 | 0 |
| | | | | | | TW2 | 30 | Persen | 30 | 100 | April : Mei : Juni :Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | | | |
| | | | | | | TW3 | 60 | Persen | 60 | 100 | Juli : Agustus : September :Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | | | |
| | | | | | | TW4 | 70 | Persen | 0 | | Oktober : November : Desember : | | | | |
| 10. | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | 10 | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah | 3,2 Indeks: Triwulan IV | TW1 | 3,2 | Indeks | 3,2 | 100 | Januari : Februari : Maret :Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | | | 0 | 0 |
| | | | | | | TW2 | 3,2 | Indeks | 3,2 | 100 | April : Mei : Juni :Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | | | | |
| | | | | | | TW3 | 3,2 | Indeks | 3,2 | 100 | Juli : Agustus : September :Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | | | | |
| | | | | | | TW4 | 3,2 | Indeks | 0 | | Oktober : November : Desember : | | | | |
| | | 10 | 2 | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah | 3 Indeks: Triwulan IV | TW1 | 3 | Indeks | 3 | 100 | Januari : Februari : Maret :Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | | | 0 | 0 |
| | | | | | | TW2 | 3 | Indeks | 3 | 100 | April : Mei : Juni :Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | | | | |
| | | | | | | TW3 | 3 | Indeks | 3 | 100 | Juli : Agustus : September :Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | | | | |
| | | | | | | TW4 | 3 | Indeks | 0 | | Oktober : November : Desember : | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|---|------------------------------------|-----|-------|---------------------|----|-----|--|---|--|
| | 19 | 2 | Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan  | 80 Persen; Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari; Februari; Maret: Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | 0 | 0 |
| | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April; Mei; Juni: Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | | |
| | | | | | TW3 | 60 | Persen | 60 | 100 | Juli; Agustus; September: Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | | |
| | | | | | TW4 | 80 | Persen | 0 | | Oktober; November; Desember | | |
| | 19 | 3 | Indeks kepuasan layanan bantuan hukum  | 76.61 Persen; Triwulan IV | TW1 | 10 | Persen | 10 | 100 | Januari; Februari; Maret: Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | 0 | 0 |
| | | | | | TW2 | 30 | Persen | 30 | 100 | April; Mei; Juni: Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | | |
| | | | | | TW3 | 50 | Persen | 50 | 100 | Juli; Agustus; September: Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | | |
| | | | | | TW4 | 76.61 | Persen | 0 | | Oktober; November; Desember | | |
| | 19 | 4 | Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah  | 70 Persen; Triwulan IV | TW1 | 10 | Persen | 10 | 100 | Januari; Februari; Maret: Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | 0 | 0 |
| | | | | | TW2 | 30 | Persen | 30 | 100 | April; Mei; Juni: Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | | |
| | | | | | TW3 | 50 | Persen | 50 | 100 | Juli; Agustus; September: Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | | |
| | | | | | TW4 | 70 | Persen | 0 | | Oktober; November; Desember | | |
| | 19 | 5 | Persentase website anggota DJHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi DJHN  | 20 Persen; Triwulan IV | TW1 | 0 | Persen | 0 | | Januari; Februari; Maret | 0 | 0 |
| | | | | | TW2 | 10 | Persen | 10 | 100 | April; Mei; Juni: Persentase website anggota DJHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi DJHN | | |
| | | | | | TW3 | 0 | Persen | 0 | | Juli; Agustus; September | | |
| | | | | | TW4 | 20 | Persen | 0 | | Oktober; November; Desember | | |
| 20. | | 1 | Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM  | 3 Instansi Pemerintah; Triwulan IV | TW1 | 0 | Instansi Pemerintah | | | | 0 | 0 |
| | | | | | TW2 | 0 | Instansi Pemerintah | | | | | |
| | | | | | TW3 | 0 | Instansi Pemerintah | | | | | |
| | | | | | TW4 | 3 | Instansi Pemerintah | | | | | |
| | 20 | 2 | Jumlah kab/kota peduli HAM  | 1 Instansi Pemerintah; Triwulan IV | TW1 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | TW2 | 0 | | | | | | |
| | | | | | TW3 | 0 | | | | | | |
| | | | | | TW4 | 1 | Instansi Pemerintah | | | | | |
| | 20 | 3 | Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM  | 2 Instansi Pemerintah; Triwulan IV | TW1 | 0 | Instansi Pemerintah | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | TW2 | 1 | Instansi Pemerintah | 1 | 100 | | | Januari; Februari; Maret; April; Mei; Juni: Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan |

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Achievement | Realisasi | Perencanaan | Realisasi | Perencanaan | Realisasi | Perencanaan |
|----|---|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 21 | Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Capaian Target Kinerja Triwulan III (B09)

Merujuk Surat Sekertariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.PR.01.03 21 tanggal 18 Februari 2022 Perihal : Penyampaian Target Kinerja. Kepala Kantor Wilayah mengeluarkan Nota Dinas Nomor: W. 29.PR.05.04-1311 Perihal : Laporan Target Kinerja Bulan ke 9 (Sembilan) B09. Progres pelaksanaan target kinerja B07, B08 dan B09 pada website www.kinerja.kemenkumham.go.id dengan capaian target kinerja sebagai berikut:

- **Divisi Administrasi** telah melaksanakan 100% target kinerja di B07 s/d B09 dan telah melakukan upload data ke website tarja.
- **Divisi Pelayanan Hukum dan HAM** telah melaksanakan 100% target kinerja di B07 s/d B09 dan telah melakukan upload data ke website tarja.
- **Divisi Pemasyarakatan** telah melaksanakan 100% target kinerja di B07 s/d B09 dan telah melakukan upload data ke website tarja.
- **Divisi Keimigrasian** telah melaksanakan 100% target kinerja di B08 dan telah melakukan upload data ke website tarja. Mengingat Target kinerja Divisi Keimigrasian dilaporkan pada B08 mengikuti dengan target kinerja yang telah ditentukan oleh Eselon I Keimigrasian.

Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM di lingkungan Kantor Wilayah Maluku Utara pada TW III B07, B08 dan B09 telah dilaksanakan dan dilaporkan sesuai dengan Target Kinerja yang telah disusun oleh Kementerian. Tim Evaluasi Kantor Wilayah Maluku Utara melakukan rapat evaluasi capaian target kinerja berdasarkan data dukung yang telah di laporkan melalui aplikasi Target Kinerja Kemenkumham dengan rincian data sebagai

berikut:

➤ **Divisi Administrasi**

**SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI ADMINISTRASI**

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|-----------------------------------|--|--|------------------------------|----------------|
| KEPALA DIVISI ADMINISTRASI | | | | |
| 1 | Peningkatan kapasitas SDM Wilayah melalui implementasi Corporate University | | | |
| | B07 | - | - | - |
| | B08 | - | - | - |
| | B09 | Pelaksanaan workshop /sosialisasi/ bimtek terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Subbag Kepegaw dan Humas RB | SUDAH DIUPLOAD |
| 2 | Tersusunnya Best practice di Kantor Wilayah | | | |
| | B07 | - | - | - |
| | B08 | - | - | - |
| | B09 | - | - | - |
| 3 | Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Inspektorat Jenderal) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | | | |
| | B07 | Monitoring dan percepatan TLHP BPK dan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal | Subbag Program dan Pelaporan | SUDAH DIUPLOAD |
| | B08 | Monitoring dan percepatan TLHP BPK dan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal | Subbag Program dan Pelaporan | SUDAH DIUPLOAD |
| | B09 | Pelaksanaan percepatan TLHP BPK dan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal | Subbag Program dan Pelaporan | SUDAH DIUPLOAD |
| 4 | Penetapan status penggunaan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 80% | | | |
| | B07 | Melakukan pembaharuan data Penetapan Status Penggunaan BMN pada aplikasi SIMAN | Subbag Keu dan BMN | SUDAH DIUPLOAD |
| | B08 | - | - | - |
| | B09 | - | - | - |
| 5 | Nilai Pengawasan Kearsipan Pengelolaan Arsip Dinamis 70 | | | |
| | B07 | Pelaksanaan Pengawasan Lapangan Pengelolaan Kearsipan dinamis (Arsip Aktif dan Inaktif) pada Unit Pelaksana Teknis | Subbag Kepegawaian | SUDAH DIUPLOAD |
| | B08 | - | - | - |
| | B09 | - | - | - |
| 6 | Penerapan Protokol Kesehatan di Perkantoran dimasa Adaptasi Kebiasaan Baru, 0 orang terpapar covid | | | |
| | B07 | - | - | - |
| | B08 | - | - | - |
| | B09 | Monitoring status covid pegawai dan WBP serta Penanganan Pegawai dan WBP yang terpapar covid triwulan III | Subbag Kepegawaian | SUDAH DIUPLOAD |
| 7 | Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA dan SMART) Kantor Wilayah, 95 | | | |
| | B07 | Evaluasi nilai IKPA dan SMART Kantor Wilayah dan UPT Triwulan II | Subbag Keu dan BMN | SUDAH DIUPLOAD |

**SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI ADMINISTRASI**

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|-----------|---|---|------------------------------|----------------|
| | B08 | - | - | - |
| | B09 | - | - | - |
| 8 | Penyelesaian Pengaduan pada Aplikasi LAPOR | | | |
| | B07 | Penyelesaian pengaduan pada aplikasi LAPOR! Tahun 2022 | Subbag Humas RB, TI | SUDAH DIUPLOAD |
| | B08 | Penyelesaian pengaduan pada aplikasi LAPOR! Tahun 2022 | Subbag Humas RB, TI | SUDAH DIUPLOAD |
| | B09 | Penyelesaian pengaduan pada aplikasi LAPOR! Tahun 2022 | Subbag Humas RB, TI | SUDAH DIUPLOAD |
| 9 | Pembinaan untuk Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | | | |
| | B07 | 1. Penyampaian Laporan SPIP kepada Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal 2. Penyusunan SK TIM SPIP dan SK Tim Assesor Penilaian Mandiri SPIP | Subbag Humas RB, TI | SUDAH DIUPLOAD |
| | B08 | Pelaksanaan Penilaian Mandiri oleh Tim Assesor | Subbag Humas RB, TI | SUDAH DIUPLOAD |
| | B09 | Evaluasi Pelaksanaan SPIP Semester I | Subbag Humas RB, TI | SUDAH DIUPLOAD |
| 10 | Pelaksanaan Manajemen Risiko | | | |
| | B07 | - | - | - |
| | B08 | - | - | - |
| | B09 | Pelaksanaan Pengendalian Risiko Triwulan III | Subbag Humas RB, TI | SUDAH DIUPLOAD |
| 11 | Tersusunnya LKIP Kantor Wilayah dan pelaporan e-performance tepat waktu | | | |
| | B07 | 1. Evaluasi capaian PK Kantor Wilayah dan UPT; 2. Pelaporan capaian Perjanjian Kinerja pada aplikasi e-performance | Subbag Program dan Pelaporan | SUDAH DIUPLOAD |
| | B08 | Pelaporan capaian Perjanjian Kinerja pada aplikasi e-performance | Subbag Program dan Pelaporan | SUDAH DIUPLOAD |
| | B09 | Pelaporan capaian Perjanjian Kinerja pada aplikasi e-performance | Subbag Program dan Pelaporan | SUDAH DIUPLOAD |

➤ **Divisi Pelayanan Hukum dan HAM**

**SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|--|---|--|----------------------|-----------------|
| KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM | | | | |
| 1 | 80% Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | | |
| | B07 | Terfasilitasinya rancangan peraturan daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah | Bidang Hukum | Sudah Di Upload |
| | B08 | Terfasilitasinya rancangan peraturan daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah | Bidang Hukum | Sudah Di Upload |
| | B09 | Terfasilitasinya rancangan peraturan daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah | Bidang Hukum | Sudah Di Upload |
| 2 | 40 % Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia | | | |
| | B07 | Evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM B04 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota | Bidang HAM | Sudah Di Upload |
| | B08 | Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B08 | Bidang HAM | Sudah Di Upload |
| | B09 | Pemantauan pelaporan Aksi HAM Daerah periode B08 | Bidang HAM | Sudah Di Upload |
| 3 | 70% Desa/Kelurahan sadar hukum | | | |
| | B07 | Melakukan pembentukan dan pembinaan Kelompok KADARKUM di masing-masing wilayah | Bidang Hukum | Sudah Di Upload |
| | B08 | Implementasi kuesioner indeks desa/kelurahan sadar hukum dalam Dimensi Akses Informasi Hukum dan Penyusunan SK Kelompok Kadarkum yang ditandatangani oleh Camat/Lurah/Kepala Desa | Bidang Hukum | Sudah Di Upload |
| | B09 | Melakukan pembentukan dan pembinaan Desa/kelurahan binaan di masing-masing wilayah | Bidang Hukum | Sudah Di Upload |
| 4 | Tersedianya rekomendasi hasil kajian/analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah | | | |
| | B07 | 1. Analisis data hasil survei online 3AS Triwulan II (April-Juni) 2. Data monitoring hasil Survei online IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Juli | Bidang HAM | Sudah Di Upload |
| | B08 | Data monitoring hasil Survei online IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Agustus | Bidang HAM | Sudah Di Upload |
| | B09 | 1. Data monitoring hasil Survei online IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan September 2. Evaluasi atas implementasi model intervensi | Bidang HAM | Sudah Di Upload |
| 5 | Tersedianya rekomendasi hasil analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM guna mendukung pembuatan kebijakan di wilayah | | | |
| | B07 | Penyusunan inventarisasi dan identifikasi data pelayanan publik/permasalahan Hukum/permasalahan HAM sesuai aplikasi SIPKUMHAM | Bidang HAM | Sudah Di Upload |
| | B08 | 1. Pelaksanaan verifikasi pengumpulan data lapangan | Bidang HAM | Sudah Di Upload |

**SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|----------|---|---|-------------------------------|------------------------|
| | | 2. Pengolahan dan analisis data hasil verifikasi lapangan 3. Penyusunan draf laporan analisis kebijakan yang berisi rekomendasi | | |
| | B09 | 1. Pembahasan draf laporan analisis kebijakan dengan melibatkan stakeholders 2. Penyempurnaan laporan analisis kebijakan yang berisi rekomendasi 3. Penginputan laporan analisis kebijakan pada aplikasi SIPKUMHAM 4. Penyampaian Laporan analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM kepada Kepala Kantor Wilayah | Bidang HAM | Sudah Di Upload |
| 6 | Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM | | | |
| | B07 | Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengisian formulir indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM | Bidang HAM | Sudah Di Upload |
| | B08 | Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengisian formulir indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM | Bidang HAM | Sudah Di Upload |
| | B09 | Penginputan data indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM | Bidang HAM | Sudah Di Upload |
| 7 | Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM | | | |
| | B07 | Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Semester I | Bidang HAM | Sudah Di Upload |
| | B08 | Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Semester I | Bidang HAM | Sudah Di Upload |
| | B09 | Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Semester I | Bidang HAM | Sudah Di Upload |
| 8 | Tercapainya pelaksanaan Pengawas Wilayah dan Daerah terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah | | | |
| | B07 | Pengawasan penerapan PMPJ oleh Tim Audit Pengawas Kepatuhan kepada Notaris di Wilayah Periode II (Juli hingga September 2022) | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Di Upload |
| | B08 | Pengawasan penerapan PMPJ oleh Tim Audit Pengawas Kepatuhan kepada Notaris di Wilayah Periode II (Juli hingga September 2022) | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Di Upload |
| | B09 | Pengawasan penerapan PMPJ oleh Tim Audit Pengawas Kepatuhan kepada Notaris di Wilayah Periode II (Juli hingga September 2022) | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Di Upload |
| 9 | Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi layanan AHU di wilayah, (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Partai Politik, Perseroan Perorangan dan Apostille) | | | |
| | B07 | Diseminasi layanan Kewarganegaraan & Pewarganegaraan | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Di Upload |
| | B08 | Diseminasi layanan Partai Politik | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Di Upload |
| | B09 | Diseminasi layanan Partai Politik | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Di Upload |

**SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|----|--|--|------------------------|-----------------|
| 10 | Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran 50% data PPNS melalui aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham | | | |
| | B07 | Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Di Upload |
| | B08 | Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Di Upload |
| | B09 | Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Di Upload |
| 11 | Terlaksananya kegiatan-kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas permohonan bersama dengan stakeholder di wilayah | | | |
| | B07 | Persiapan pelaksanaan Implementasi MoU/PKS atau penandatanganan MoU/PKS baru semester II | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Di Upload |
| | B08 | Pelaksanaan edukasi / Sosialisasi / Diseminasi / Webinar dll terkait dengan Tahun Cipta dan POP HC dikaitkan dengan tema IP Youth kepada stakeholder (akademisi, mahasiswa, siswa/siswi sekolah, penggiat seni, dll) | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Di Upload |
| | B09 | Implementasi kerjasama dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas permohonan bersama dengan stakeholder di wilayah | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Di Upload |
| 12 | Peningkatan permohonan Indikasi Geografis melalui kerjasama dengan MPIG/Pemerintah Daerah/stakeholder terkait | | | |
| | B07 | - Pelaksanaan penyusunan dokumen deskripsi IG (permohonan IG); - Koordinasi dengan Subdit IG/ Tim ahli IG terkait progres kelengkapan pengajuan permohonan | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Di Upload |
| | B08 | - | - | |
| | B09 | Pelaksanaan penyusunan dokumen deskripsi IG (kelengkapan permohonan IG) | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Di Upload |
| 13 | Mendorong pertumbuhan HKI di wilayah melalui pembangunan IP Clinic atau Mobile IP Clinic | | | |
| | B07 | - Pelaksanaan layanan HKI oleh tim IP Clinic atau MIC; - Pelaksanaan edukasi/Sosialisasi/Diseminasi HKI kepada Masyarakat dengan narasumber TIM MIC (kegiatan diselenggarakan Kanwil/Pemda) | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Di Upload |
| | B08 | - Pelaksanaan layanan HKI oleh tim IP Clinic atau MIC; - Pelaksanaan edukasi/Sosialisasi/Diseminasi HKI kepada Masyarakat dengan narasumber TIM MIC (kegiatan diselenggarakan Kanwil/Pemda) | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Di Upload |
| | B09 | - Pelaksanaan layanan HKI oleh tim IP Clinic atau MIC; - Pelaksanaan edukasi/Sosialisasi/Diseminasi HKI kepada Masyarakat dengan narasumber TIM MIC (kegiatan diselenggarakan Kanwil/Pemda) | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Di Upload |
| 14 | Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual | | | |
| | B07 | - Pelaksanaan penyebaran Kuesioner terkait sertifikasi pusat perbelanja; - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Di Upload |

**SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|-----------|-----------------------|---|-------------------------------|------------------------|
| | B08 | - Pelaksanaan penyebaran Kuesioner terkait sertifikasi pusat perbelanja; - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Di Upload |
| | B09 | - Pelaksanaan penyebaran Kuesioner terkait sertifikasi pusat perbelanja; - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Di Upload |

➤ **Divisi Pemasyarakatan**

**SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI PEMASYARAKATAN**

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|-------------------------------------|---|---|----------------------|------------------------|
| KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN | | | | |
| 1 | Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar, dengan terlaksananya deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas, Rutan dan LPKA | | | |
| | B07 | Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan membuat laporan kegiatan intel | Div PAS | Sudah Di Upload |
| | B08 | Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan membuat laporan kegiatan intel | Div PAS | Sudah Di Upload |
| | B09 | 1. Lapas, Rutan dan LPKA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan hasil Identifikasi Instrument deteksi Dini B06 2. Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan membuat laporan kegiatan intelijen | Div PAS | Sudah Di Upload |
| 2 | Seluruh Lapas, Rutan dan LPKA melaksanakan input data pada SDP Fitur Keamanan | | | |
| | B07 | Sebanyak 90% Lapas, Rutan dan LPKA telah melaksanakan input data keamanan pada SDP fitur keamanan | Div PAS | Sudah Di Upload |
| | B08 | Sebanyak 90% Lapas, Rutan dan LPKA telah melaksanakan input data keamanan pada SDP fitur keamanan | Div PAS | Sudah Di Upload |
| | B09 | Sebanyak 100% Lapas, Rutan dan LPKA telah melaksanakan input data keamanan pada SDP fitur keamanan | Div PAS | Sudah Di Upload |
| 3 | Redistribusi pada UPT dengan tingkat overcrowding diatas 300% | | | |
| | B07 | Pelaksanaan Redistribusi Narapidana dari Lapas over crowding di atas 300 % ke Lapas yang tidak over crowding di dalam atau luar wilayah | Div PAS | Sudah Di Upload |
| | B08 | Pelaksanaan Redistribusi Narapidana dari Lapas over crowding di atas 300 % ke Lapas yang tidak over crowding di dalam atau luar wilayah | Div PAS | Sudah Di Upload |
| | B09 | Pelaksanaan Redistribusi Narapidana dari Lapas over crowding di atas 300 % ke Lapas yang tidak over crowding di dalam atau luar wilayah | Div PAS | Sudah Di Upload |
| 4 | Penerapan SPPT-TI pada 213 UPT Lapas/Rutan/Bapas Pilot Project | | | |
| | B07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan/Download Data SPPT TI oleh UPT Pemasyarakatan melalui Aplikasi SDP | Div PAS | Sudah Di Upload |
| | B08 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan/Download Data SPPT TI oleh UPT Pemasyarakatan melalui Aplikasi SDP | Div PAS | Sudah Di Upload |
| | B09 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan/Download Data SPPT TI oleh UPT Pemasyarakatan melalui Aplikasi SDP | Div PAS | Sudah Di Upload |
| 5 | Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Narapidana | | | |
| | B07 | Monitoring pelaksanaan pencatatan dan pelaporan layanan rehabilitasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Watkesrehab dan pemberian feed back kepada UPT Pemasyarakatan | Div PAS | Sudah Di Upload |

**SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI PEMASYARAKATAN**

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|-----------|--|--|----------------------|-----------------|
| | B08 | Supervisi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat oleh Tim Mentor Kantor Wilayah | Div PAS | Sudah Di Upload |
| | B09 | Supervisi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat oleh Tim Mentor Kantor Wilayah | Div PAS | Sudah Di Upload |
| 6 | 80% Narapidana memperoleh pendidikan vokasi bersertifikasi melalui pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa) | | | |
| | B07 | 1. Sosialisasi penyusunan rekomendasi kebijakan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); 2. Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia | Div PAS | Sudah Di Upload |
| | B08 | 1. Sosialisasi penyusunan rekomendasi kebijakan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); 2. Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia | Div PAS | Sudah Di Upload |
| | B09 | 1. Sosialisasi penyusunan rekomendasi kebijakan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); 2. Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia | Div PAS | Sudah Di Upload |
| 7 | 45% Narapidana memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berwirausaha 1. Pengembangan Lapas Produktif sesuai dengan kebutuhan Industri saat ini; 2. Pelaksanaan Pembinaan melalui Saran Asimilasi dan Edukasi (SAE) di wilayah | | | |
| | B07 | 1. Implementasi Lapas Produktif; 2. Implementasi Pelaksanaan pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi | Div PAS | Sudah Di Upload |
| | B08 | 1. Implementasi Lapas Produktif; 2. Implementasi Pelaksanaan pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi | Div PAS | Sudah Di Upload |
| | B09 | 1. Implementasi Lapas Produktif; 2. Implementasi Pelaksanaan pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi | Div PAS | Sudah Di Upload |
| 8 | 65% Narapidana yang dinilai dengan menggunakan instrumen SPPN memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian | | | |
| | B07 | Pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana | Div PAS | Sudah Di Upload |
| | B08 | Pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana | Div PAS | Sudah Di Upload |
| | B09 | Pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana | Div PAS | Sudah Di Upload |
| 9 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Basan Baran Di Rupbasan | | | |
| | B07 | Pelaksanaan Inventarisir dan pemetaan Basan Baran berdasarkan Nilai Basan Baran | Div PAS | Sudah Di Upload |
| | B08 | Pelaksanaan Inventarisir dan pemetaan Basan Baran berdasarkan Nilai Basan Baran | Div PAS | Sudah Di Upload |
| | B09 | Pelaksanaan Inventarisir dan pemetaan Basan Baran berdasarkan Nilai Basan Baran | Div PAS | Sudah Di Upload |
| 10 | Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa pada 10 kota: 1. Kota Banda Aceh, Aceh; 2. Kota Tanjung Pinang, Kepri; 3. Palembang, Sumsel; 4. Yogyakarta, DIY; 5. Tanjung Selor, Kalimantan Utara; 6. Kupang, NTT; 7. Kota Gorontalo, Gorontalo; 8. Kota Palu, Sulteng; 9. Ternate, Maluku utara; 10. Kota Jayapura, Papua. | | | |

**SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI PEMASYARAKATAN**

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|-----------|--|--|-----------------------------|------------------------|
| | B07 | Pelaksanaan Pedoman Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan | Div PAS | Sudah Di Upload |
| | B08 | Pelaksanaan Pedoman Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan | Div PAS | Sudah Di Upload |
| | B09 | Pelaksanaan Pedoman Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan | Div PAS | Sudah Di Upload |
| | Manajemen Mitigasi Bencana dalam rangka Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemasarakatan | | | |
| | B07 | Bimbingan Teknis Manajemen Mitigasi Bencana pada UPT Pemasarakatan | Div PAS | Sudah Di Upload |
| | B08 | Implementasi Manajemen Mitigasi Bencana di 50% UPT Pemasarakatan | Div PAS | Sudah Di Upload |
| | B09 | Sebanyak 100% UPT Pemasarakatan telah mengimplementasikan Manajemen Mitigasi Bencana | Div PAS | Sudah Di Upload |

➤ Divisi Keimigrasian

**SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI KEIMIGRASIAN**

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | PENILAIAN | KET |
|-----------------------------------|---|--|--|------------|-----------------------------------|
| KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN | | | | | |
| 1 | Tersedianya data cekal di Divisi Keimigrasian dan Terselenggaranya Pengusulan Cekal yang cepat , tepat dan berbasis IT | | | | |
| | B02 | Uji Coba Aplikasi Cekal Online di satuan kerja | Bidang Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian | 100 | Data Dukung Lengkap |
| | B05 | Tersedianya data cekal di UPT | Bidang Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian | 100 | Data Dukung Lengkap |
| | B08 | Tersedianya data cekal di UPT | Bidang Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian | | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | 1. Inventarisasi permasalahan cekal online 2. Terselenggaranya Aplikasi Cekal Online 3. Usulan pengembangan aplikasi dan kebijakan | Bidang Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian | | |
| 2 | Penegakan hukum berbasis SOPAP dan Regulasi | | | | |
| | B02 | Uji coba SOPAP penegakan hukum keimigrasian di UPT | Bidang Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian | 100 | Data Dukung Lengkap |
| | B05 | 1. Penerapan SOPAP 2. Database Penegakan Hukum | Bidang Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian | 100 | Data Dukung Lengkap |
| | B08 | 1. Penerapan SOPAP 2. Database Penegakan Hukum | Bidang Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian | | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | Evaluasi SOPAP Penegakan Hukum Keimigrasian | Bidang Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian | | |
| 3 | Implementasi Mobile Paspor | | | | |
| | B02 | 1. Penyusunan rencana kegiatan; 2. Sosialisasi layanan Mobile Paspor ke masyarakat, instansi pemerintah/BUMN/swasta/ komunitas | Bidang Perizinan Dan Informasi Keimigrasian | 100 | Data Dukung Lengkap |
| | B05 | 1. Melakukan sosialisasi layanan Mobile Paspor; 2. Melaksanakan Mobile Paspor | Bidang Perizinan Dan Informasi Keimigrasian | 100 | Data Dukung Lengkap |
| | B08 | 1. Melaksanakan kegiatan Mobile Paspor; 2. Melakukan monitoring kepada Unit Pelaksana Teknis implementasi | Bidang Perizinan Dan Informasi Keimigrasian | | Data Dukung Sudah Diupload |

➤ **Data Capaian Kinerja TW III Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Maluku Utara**

**PENYERAPAN ANGGARAN
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
PER 30 SEPTEMBER 2022**

| No | Kode Nama Satker | Pegawai | | | Barang | | | Modal | | | Total | | | |
|----|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | Pagu | Real | % | Pagu | Real | % | Pagu | Real | % | Pagu | Real | Sisa | % |
| 1 | 352614 LPKA TERNATE | 2.639.715.000 | 2.769.339.164 | 104,91% | 1.507.204.000 | 1.071.280.821 | 71,08% | 150.000.000 | 149.800.000 | 99,87% | 4.296.919.000 | 3.990.419.985 | 306.499.015 | 92,87% |
| 2 | 497840 LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO | 1.770.543.000 | 2.060.608.804 | 116,38% | 1.826.908.000 | 1.159.305.229 | 63,46% | 150.000.000 | 149.796.044 | 99,86% | 3.747.451.000 | 3.369.710.077 | 377.740.923 | 89,92% |
| 3 | 632712 RUPBASAN TERNATE | 1.187.415.000 | 1.073.522.716 | 90,41% | 834.381.000 | 728.466.000 | 87,31% | 150.000.000 | 147.770.509 | 98,51% | 2.171.796.000 | 1.949.759.225 | 222.036.775 | 89,78% |
| 4 | 684003 RUTAN WEDA | 972.514.000 | 1.064.442.124 | 109,45% | 1.225.857.000 | 814.355.113 | 66,43% | 150.000.000 | 149.422.500 | 99,62% | 2.348.371.000 | 2.028.219.737 | 320.151.263 | 86,37% |
| 5 | 649028 DITJEN HAM | - | - | - | 273.061.000 | 235.776.960 | 86,35% | - | - | - | 273.061.000 | 235.776.960 | 37.284.040 | 86,35% |
| 6 | 632047 BAPAS KELAS II TIDORE | 694.184.000 | 924.666.913 | 133,20% | 1.245.000.000 | 716.846.470 | 57,58% | 150.000.000 | 149.734.881 | 99,82% | 2.089.184.000 | 1.791.248.264 | 297.935.736 | 85,74% |
| 7 | 649027 DITJEN PP | - | - | - | 247.000.000 | 207.950.000 | 84,19% | - | - | - | 247.000.000 | 207.950.000 | 39.050.000 | 84,19% |
| 8 | 649025 DITJEN IMIGRASI | - | - | - | 1.462.670.000 | 1.157.603.931 | 79,14% | - | - | - | 1.462.670.000 | 1.157.603.931 | 305.066.069 | 79,14% |
| 9 | 649026 DITJEN KI | - | - | - | 913.609.000 | 717.916.500 | 78,58% | - | - | - | 913.609.000 | 717.916.500 | 195.692.500 | 78,58% |
| 10 | 626161 BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE | 1.909.234.000 | 1.797.638.078 | 94,15% | 1.360.737.000 | 719.178.600 | 52,85% | 150.000.000 | 147.720.480 | 98,48% | 3.419.971.000 | 2.664.537.158 | 755.433.842 | 77,91% |
| 11 | 649023 DITJEN AHU | - | - | - | 2.031.284.000 | 1.568.155.719 | 77,20% | - | - | - | 2.031.284.000 | 1.568.155.719 | 463.128.281 | 77,20% |
| 12 | 109152 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO | 2.750.632.000 | 2.521.448.470 | 91,67% | 2.661.996.000 | 1.612.868.298 | 60,59% | 150.000.000 | 148.973.612 | 99,32% | 5.562.628.000 | 4.283.290.380 | 1.279.337.620 | 77,00% |
| 13 | 407499 RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE | 2.907.790.000 | 2.640.885.024 | 90,82% | 2.579.133.000 | 1.440.130.915 | 55,84% | 145.765.000 | 145.485.936 | 99,81% | 5.632.688.000 | 4.226.501.875 | 1.406.186.125 | 75,04% |
| 14 | 649029 BPHN | - | - | - | 1.221.888.000 | 911.259.180 | 74,58% | - | - | - | 1.221.888.000 | 911.259.180 | 310.628.820 | 74,58% |
| 15 | 109153 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA | 3.013.380.000 | 2.551.283.927 | 84,67% | 2.496.770.000 | 1.426.988.417 | 57,15% | 150.000.000 | 148.976.800 | 99,32% | 5.660.150.000 | 4.127.249.144 | 1.532.900.856 | 72,92% |
| 16 | 480505 KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE | 2.826.275.000 | 2.335.452.634 | 82,63% | 5.700.213.000 | 4.092.969.211 | 71,80% | 1.399.631.000 | 806.521.022 | 57,62% | 9.926.119.000 | 7.234.942.867 | 2.691.176.133 | 72,89% |
| 17 | 662968 KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO | 1.418.144.000 | 1.174.026.573 | 82,79% | 3.816.718.000 | 2.990.479.155 | 67,87% | 148.400.000 | 148.395.000 | 100,00% | 5.383.262.000 | 3.912.900.728 | 1.470.361.272 | 72,69% |
| 18 | 649022 SETJEN | 7.106.532.000 | 5.419.146.063 | 76,26% | 5.917.838.000 | 4.111.085.343 | 69,47% | 304.390.000 | - | 0,00% | 13.328.760.000 | 9.530.231.406 | 3.798.528.594 | 71,50% |
| 19 | 531891 RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU | 2.723.091.000 | 1.807.510.577 | 66,38% | 1.533.160.000 | 1.151.856.822 | 75,13% | 150.000.000 | 149.859.000 | 99,91% | 4.406.251.000 | 3.109.226.399 | 1.297.024.601 | 70,56% |
| 20 | 652827 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE | 3.732.598.000 | 2.836.844.808 | 76,00% | 4.780.633.000 | 3.066.325.150 | 64,14% | 130.000.000 | 127.839.016 | 98,34% | 8.643.231.000 | 6.031.008.974 | 2.612.222.026 | 69,78% |
| 21 | 407503 LAPAS KELAS III LABUHA | 1.761.309.000 | 1.466.222.028 | 83,25% | 2.070.896.000 | 1.152.197.251 | 55,64% | 150.000.000 | 149.464.235 | 99,64% | 3.982.205.000 | 2.767.883.514 | 1.214.321.486 | 69,51% |
| 22 | 649030 BALITBANGHAM | - | - | - | 235.670.000 | 143.077.150 | 60,71% | - | - | - | 235.670.000 | 143.077.150 | 92.592.850 | 60,71% |
| 23 | 649024 DITJEN PEMASYARAKATAN | - | - | - | 1.027.254.000 | 511.151.500 | 49,76% | - | - | - | 1.027.254.000 | 511.151.500 | 516.102.500 | 49,76% |
| 24 | 418350 LAPAS PEREMPUAN TERNATE | 2.887.801.000 | 2.266.133.951 | 78,47% | 1.564.213.000 | 997.451.567 | 63,77% | 5.916.050.000 | 1.892.941.327 | 32,00% | 10.368.064.000 | 5.156.526.845 | 5.211.537.155 | 49,73% |
| | TOTAL | 40.301.157.000 | 34.709.171.854 | 86,12% | 48.534.093.000 | 32.304.675.302 | 66,56% | 9.544.236.000 | 4.612.700.362 | 48,33% | 98.379.486.000 | 71.626.547.518 | 26.752.938.482 | 72,81% |

sumber : <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

30 September 2022 pukul 10.36 WIT

D. Simpulan dan Saran

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja melalui Aplikasi E-Performance serta pelaksanaan Target Kinerja B09 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah dilaksanakan 100%. Penyampaian Data Dukung seluruh satuan kerja telah terupload pada aplikasi Target Kinerja Kemenkumham. Kantor Wilayah beserta jajaran terus berkomitmen melaksanakan semua target kinerja yang telah ditentukan oleh masing masing unit eselon I dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH.1.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022. Hal tersebut merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan Anggaran lewat Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Tahun Anggaran 2022 Kantor wilayah secara keseluruhan tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya walaupun mengalami keterlambatan dalam pengesahan yang di lakukan oleh masih masing unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM. Hanya saja ada pembaharuan dalam penyampaian data dukung pelaporan pada aplikasi Target Kinerja Kemenkumham, dimana penyampaian data dukung laporan harus di sampaikan setiap bulannya, akan tetapi tetap mengikuti matriks Target Kinerja yang sudah disampaikan. Pelaksanan target kinerja di lingkungan Kantor Wilayah mengingat ada beberapa target kinerja yang bekerja sama dengan pemerintah daerah atau kabupaten, pelaksanaannya sewaktu waktu dapat berubah dengan mempertimbangkan kondisi alam,

mengingat secara geografis Provinsi Maluku Utara terdiri beberapa kepulauan sehingga faktor alam bisa menjadi kendala atau penghambat pemenuhan target kinerja yang telah disusun pelaksanaannya. Pada TW III Kantor Wilayah tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan target kinerja, dengan didukung SDM yang memadai juga didukung dengan faktor alam yakni cuaca yang mendukung dalam pelaksanaan target kinerja pada TW III.

Dari beberapa faktor diatas Kantor Wilayah tetap berupaya untuk dapat melaksanakan target kinerja yang telah ditentukan dengan, melaksanakan kegiatan yang sudah di rencanakan baik secara luring maupun daring melihat situasi dan kondisi khususnya apabila pelaksanaan kegiatan yang harus kerkoordinasi dengan pemerintah daerah apabila terkendala dengan faktor alam (cuaca) dapat dilaksanakan secara daring atau virtual. Dengan tidak mengurangi manfaat yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah Kerja Provinsi Maluku Utara.

E. Penutup

Capaian Perjanjian Kinerja dan Capaian Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada Triwulan III B09 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan Matriks Target Kinerja. Pelaksanaan Target Kinerja pada masing masing satuan kerja juga telah sesuai. Mulai dari tahapan kegiatan sampai dengan output / data dukung yang dihasilkan. Secara keseluruhantim evaluasi capaian target kinerja pada TW III di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tidak menemukan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pemenuhan Target kinerja B09. Semuanya berjalan sesuai Disbursement Plan dan Rencana Kerja Tahun 2022 (Renja) yang telah disusun pada awal tahun 2022. Untuk pelaporan pada Triwulan ke III B09 Kantor wilayah dan jajaran tetap berkomitmen dapat melaksanakan Target Kinerja dan memaksimalkan penyerapan anggaran sehingga Kinerja Kantor Wilayah Maluku Utara berkontribusi yang positif dalam pelaksanaan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Demikian Laporan Evaluasi Capaian Target Kinerja Triwulan III B09 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Kepala Kantor Wilayah dengan Unit Kerja Eselon I.

Ternate, 4 Oktober 2022
Kepala Divisi Administrasi



Andi Basmal
NIP. 197202151992031002

LAMPIRAN DOKUMENTASI RAPAT MONITORING DAN HASIL EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA TRIWULAN III (B09)





malut.kemenkumham.go.id Kanwil Kemenkumham Malut kemenkumhammalut malut_kumham



malut.kemenkumham.go.id Kanwil Kemenkumham Malut kemenkumhammalut malut_kumham





LAPORAN MONITORING DAN HASIL EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN CAPAIAN TARGET KINERJA TRIWULAN IV (B12)



**REFORMASI
HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**



**# bangga
melayani
bangsa**



**LAPORAN MONITORING DAN HASIL EVALUASI PERJANJIAN
KINERJA DAN TARGET KINERJA TRIWULAN IV (B12)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA TAHUN 2022**

A. Pendahuluan

1. Umum

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Selain perjanjian kinerja salah satu strategi untuk peningkatan kinerja secara terstruktur dan berjenjang adalah dengan melaksanakan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.HH- 1.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022. Target kinerja dilaksanakan dengan merujuk kepada target-target yang harus diselesaikan Kementerian Hukum dan HAM sepanjang tahun 2022 yang termaktub dalam RPJMN, Renstra dan RKP Tahun 2022. Target Kinerja ini juga merupakan hasil kolaborasi pemikiran dari para Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri bersamaan seluruh Pimpinan Unit Eselon I. Kantor wilayah pada tahun 2022 memiliki 39 target kinerja dan total anggaran sebesar Rp.98.467.785.000.- (Sembilan puluh delapan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pelaksanaan kinerja anggaran dibuat berdasarkan perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga, juga sebagai penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana kerja kementerian/lembaga dalam satu tahun anggaran Dibagi menjadi 4 (empat) triwulan B03, B06, B09 dan B12

dengan target penyerapan di masing masing triwulan sesuai dengan surat Sekertariat Jenderal Nomor : SEK.PR.01.04-68 tentang Penyampaian Pagu Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM TA 2022. Dengan target Disbursement Plan Rencana Penarikan dana setiap Triwulan adalah TW I : 25% , TW II : 50% , TW III : 75% dan TW IV : 100% dengan berdasarkan ketentuan tersebut diatas Kementerian Hukum dan HAM telah mencapai target pada TW IV (B12) sebesar 96,38% dari target 100% yang ditargetkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya satuan kerja masih melaksanakan kegiatan pembangunan belanja modal, hal tersebut menyebabkan penyesuaian sehingga satuan kerja belum mencapai target 100%. Namun demikian target kinerja pada pelaporan TW IV B12, satuan kerja sudah menyampaikan pelaporan pada aplikasi Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM dengan penyampaian pelaporan 100%.

Berdasarkan latar belakang diatas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara pada setiap triwulan akan melaksanakan Monitoring dan Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja untuk memenuhi data dukung berbagai program kegiatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diantaranya Data Dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi, Data Dukung Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai di Kantor Wilayah Maluku Utara.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari pelaksanaan Monitoring dan Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja adalah untuk mengetahui sejauh mana capaian Perjanjian Kinerja dan Capaian Target Kinerja sampai dengan Triwulan IV B12 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara serta melakukan evaluasi terhadap capaian kegiatan tersebut.

3. Ruang Lingkup

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Serta Target Kinerja merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga, juga sebagai penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana kerja kementerian/lembaga dalam satu tahun anggaran.

Ruang lingkup kegiatan ini adalah seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan HAM baik di tingkat pusat maupun daerah dan pada khusus pada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

4. Dasar

- a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-1.PR.01,03 Tahun 2022 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- c. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-OT.03-005 Tanggal 4 Januari 2022 Perihal Pedoman Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja, dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2022;
- d. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-OT.03-006 Tanggal 4 Januari 2022 Perihal Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja, dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2022;
- e. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-OT.03-73 Tanggal 11 Januari 2022 Perihal Penyampaian Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022;
- f. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-OT.03-151 Tanggal 7 Maret 2022 Perihal Penyampaian Rencana Kerja WBK/WBBM Tahun 2022.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan pada Pelaksanaan Monitoring dan Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja yaitu dengan hasil yang dilaporkan pada triwulan IV B12 adalah telah dilaksanakan oleh para Pejabat Tinggi Pratama baik Kepala Kantor Wilayah maupun para Kepala Divisi diantaranya, pada tanggal 28 Desember 2022 dengan mengadakan evaluasi capaian pelaksanaan anggaran antara Pimpinan Tinggi Pratama dengan Kepala Kantor Wilayah serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Masyarakat dan Imigrasi dengan Kepala Kantor Wilayah serta melaksanakan evaluasi terhadap capaian laporan perjanjian kinerja melalui E-Performance serta laporan Target Kinerja pada Triwulan IV B12.

C. Hasil yang dicapai

Capaian Perjanjian Kinerja Telah dituangkan kedalam laporan Perjanjian dan Realisasi Kinerja atau melalui aplikasi E-Performance telah dilaksanakan dan dilaporkan sesuai dengan Target yang telah ditentukan dan telah dievaluasi kantor wilayah Maluku Utara melakukan rapat evaluasi capaian target kinerja berdasarkan data yang ada pada aplikasi E-Performance Kemenkumham dengan rincian data sebagai berikut:

1. Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien pada Triwulan IV B12 Terealisasi sebesar **100%**;
2. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah pada Triwulan IV B12 Terealisasi sebesar **100%**;
3. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar pada Triwulan IV B12 Terealisasi sebesar **100%**;
4. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi pada Triwulan IV B12 Terealisasi sebesar **100%**;
5. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar pada Triwulan IV B12 Terealisasi sebesar **100%**;
6. Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar pada Triwulan IV B12 Terealisasi sebesar **100%**;
7. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar pada Triwulan IV B12 Terealisasi sebesar **100%**;
8. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban pada Triwulan IV B12 Terealisasi sebesar **100%**;
9. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar pada Triwulan IV B12 Terealisasi sebesar **100%**;
10. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah pada Triwulan IV B12 Terealisasi sebesar **100%**;
11. Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum pada Triwulan IV B12 Terealisasi sebesar **100%**;
12. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD pada Triwulan IV B12 Terealisasi sebesar **100%**;
13. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada Triwulan IV B12 Terealisasi sebesar **100%**;
14. Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal pada Triwulan IV B12 Terealisasi sebesar

100%;

15. Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia pada Triwulan IV B12 Terealisasi sebesar **100%**;
16. Terefasilitasinya rancangan produk hukum di daerah pada Triwulan IV B12 Terealisasi sebesar **150%**;
17. Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah pada Triwulan IV B12 Terealisasi sebesar **100%**;
18. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM pada Triwulan IV B12 Terealisasi sebesar **100%**;
19. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah pada Triwulan IV B12 Terealisasi sebesar **100%**;

E-PERFORMANCE SISTEM AKUN

https://e-performance.kemkumham.go.id/main.php?mod=kinerja&ted_tahun=2022&ted_unit_kerja=51

Home Dashboard BSC Data Master Input Data Perencanaan Realisasi Sakip Lainnya Ubah Password Keluar

E-PERFORMANCE
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN: 2022

UNIT KERJA: KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA

Tampilkan Tambah

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN : 2022
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA

| NO | SASARAN STRATEGIS | NO | INDIKATOR KINERJA | CASCADING | | TARGET | | | REALISASI | | CATATAN MONITORING | BSC | | | |
|----|---|----|---|-----------|-------|-------------------------|--------|--------|------------|--------|--------------------|--|-------|----------|---|
| | | | | KELUAR | MASUK | WAKTU PENYELESAIAN | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH (%) | URAIAN | | LAMPIRAN | BOBOT | SCORE(%) | |
| 1. | Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien | 1 | Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah | | | 3.1 Indeks: Triwulan IV | TW1 | 3.1 | Indeks | 3.1 | 100 | Januari: Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien. Februari: Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien. Maret: Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien. | | 0 | 0 |
| | | | | | | | TW2 | 3.1 | Indeks | 3.1 | 100 | April: Mei: Juni: Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien. | | | |
| | | | | | | | TW3 | 3.1 | Indeks | 3.1 | 100 | Juli: Agustus: Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien. | | | |
| | | | | | | | TW4 | 3.1 | Indeks | 3.1 | 100 | Oktober: November: Desember: Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah | 2 | Indeks penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah | | | 81 Persen: Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari: Februari: Maret: Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah. | | 0 | 0 |
| | | | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April: Mei: Juni: Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah. | | | |
| | | | | | | | TW3 | 60 | Persen | 60 | 100 | Juli: Agustus: Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah. | | | |
| | | | | | | | TW4 | 81 | Persen | 81 | 100 | Oktober: November: Desember: Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------------|-----|--------|--------|-----|---|--|---|---|
| 3. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | 3 | 1 | Persentase menurunnya tahanan yang overstaying | 80 Persen; Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | 0 | 0 |
| | | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | Februari: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | | |
| | | | TW3 | | 60 | Persen | 60 | 100 | April: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | | | |
| | | | TW4 | | 80 | Persen | 80 | 100 | Mei: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | | | |
| | 3 | 2 | Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Perbaikan Hukum | 80 Persen; Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | 0 | 0 |
| | | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | Februari: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | | |
| | | | TW3 | | 60 | Persen | 60 | 100 | April: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | | | |
| | | | TW4 | | 80 | Persen | 80 | 100 | Mei: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | | | |
| | 3 | 3 | Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum | 80 Persen; Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | 0 | 0 |
| | | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | Februari: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | | |
| | | | TW3 | | 60 | Persen | 60 | 100 | April: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | | | |
| | | | TW4 | | 80 | Persen | 80 | 100 | Mei: Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | | | |
| 4. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | 4 | 1 | Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian | 65 Persen; Triwulan IV | TW1 | 10 | Persen | 10 | 100 | Januari: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | 0 | 0 |
| | | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | TW2 | 30 | Persen | 30 | 100 | Februari: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | | |
| | | | TW3 | | 50 | Persen | 50 | 100 | April: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | | | |
| | | | TW4 | | 65 | Persen | 65 | 100 | Mei: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | | | |
| | 4 | 2 | persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi | 98 Persen; Triwulan IV | TW1 | 25 | Persen | 25 | 100 | Januari: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | 0 | 0 |
| | | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | TW2 | 50 | Persen | 50 | 100 | Februari: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | | |
| | | | TW3 | | 75 | Persen | 75 | 100 | April: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | | | |
| | | | TW4 | | 98 | Persen | 98 | 100 | Mei: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | | | |
| | 4 | 3 | persentase narapidana yang mendapatkan hak | 80 Persen; Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|-----------|-------------|--|--|-----|----|--------|----|-----|---|--|---|---|
| | | | | | | | | | | TW4 | 67 | Person | 67 | 100 | Oktober: November: Desember: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kependidikan, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | | | |
| | | 4 | 8 | Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi | | 30 Orang | Trivulan IV | | | TW1 | 0 | Orang | 0 | | Januari: Februari: Maret: | | 0 | 0 |
| | | | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | | | | | TW2 | 0 | Orang | 0 | | April: Mei: Juni: | | | |
| | | | | | | | | | | TW3 | 0 | Orang | 0 | | Juli: Agustus: September: | | | |
| | | | | | | | | | | TW4 | 30 | Orang | 30 | 100 | Oktober: November: Desember: Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kependidikan, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | | | |
| 5. | Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar | 5 | 1 | Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan jumlahnya | | 70 Persen | Trivulan IV | | | TW1 | 10 | Person | 10 | 100 | Januari: Februari: Maret: Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar | | 0 | 0 |
| | | | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | | | | | TW2 | 30 | Person | 30 | 100 | April: Mei: Juni: Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar | | | |
| | | | | | | | | | | TW3 | 50 | Person | 50 | 100 | Juli: Agustus: September: Meningkatnya | | | |
| | | | | | | | | | | TW4 | 70 | Person | 70 | 100 | Oktober: November: Desember: Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar | | | |
| | | 5 | 2 | Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang dikeluarkan | | 60 Persen | Trivulan IV | | | TW1 | 10 | Person | 10 | 100 | Januari: Februari: Maret: Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar | | 0 | 0 |
| | | | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | | | | | TW2 | 20 | Person | 20 | 100 | April: Mei: Juni: Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar | | | |
| | | | | | | | | | | TW3 | 40 | Person | 40 | 100 | Juli: Agustus: September: Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar | | | |
| | | | | | | | | | | TW4 | 60 | Person | 60 | 100 | Oktober: November: Desember: Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar | | | |
| 6. | Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar | 6 | 1 | Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga | | 50 Persen | Trivulan IV | | | TW1 | 10 | Person | 10 | 100 | Januari: Februari: Maret: Meningkatkan pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar | | 0 | 0 |
| | | | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | | | | | TW2 | 20 | Person | 20 | 100 | April: Mei: | | | |
| | | | | | | | | | | TW3 | 30 | Person | 30 | 100 | Juli: Agustus: September: Meningkatkan pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar | | | |
| | | | | | | | | | | TW4 | 50 | Person | 50 | 100 | Oktober: November: Desember: Meningkatkan pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar | | | |
| | | 6 | 2 | Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara | | 60 Persen | Trivulan IV | | | TW1 | 10 | Person | 10 | 100 | Januari: Februari: Maret: Meningkatkan pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar | | 0 | 0 |
| | | | | Sasaran Kinerja Pegawai: | | | | | | TW2 | 20 | Person | 20 | 100 | April: Mei: Juni: Meningkatkan pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar | | | |
| | | | | | | | | | | TW3 | 40 | Person | 40 | 100 | Juli: Agustus: September: Meningkatkan pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|-------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|---|--|---|---|
| | | | | | | TW4 | 60 | Persen | 60 | 100 | Oktober : November: Desember: Meningkatkan pelayanan bimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar | | | |
| | 6 | 3 | Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya | | 30 Persen: Triwulan IV | TW1 | 0 | | 0 | | Januari : Februari: Maret: | | 0 | 0 |
| | | | Sasaran Kinerja Pegawai : | | | TW2 | 15 | Persen | 15 | 100 | April : Mei: Juni: Persentase Klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya | | | |
| | | | | | | TW3 | 0 | | 0 | | Juli : Agustus: September: | | | |
| | | | | | | TW4 | 30 | Persen | 30 | 100 | Oktober : November: Desember: Meningkatkan pelayanan bimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar | | | |
| 7. | | | Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar | | 75 Persen: Triwulan IV | TW1 | 10 | Persen | 10 | 100 | Januari : Februari: Maret: Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar | | 0 | 0 |
| | 7 | 1 | Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat | | | TW2 | 30 | Persen | 30 | 100 | April : Mei: Juni: Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA | | | |
| | | | Sasaran Kinerja Pegawai : | | | TW3 | 50 | Persen | 50 | 100 | Juli : Agustus: September: Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar | | | |
| | | | | | | TW4 | 75 | Persen | 75 | 100 | Oktober : November: Desember: Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar | | | |
| | 7 | 2 | Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi | | 100 Persen: Triwulan IV | TW1 | 25 | Persen | 25 | 100 | Januari : Februari: Maret: Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar | | 0 | 0 |
| | | | Sasaran Kinerja Pegawai : | | | TW2 | 50 | Persen | 50 | 100 | April : Mei: Juni: Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar | | | |
| | | | | | | TW3 | 75 | Persen | 75 | 100 | Juli : Agustus: September: Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar | | | |
| | | | | | | TW4 | 100 | Persen | 100 | 100 | Oktober : November: Desember: Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar | | | |
| | 7 | 3 | Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar | | 80 Persen: Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari : Februari: Maret: Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar | | 0 | 0 |
| | | | Sasaran Kinerja Pegawai : | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April : Mei: Juni: Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar | | | |
| | | | | | | TW3 | 60 | Persen | 60 | 100 | Juli : Agustus: September: Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar | | | |
| | | | | | | TW4 | 80 | Persen | 80 | 100 | Oktober : November: Desember: Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar | | | |
| | 7 | 4 | Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal | | 80 Persen: Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari : Februari: Maret: Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar | | 0 | 0 |
| | | | Sasaran Kinerja Pegawai : | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April : Mei: Juni: Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|---|--|-------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|---|---|---|
| 9. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 9 | 1 | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 80 Persen: Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari: Februari: Maret: Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 0 | 0 |
| | | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April: Mei: Juni: Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | |
| | | | | | | TW3 | 60 | Persen | 60 | 100 | Juli: Agustus: September: Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | |
| | | | | | | TW4 | 80 | Persen | 80 | 100 | Oktober: November: Desember: Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | |
| | | 9 | 2 | Persentase gangguan kambuh yang dapat dicegah | 70 Persen: Triwulan IV | TW1 | 10 | Persen | 10 | 100 | Januari: Februari: Maret: Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 0 | 0 |
| | | | | | | TW2 | 30 | Persen | 30 | 100 | April: Mei: Juni: Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | |
| | | | | | | TW3 | 50 | Persen | 50 | 100 | Juli: Agustus: September: Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | |
| | | | | | | TW4 | 70 | Persen | 70 | 100 | Oktober: November: Desember: Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | |
| | | 9 | 3 | Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib diah Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kambuh | 80 Persen: Triwulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari: Februari: Maret: Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 0 | 0 |
| | | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April: Mei: Juni: Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | |
| | | | | | | TW3 | 60 | Persen | 60 | 100 | Juli: Agustus: September: Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | |
| | | | | | | TW4 | 80 | Persen | 80 | 100 | Oktober: November: Desember: Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | |
| | | 9 | 4 | Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kambuh secara tuntas | 70 Persen: Triwulan IV | TW1 | 10 | Persen | 10 | 100 | Januari: Februari: Maret: Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 0 | 0 |
| | | | | | | TW2 | 30 | Persen | 30 | 100 | April: Mei: Juni: Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | |
| | | | | | | TW3 | 50 | Persen | 50 | 100 | Juli: Agustus: September: Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | |
| | | | | | | TW4 | 70 | Persen | 70 | 100 | Oktober: November: Desember: Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | | |
| 10. | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | 10 | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah | 3.2 Indeks: Triwulan IV | TW1 | 3.2 | Indeks | 3.2 | 100 | Januari: Februari: Maret: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | 0 | 0 |
| | | | | | | TW2 | 3.2 | Indeks | 3.2 | 100 | April: Mei: Juni: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | | |
| | | | | | | TW3 | 3.2 | Indeks | 3.2 | 100 | Juli: Agustus: September: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | | |
| | | | | | | TW4 | 3.2 | Indeks | 3.2 | 100 | Oktober: November: Desember: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | | |
| | | 10 | 2 | Indeks Penganaman Keimigrasian di Wilayah | 3 Indeks: Triwulan IV | TW1 | 3 | Indeks | 3 | 100 | Januari: Februari: Maret: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|---|--|---------------------------|-------------------------|--|--|--|-----|----|---------|----|-----|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | | TW2 | 3 | Indeks | 3 | 100 | April : Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | | | | |
| | | | | | | | | | | TW3 | 3 | Indeks | 3 | 100 | Juli : Agustus: September: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | | | | |
| | | | | | | | | | | TW4 | 3 | Indeks | 3 | 100 | Oktober : November: Desember: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | | | | |
| 11. | Tenwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang kepastian hukum | 11 | 1 | Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah  | Sasaran Kinerja Pegawai : | 5 Persen; Triwulan IV | | | | TW1 | 0 | | 0 | | Januari : Februari: Maret: | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | TW2 | 0 | | 0 | | April : Mei: Juni: | | | | |
| | | | | | | | | | | TW3 | 0 | | 0 | | Juli : Agustus: September: | | | | |
| | | | | | | | | | | TW4 | 5 | Persen | 5 | 100 | Oktober : November: Desember: Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah | | | | |
| 12. | Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD | 12 | 1 | Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah  | Sasaran Kinerja Pegawai : | 82 Persen; Triwulan IV | | | | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari : Februari: Maret: Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April : Mei: Juni: Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD | | | | |
| | | | | | | | | | | TW3 | 60 | Persen | 60 | 100 | Juli : Agustus: September: Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD | | | | |
| | | | | | | | | | | TW4 | 82 | Persen | 82 | 100 | Oktober : November: Desember: Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD | | | | |
| 13. | Terseleenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | 13 | 1 | Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah  | Sasaran Kinerja Pegawai : | 20 Layanan; Triwulan IV | | | | TW1 | 5 | Layanan | 5 | 100 | Januari : Februari: Maret: Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | TW2 | 10 | Layanan | 10 | 100 | April : Mei: Juni: Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | | | |
| | | | | | | | | | | TW3 | 15 | Layanan | 15 | 100 | Juli : Agustus: September: Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | | | |
| | | | | | | | | | | TW4 | 20 | Layanan | 20 | 100 | Oktober : November: Desember: Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | | | |
| | | 13 | 2 | Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah  | Sasaran Kinerja Pegawai : | 1 Lokus; Triwulan IV | | | | TW1 | 0 | | 0 | | Januari : Februari: Maret: | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | TW2 | 0 | | 0 | | April : Mei: Juni: | | | | |
| | | | | | | | | | | TW3 | 0 | | 0 | | Juli : Agustus: September: | | | | |
| | | | | | | | | | | TW4 | 1 | Lokus | 1 | 100 | Oktober : November: Desember: Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | | | |
| 14. | Terseleenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | 14 | 1 | Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual  | Sasaran Kinerja Pegawai : | 100 Persen; Triwulan IV | | | | TW1 | 25 | Persen | 25 | 100 | Januari : Februari: Maret: Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | TW2 | 50 | Persen | 50 | 100 | April : Mei: Juni: Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|--|--|---------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|---|--|---|---|--|
| | | | | | | TW3 | 75 | Persen | 75 | 100 | Juli : Agustus: September: Terseleenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kelayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | | | | |
| | | | | | | TW4 | 100 | Persen | 100 | 100 | Oktober : November: Desember: Terseleenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kelayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | | | | |
| | 14 | 2 | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kelayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah | | 5 Lokus: Triwulan IV | TW1 | 1 | Lokus | 1 | 100 | Januari : Februari: Maret: Terseleenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kelayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | | 0 | 0 | |
| | | | Sasaran Kinerja Pegawai : | | | TW2 | 2 | Lokus | 2 | 100 | April : Mei: Juni: Terseleenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kelayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | | | | |
| | | | | | | TW3 | 4 | Lokus | 4 | 100 | Juli : Agustus: September: Terseleenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kelayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | | | | |
| | | | | | | TW4 | 5 | Lokus | 5 | 100 | Oktober : November: Desember: Terseleenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kelayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | | | | |
| | 14 | 3 | Kegiatan Pemantauan Produk Kelayaan Intelektual di Wilayah | | 4 Laporan: Triwulan IV | TW1 | 1 | Laporan | 1 | 100 | Januari : Februari: Maret: Terseleenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kelayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | | 0 | 0 | |
| | | | Sasaran Kinerja Pegawai : | | | TW2 | 2 | Laporan | 2 | 100 | April : Mei: Juni: Terseleenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kelayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | | | | |
| | | | | | | TW3 | 3 | Laporan | 3 | 100 | Juli : Agustus: September: Terseleenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kelayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | | | | |
| | | | | | | TW4 | 4 | Laporan | 4 | 100 | Oktober : November: Desember: Terseleenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kelayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | | | | |
| 15 | | 15 | 1 | Perentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia | 70 Persen: Triwulan IV | TW1 | 10 | Persen | 10 | 100 | Januari : Februari: Maret: Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia | | 0 | 0 | |
| | | | Sasaran Kinerja Pegawai : | | | TW2 | 30 | Persen | 30 | 100 | April : Mei: Juni: Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia | | | | |
| | | | | | | TW3 | 50 | Persen | 50 | 100 | Juli : Agustus: Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia | | | | |
| | | | | | | TW4 | 70 | Persen | 70 | 100 | Oktober : November: Desember: Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia | | | | |
| | 15 | 2 | Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang di sosialisasi di wilayah | | 1 Buku: Triwulan IV | TW1 | 0 | | 0 | | Januari : Februari: Maret: | | 0 | 0 | |
| | | | Sasaran Kinerja Pegawai : | | | TW2 | 0 | | 0 | | April : Mei: Juni: | | | | |
| | | | | | | TW3 | 0 | | 0 | | Juli : Agustus: September: | | | | |
| | | | | | | TW4 | 1 | Buku | 1 | 100 | Oktober : | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|---|---------------------------|-------------------------|-----|--------|--------|-----|---|--|---|---|
| 16. Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah | 16 | 1 | Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kementerian/himpun | Sasaran Kinerja Pegawai : | 80 Persen: Trivulan IV | TW1 | 20 | Persen | 30 | 150 | Januari : Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah Februari: Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah Maret: Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah | 0 | 0 |
| | | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April : Mei: Juni: Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah | | |
| | | | | | | TW3 | 60 | Persen | 60 | 100 | Juli : Agustus: September: Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah | | |
| | | | | | | TW4 | 80 | Persen | 80 | 100 | Oktober: November: Desember: Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah | | |
| 17. Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan | 17 | 1 | Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan | Sasaran Kinerja Pegawai : | 12 Orang: Trivulan IV | TW1 | 0 | | 0 | | Januari : Februari: Maret: | 0 | 0 |
| | | | | | | TW2 | 0 | | 0 | | April : Mei: Juni: | | |
| | | | | | | TW3 | 0 | | 0 | | Juli : Agustus: September: | | |
| | | | | | | TW4 | 12 | Orang | 12 | 100 | Oktober : November: Desember: Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan | | |
| 18. Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan pembinaan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah | 18 | 1 | Jumlah kegiatan perencanaan, pemantauan dan pembinaan/analisis dan evaluasi produk hukum daerah | Sasaran Kinerja Pegawai : | 3 Kegiatan: Trivulan IV | TW1 | 0 | | 0 | | Januari : Februari: Maret: | 0 | 0 |
| | | | | | | TW2 | 1 | | 1 | 100 | April : Mei: Juni: Jumlah kegiatan perencanaan, pemantauan dan pembinaan/analisis dan evaluasi produk hukum daerah | | |
| | | | | | | TW3 | 2 | | 2 | 100 | Juli : Agustus: September: Jumlah kegiatan perencanaan, pemantauan dan pembinaan/analisis dan evaluasi produk hukum daerah | | |
| | | | | | | TW4 | 3 | | 3 | 100 | Oktober : November: Desember: Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan pembinaan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah | | |
| 19. Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | 19 | 1 | Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Sasaran Kinerja Pegawai : | 81 Persen: Trivulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari : Februari: Maret: Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | 0 | 0 |
| | | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April : Mei: Juni: Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | | |
| | | | | | | TW3 | 60 | Persen | 60 | 100 | Juli : Agustus: September: Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | | |
| | | | | | | TW4 | 81 | Persen | 81 | 100 | Oktober : November: Desember: Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | | |
| 19 | 2 | Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Sasaran Kinerja Pegawai : | 80 Persen: Trivulan IV | TW1 | 20 | Persen | 20 | 100 | Januari : Februari: Maret: Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | 0 | 0 | |
| | | | | | TW2 | 40 | Persen | 40 | 100 | April : Mei: Juni: Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | | | |
| | | | | | TW3 | 60 | Persen | 60 | 100 | Juli : Agustus: September: Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | | | |
| | | | | | TW4 | 80 | Persen | 80 | 100 | Oktober : November: | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------------------------------------|-----|-------|---------------------|-------|-----|---|---|---|
| 19 | 3 | <p>Indeks kepuasan layanan bantuan hukum</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai :</p> | 76.61 Persen: Triwulan IV | TW1 | 10 | Persen | 10 | 100 | Januari : Februari: Maret: Meningkatkan kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | 0 | 0 |
| | | | | TW2 | 30 | Persen | 30 | 100 | April : Mei: Juni: Meningkatkan kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | | |
| | | | | TW3 | 50 | Persen | 50 | 100 | Juli : Agustus: September: Meningkatkan kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | | |
| | | | | TW4 | 76.61 | Persen | 76.61 | 100 | Oktober : November: Desember: Meningkatkan kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | | |
| 19 | 4 | <p>Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai :</p> | 70 Persen: Triwulan IV | TW1 | 10 | Persen | 10 | 100 | Januari : Februari: Maret: Meningkatkan kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | 0 | 0 |
| | | | | TW3 | 50 | Persen | 50 | 100 | Juli : Agustus: September: Meningkatkan kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | | |
| | | | | TW4 | 70 | Persen | 70 | 100 | Oktober : November: Desember: Meningkatkan kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | | |
| | | | | TW1 | 0 | Persen | 0 | 100 | Januari : Februari: Maret: | | |
| 19 | 5 | <p>Persentase website anggota DJIHN aktif yang terintegrasi dengan portal sistem Integrasi DJIHN</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai :</p> | 20 Persen: Triwulan IV | TW2 | 10 | Persen | 10 | 100 | April : Mei: Juni: Persentase website anggota DJIHN aktif yang terintegrasi dengan portal sistem Integrasi DJIHN | 0 | 0 |
| | | | | TW3 | 0 | Persen | 0 | 100 | Juli : Agustus: September: | | |
| | | | | TW4 | 20 | Persen | 20 | 100 | Oktober : November: Desember: Meningkatkan kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | | |
| | | | | TW1 | 0 | Instansi Pemerintah | 0 | 100 | Januari : Februari: Maret: | | |
| 20 | 1 | <p>Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai :</p> | 3 Instansi Pemerintah: Triwulan IV | TW2 | 0 | Instansi Pemerintah | 0 | 100 | April : Mei: Juni: | 0 | 0 |
| | | | | TW3 | 0 | Instansi Pemerintah | 0 | 100 | Juli : Agustus: September: | | |
| | | | | TW4 | 3 | Instansi Pemerintah | 3 | 100 | Oktober : November: Desember: Meningkatkan pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM | | |
| | | | | TW1 | 0 | Instansi Pemerintah | 0 | 100 | Januari : Februari: Maret: | | |
| 20 | 2 | <p>Jumlah kab/kota peduli HAM</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai :</p> | 1 Instansi Pemerintah: Triwulan IV | TW2 | 0 | Instansi Pemerintah | 0 | 100 | April : Mei: Juni: | 0 | 0 |
| | | | | TW3 | 0 | Instansi Pemerintah | 0 | 100 | Juli : Agustus: September: | | |
| | | | | TW4 | 1 | Instansi Pemerintah | 1 | 100 | Oktober : November: Desember: Meningkatkan pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM | | |
| | | | | TW1 | 0 | Instansi Pemerintah | 0 | 100 | Januari : Februari: Maret: | | |
| 20 | 3 | <p>Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai :</p> | 3 Instansi Pemerintah: Triwulan IV | TW2 | 1 | Instansi Pemerintah | 1 | 100 | April : Mei: Juni: Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM | 0 | 0 |
| | | | | TW1 | 0 | Instansi Pemerintah | 0 | 100 | Januari : Februari: Maret: | | |

➤ Divisi Administrasi

TRIWULAN IV

SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI ADMINISTRASI

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------|
| KEPALA DIVISI ADMINISTRASI | | | | |
| 1 | Peningkatan kapasitas SDM Wilayah melalui implementasi Corporate University | | | |
| | B10 | - | - | - |
| | B11 | - | - | - |
| | B12 | Pelaksanaan workshop/sosialisasi/ bimtek Terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | Subbag Program dan Pelaporan | Data Dukung Sudah Diupload |
| 2 | Tersusunnya Best practice di Kantor Wilayah | | | |
| | B10 | - | - | - |
| | B11 | - | - | - |
| | B12 | Tersusunnya 2 (dua) best practice Kementerian Hukum dan HAM Corporate University dalam bidang Dukungan Manajemen dan Pelayanan Hukum dan HAM | Subbag Kepegawaian | Data Dukung Sudah Diupload |
| 3 | Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Inspektorat Jenderal) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | | | |
| | B10 | Monitoring dan percepatan TLHP BPK dan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal | Subbag Program dan Pelaporan | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | Monitoring dan percepatan TLHP BPK dan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal | Subbag Program dan Pelaporan | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | 1. Pelaksanaan percepatan TLHP BPK dan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal 2. Laporan Evaluasi | Subbag Program dan Pelaporan | Data Dukung Sudah Diupload |
| 4 | Penetapan status penggunaan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 80% | | | |
| | B10 | - | - | - |
| | B11 | - | - | - |
| | B12 | Melakukan pembaharuan data Penetapan Status Penggunaan BMN pada aplikasi SIMAN | Subbag Keu dan BMN | Data Dukung Sudah Diupload |
| 5 | Nilai Pengawasan Kearsipan Pengelolaan Arsip Dinamis 70 | | | |
| | B10 | Pelaksanaan Pengawasan Lapangan Pengelolaan Kearsipan dinamis (Arsip Aktif dan Inaktif) pada Unit Pelaksana Teknis | Subbag Kepegawaian | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | - | - | - |
| | B12 | Tercapainya Hasil Laporan Penilaian Indeks Pelaksanaan Pengawasan Lapangan Pengelolaan Kearsipan Dinamis (Arsip Aktif dan Inaktif) pada Kantor Wilayah | Subbag Kepegawaian | Data Dukung Sudah Diupload |
| 6 | Penerapan Protokol Kesehatan di Perkantoran dimasa Adaptasi Kebiasaan Baru, 0 orang terpapar covid | | | |
| | B10 | - | - | - |
| | B11 | - | - | - |

TRIWULAN IV

SUPERVISI DATA PENDUKUNG TARGET KINERJA TAHUN 2022 DIVISI ADMINISTRASI

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|-----------|---|---|-------------------------------------|----------------------------|
| | B12 | Monitoring status covid pegawai dan WBP serta Penanganan Pegawai dan WBP yang terpapar covid triwulan IV | Subbag Kepegawaian | Data Dukung Sudah Diupload |
| 7 | Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA dan SMART) Kantor Wilayah, 95 | | | |
| | B10 | Evaluasi nilai IKPA dan SMART Kantor Wilayah dan UPT Triwulan III | Subbag Keu dan Subbag P2L | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | - | - | - |
| | B12 | Evaluasi nilai IKPA dan SMART Kantor Wilayah dan UPT Triwulan IV | Subbag Keu dan BMN | Data Dukung Sudah Diupload |
| 8 | Penyelesaian Pengaduan pada Aplikasi LAPOR | | | |
| | B10 | Penyelesaian pengaduan pada aplikasi LAPOR! Tahun 2022 | Subbag Humas RB, TI | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | Penyelesaian pengaduan pada aplikasi LAPOR! Tahun 2022 | Subbag Humas RB, TI | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | 1. Penyelesaian pengaduan pada aplikasi LAPOR! 2. Evaluasi pelayanan pada UPT yang mendapat pengaduan aduan pada aplikasi LAPOR! Semester II | Subbag Humas RB, TI | Data Dukung Sudah Diupload |
| 9 | Pembinaan untuk Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | | | |
| | B10 | - | - | - |
| | B11 | Pelaksanaan Penilaian oleh Tim Penilai Internal | Subbag Humas RB, TI | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | Evaluasi Pelaksanaan SPIP Semester II | Subbag Humas RB, TI | Data Dukung Sudah Diupload |
| 10 | Pelaksanaan Manajemen Risiko | | | |
| | B10 | - | - | - |
| | B11 | - | - | - |
| | B12 | 1. Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Risiko Triwulan IV 2. Penyusunan Laporan Pengendalian Risiko Semester II | Subbag Humas RB, TI | Data Dukung Sudah Diupload |
| 11 | Tersusunnya LKIP Kantor Wilayah dan pelaporan e-performance tepat waktu | | | |
| | B10 | 1. Evaluasi capaian PK Kantor Wilayah dan UPT; 2. Pelaporan capaian Perjanjian Kinerja pada aplikasi e-performance | Subbag Program dan Pelaporan | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | Pelaporan capaian Perjanjian Kinerja pada aplikasi e-performance | Subbag Program dan Pelaporan | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | 1. Evaluasi capaian PK Kantor Wilayah dan UPT; 2. Pelaporan capaian Perjanjian Kinerja pada aplikasi e-performance | Subbag Program dan Pelaporan | Data Dukung Sudah Diupload |

➤ Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

TRIWULAN IV

SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|--|---|--|----------------------|----------------------------|
| KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM | | | | |
| 1 | 80% Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | | |
| | B10 | Terfasilitasinya rancangan peraturan daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah | Bidang Hukum | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | Terfasilitasinya rancangan peraturan daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah | Bidang Hukum | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | Terfasilitasinya rancangan peraturan daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah | Bidang Hukum | Data Dukung Sudah Diupload |
| 2 | 40 % Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia | | | |
| | B10 | Evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM B08 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota | Bidang HAM | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B12 | Bidang HAM | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | Pemantauan pelaporan Aksi HAM Daerah periode B12 | Bidang HAM | Data Dukung Sudah Diupload |
| 3 | 70% Desa/Kelurahan sadar hukum | | | |
| | B10 | Melakukan pembentukan dan pembinaan Desa/kelurahan binaan di masing-masing wilayah | Bidang Hukum | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | implementasi kuesioner indeks desa/kelurahan sadar hukum dalam Dimensi Implementasi Hukum, Dimensi Akses Keadilan dan Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi dan Penyusunan SK Desa/Kelurahan Binaan sadar hukum | Bidang Hukum | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | Menyusun Laporan capaian target pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di masing-masing wilayah dan rencana usulan target pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum tahun selanjutnya | Bidang Hukum | Data Dukung Sudah Diupload |
| 4 | Tersedianya rekomendasi hasil kajian/analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah | | | |
| | B10 | 1. Analisis data hasil survey online 3AS Triwulan III (Juli-September) 2. Data monitoring hasil Survei online IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Oktober | Bidang HAM | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | Data monitoring hasil Survei online IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan November | Bidang HAM | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | 1. Analisis data hasil survey online 3AS Triwulan IV (Oktober-November) 2. Evaluasi atas implementasi model intervensi | Bidang HAM | Data Dukung Sudah Diupload |
| 5 | Tersedianya rekomendasi hasil analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM guna | | | |

TRIWULAN IV

SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|---|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| mendukung pembuatan kebijakan di wilayah | | | | |
| | B10 | 1. Penyusunan inventarisasi dan identifikasi data pelayanan publik/permasalahan Hukum/permasalahan HAM sesuai aplikasi SIPKUMHAM 2. Pelaksanaan verifikasi pengumpulan data lapangan | Bidang HAM | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | 1. Pengolahan dan analisis data hasil verifikasi lapangan 2. Penyusunan draf laporan analisis kebijakan yang berisi rekomendasi 3. Pembahasan draf laporan analisis kebijakan dengan melibatkan stakeholders 4. Penyempurnaan laporan analisis kebijakan yang berisi rekomendasi | Bidang HAM | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | 1. Penginputan laporan analisis kebijakan pada aplikasi SIPKUMHAM 2. Penyampaian Laporan analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM kepada Kepala Kantor Wilayah 3. Rencana tindak lanjut rekomendasi hasil analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM | Bidang HAM | Data Dukung Sudah Diupload |
| 6 | Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM | | | |
| | B10 | Mengevaluasi Berita Acara Hasil Pemeriksaan | Bidang HAM | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | Koordinasi hasil penilaian kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM | Bidang HAM | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | Penyusunan Laporan Evaluasi KKP HAM | Bidang HAM | |
| 7 | Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM | | | |
| | B10 | Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Januari-September | Bidang HAM | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan III | Bidang HAM | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | 1. Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan III; 2. Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada tahun berjalan | Bidang HAM | Data Dukung Sudah Diupload |
| 8 | Tercapainya pelaksanaan Pengawas Wilayah dan Daerah terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah | | | |
| | B10 | Evaluasi atas Audit Pengawas Kepatuhan Penerapan PMPJ oleh Kanwil bersama Majelis Pengawas Notaris: • Kantor Wilayah wajib | Bidang Pelayanan Hukum | Data Dukung Sudah Diupload |

TRIWULAN IV

SUPERVISI DATA PENDUKUNG TARGET KINERJA TAHUN 2022 DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|-----------|--|--|------------------------|----------------------------|
| | | melaksanakan rapat internal untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, di mana evaluasi sekurang-kurangnya meliputi: o Capaian dari pelaksanaan pengawasan; o Tantangan / kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pengawasan, serta solusi yang diambil; o Rencana tindak lanjut atas pelaksanaan pengawasan tahun 2023.) | | |
| | B11 | - | - | - |
| | B12 | - | - | - |
| 9 | Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi layanan AHU di wilayah, (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Partai Politik, Perseroan Perorangan dan Apostille) | | | |
| | B10 | Diseminasi layanan Apostille | Bidang Pelayanan Hukum | DATA DUKUNG SUDAH DIUPLOAD |
| | B11 | Diseminasi layanan Apostille | Bidang Pelayanan Hukum | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | Evaluasi pelaksanaan diseminasi layanan AHU di wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Partai Politik, Perseroan Perorangan dan Apostille) | Bidang Pelayanan Hukum | Data Dukung Sudah Diupload |
| 10 | Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran 50% data PPNS melalui aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham | | | |
| | B10 | Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS | Bidang Pelayanan Hukum | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS | Bidang Pelayanan Hukum | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | Evaluasi Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS | Bidang Pelayanan Hukum | Data Dukung Sudah Diupload |
| 11 | Terlaksananya kegiatan-kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas permohonan bersama dengan stakeholder di wilayah | | | |
| | B10 | | | |
| | B11 | Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan implementasi moU/PKS atau penyusunan MoU/PKS baru 2021 | Bidang Pelayanan Hukum | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | Penyusunan rencana implementasi MoU/PKS untuk meningkatkan permohonan KI tahun 2023 | Bidang Pelayanan Hukum | Data Dukung Sudah Diupload |
| 12 | Peningkatan permohonan Indikasi Geografis melalui kerjasama dengan MPIG/Pemerintah Daerah/stakeholder terkait | | | |
| | B10 | Pelaksanaan penyusunan dokumen deskripsi IG (kelengkapan permohonan IG) | Bidang Pelayanan Hukum | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | • Pelaksanaan penyusunan dokumen deskripsi IG (kelengkapan permohonan IG); | Bidang Pelayanan Hukum | Data Dukung Sudah |

TRIWULAN IV

SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|-----------|---|--|------------------------|----------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan Subdit/ tim ahli IG terkait progres pengajuan permohonan | | Diupload |
| | B12 | Pengajuan permohonan IG | Bidang Pelayanan Hukum | Data Dukung Sudah Diupload |
| 13 | Mendorong pertumbuhan HKI di wilayah melalui pembangunan IP Clinic atau Mobile IP Clinic | | | |
| | B10 | <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan layanan HKI oleh tim IP Clinic atau MIC; Pelaksanaan edukasi/Sosialisasi/Diseminasi HKI kepada Masyarakat dengan narasumber TIM MIC (kegiatan diselenggarakan Kanwil/Pemda) | Bidang Pelayanan Hukum | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | - | - | - |
| | B12 | - | -- | - |
| 14 | Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual | | | |
| | B10 | <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan penyebaran Kuesioner terkait sertifikasi pusat perbelanja; Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan | Bidang Pelayanan Hukum | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan penyebaran Kuesioner terkait sertifikasi pusat perbelanja; Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan | Bidang Pelayanan Hukum | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan KI dan rencana kerja 2023 | Bidang Pelayanan Hukum | Data Dukung Sudah Diupload |

➤ **Divisi Pemasyarakatan**

TRIWULAN IV

SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI PEMASYARAKATAN

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|-------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|
| KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN | | | | |
| 1 | Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar, dengan terlaksananya deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas, Rutan dan LPKA | | | |
| | B10 | Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan membuat laporan kegiatan intel | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan membuat laporan kegiatan intel | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | 1. Pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan hasil Identifikasi Instrument deteksi Dini B09 2. Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan membuat laporan kegiatan intel | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| 2 | Seluruh Lapas, Rutan dan LPKA melaksanakan input data pada SDP Fitur Keamanan | | | |
| | B10 | Monitoring dan Evaluasi | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | Monitoring dan Evaluasi | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | Monitoring dan Evaluasi | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| 3 | Redistribusi pada UPT dengan tingkat overcrowding diatas 300% | | | |
| | B10 | Monitoring dan Evaluasi | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | Monitoring dan Evaluasi | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | Monitoring dan Evaluasi | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| 4 | Penerapan SPPT-TI pada 213 UPT Lapas/Rutan/Bapas Pilot Project | | | |
| | B10 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan/Download Data SPPT TI oleh UPT Pemasyarakatan melalui Aplikasi SDP | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan/Download Data SPPT TI oleh UPT Pemasyarakatan melalui Aplikasi SDP | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan/Download Data SPPT TI oleh UPT Pemasyarakatan melalui Aplikasi SDP | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| 5 | Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Narapidana | | | |
| | B10 | Supervisi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan oleh Tim Mentor Kantor Wilayah | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |

TRIWULAN IV

SUPERVISI DATA PENDUKUNG TARGET KINERJA TAHUN 2022 DIVISI PEMASYARAKATAN

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|----------|---|--|----------------------|----------------------------|
| | B11 | Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan (B01-B09) | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan (B01-B12) | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| 6 | 80% Narapidana memperoleh pendidikan vokasi bersertifikasi melalui pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa) | | | |
| | B10 | Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| 7 | 45% Narapidana memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berwirausaha 1. Pengembangan Lapas Produktif sesuai dengan kebutuhan Industri saat ini; 2. Pelaksanaan Pembinaan melalui Saran Asimilasi dan Edukasi (SAE) di wilayah | | | |
| | B10 | Monitoring dan Evaluasi | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | Monitoring dan Evaluasi | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | Monitoring dan Evaluasi | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| 8 | 65% Narapidana yang dinilai dengan menggunakan instrumen SPPN memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian | | | |
| | B10 | Pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | Pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | 1. Pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana; 2. Evaluasi pelaksanaan SPPN untuk mengetahui keberhasilan, hambatan dan tantangan di Lapas. | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| 9 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Basan Baran Di Rupbasan | | | |
| | B10 | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |

TRIWULAN IV

SUPERVISI DATA PENDUKUNG
TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIVISI PEMASYARAKATAN

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | KET |
|----|--|---|----------------------|----------------------------|
| 10 | Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa pada 10 kota: 1. Kota Banda Aceh, Aceh; 2. Kota Tanjung Pinang, Kepri; 3. Palembang, Sumsel; 4. Yogyakarta, DIY; 5. Tanjung Selor, Kalimantan Utara; 6. Kupang, NTT; 7. Kota Gorontalo, Gorontalo; 8. Kota Palu, Sulteng; 9. Ternate, Maluku utara; 10. Kota Jayapura, Papua. | | | |
| | B10 | Pelaksanaan Pedoman Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | Pelaksanaan Pedoman Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | Pelaksanaan Pedoman Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| 11 | Manajemen Mitigasi Bencana dalam rangka Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemasarakatan | | | |
| | B10 | Monitoring dan Evaluasi | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B11 | Monitoring dan Evaluasi | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |
| | B12 | Monitoring dan Evaluasi | Div PAS | Data Dukung Sudah Diupload |

➤ Divisi Keimigrasian

TRIWULAN I-IV

SUPERVISI DATA PENDUKUNG

TARGET KINERJA TAHUN 2022

DIVISI KEIMIGRASIAN

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PELAKSANAAN KEGIATAN | PENILAIAN | KET |
|-----------------------------------|---|--|--|------------|---|
| KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN | | | | | |
| 1 | Tersedianya data cekal di Divisi Keimigrasian dan Terselenggaranya Pengusulan Cekal yang cepat , tepat dan berbasis IT | | | | |
| | B02 | Uji Coba Aplikasi Cekal Online di satuan kerja | Bidang Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian | 100 | Data Dukung Lengkap |
| | B05 | Tersedianya data cekal di UPT | Bidang Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian | 100 | Data Dukung Lengkap |
| | B08 | Tersedianya data cekal di UPT | Bidang Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian | 95 | Keterangan Verifikator: belum ada dokumentasi kegiatan movev dari divisi |
| | B11 | 1. Inventarisasi permasalahan cekal online 2. Terselenggaranya Aplikasi Cekal Online 3. Usulan pengembangan aplikasi dan kebijakan | Bidang Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian | - | Data Dukung Sudah Diupload |
| 2 | Penegakan hukum berbasis SOPAP dan Regulasi | | | | |
| | B02 | Uji coba SOPAP penegakan hukum keimigrasian di UPT | Bidang Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian | 100 | Data Dukung Lengkap |
| | B05 | 1. Penerapan SOPAP 2. Database Penegakan Hukum | Bidang Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian | 100 | Data Dukung Lengkap |
| | B08 | 1. Penerapan SOPAP 2. Database Penegakan Hukum | Bidang Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian | 95 | Keterangan Verifikator: Rekapitulasi TAK Kanim Ternate belum ada |
| | B11 | Evaluasi SOPAP Penegakan Hukum Keimigrasian | Bidang Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian | - | Data Dukung Sudah Diupload |
| 3 | Implementasi Mobile Paspor | | | | |
| | B02 | 1. Penyusunan rencana kegiatan; 2. Sosialisasi layanan Mobile Paspor ke masyarakat, instansi pemerintah/BUMN/swasta/ komunitas | Bidang Perizinan Dan Informasi Keimigrasian | 100 | Data Dukung Lengkap |
| | B05 | 1. Melakukan sosialisasi layanan Mobile Paspor; 2. Melaksanakan Mobile Paspor | Bidang Perizinan Dan Informasi Keimigrasian | 100 | Data Dukung Lengkap |
| | B08 | 1. Melaksanakan kegiatan Mobile Paspor; 2. Melakukan monitoring kepada Unit Pelaksana Teknis implementasi Mobile Paspor | Bidang Perizinan Dan Informasi Keimigrasian | 95 | Keterangan Verifikator : Belum ada dokumentasi kegiatan movev oleh Divisi |
| | B11 | 1. Melaksanakan kegiatan Mobile Paspor; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan Mobile Paspor pada UPT | Bidang Perizinan Dan Informasi Keimigrasian | - | Data Dukung Sudah Diupload |

➤ Data Capaian Kinerja TW IV Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Maluku Utara

PENYERAPAN ANGGARAN
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
PER 26 DESEMBER 2022

| No | Kode Nama Satker | Pegawai | | | Barang | | | Modal | | | Total | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | Pagu | Real | % | Pagu | Real | % | Pagu | Real | % | Pagu | Real | Sisa | % |
| 1 | 632712 RUPBASAN TERNATE | 1.354.415.000 | 1.383.737.787 | 102,16% | 834.381.000 | 834.217.000 | 99,98% | 150.000.000 | 147.770.509 | 98,51% | 2.338.796.000 | 2.365.725.296 | 26.929.296 | 101,15% |
| 2 | 649029 BPHN | - | - | - | 949.655.000 | 948.644.180 | 99,89% | - | - | - | 949.655.000 | 948.644.180 | 1.010.820 | 99,89% |
| 3 | 649027 DITJEN PP | - | - | - | 217.000.000 | 215.810.000 | 99,45% | - | - | - | 217.000.000 | 215.810.000 | 1.190.000 | 99,45% |
| 4 | 649030 BALITBANGHAM | - | - | - | 182.131.000 | 181.094.360 | 99,43% | - | - | - | 182.131.000 | 181.094.360 | 1.036.640 | 99,43% |
| 5 | 649024 DITJEN PEMASYARAKATAN | - | - | - | 829.564.000 | 823.095.100 | 99,22% | - | - | - | 829.564.000 | 823.095.100 | 6.468.900 | 99,22% |
| 6 | 649025 DITJEN IMIGRASI | - | - | - | 1.462.670.000 | 1.451.018.170 | 99,20% | - | - | - | 1.462.670.000 | 1.451.018.170 | 11.651.830 | 99,20% |
| 7 | 649028 DITJEN HAM | - | - | - | 273.061.000 | 270.483.360 | 99,06% | - | - | - | 273.061.000 | 270.483.360 | 2.577.640 | 99,06% |
| 8 | 649023 DITJEN AHU | - | - | - | 2.031.284.000 | 2.008.199.920 | 98,86% | - | - | - | 2.031.284.000 | 2.008.199.920 | 23.084.080 | 98,86% |
| 9 | 649026 DITJEN KI | - | - | - | 913.609.000 | 903.031.988 | 98,84% | - | - | - | 913.609.000 | 903.031.988 | 10.577.012 | 98,84% |
| 10 | 531891 RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU | 2.443.991.000 | 2.389.487.999 | 97,77% | 1.559.498.000 | 1.556.932.512 | 99,84% | 150.000.000 | 149.859.000 | 99,91% | 4.153.489.000 | 4.096.279.511 | 57.209.489 | 98,62% |
| 11 | 662968 KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO | 1.528.965.000 | 1.506.524.867 | 98,53% | 3.782.918.000 | 3.757.887.712 | 99,34% | 661.200.000 | 626.293.700 | 94,72% | 5.973.083.000 | 5.890.706.279 | 82.376.721 | 98,62% |
| 12 | 352614 LPKA TERNATE | 3.759.315.000 | 3.684.901.017 | 98,02% | 1.489.284.000 | 1.485.553.556 | 99,75% | 150.000.000 | 149.800.000 | 99,87% | 5.398.599.000 | 5.320.254.573 | 78.344.427 | 98,55% |
| 13 | 480505 KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE | 3.041.760.000 | 3.028.260.379 | 99,56% | 5.700.213.000 | 5.532.379.049 | 97,06% | 1.399.631.000 | 1.374.147.084 | 98,18% | 10.141.604.000 | 9.934.786.512 | 206.817.488 | 97,96% |
| 14 | 407503 LAPAS KELAS III LABUHA | 1.761.309.000 | 1.928.477.937 | 109,49% | 1.990.734.000 | 1.737.370.354 | 87,27% | 150.000.000 | 149.464.235 | 99,64% | 3.902.043.000 | 3.815.312.526 | 86.730.474 | 97,78% |
| 15 | 649022 SETJEN | 7.106.532.000 | 6.994.498.565 | 98,42% | 5.195.401.000 | 4.955.466.489 | 95,38% | - | - | - | 12.301.933.000 | 11.949.945.054 | 351.987.946 | 97,14% |
| 16 | 632047 BAPAS KELAS II TIDORE | 1.272.684.000 | 1.244.229.530 | 97,76% | 1.241.535.000 | 1.192.566.315 | 96,06% | 150.000.000 | 149.734.881 | 99,82% | 2.664.219.000 | 2.586.527.726 | 77.691.274 | 97,08% |
| 17 | 497840 LEMBAGA PEMASYARAKATAN JALOLO | 2.751.243.000 | 2.694.446.577 | 97,94% | 1.741.298.000 | 1.642.612.566 | 94,33% | 150.000.000 | 149.796.044 | 99,86% | 4.642.541.000 | 4.486.855.187 | 155.685.813 | 96,65% |
| 18 | 407499 RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE | 3.518.990.000 | 3.443.969.594 | 97,87% | 2.548.413.000 | 2.322.874.440 | 91,15% | 145.765.000 | 145.485.936 | 99,81% | 6.213.168.000 | 5.912.329.970 | 300.838.030 | 95,16% |
| 19 | 109152 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELO | 3.365.632.000 | 3.302.357.661 | 98,12% | 2.583.506.000 | 2.350.024.915 | 90,96% | 150.000.000 | 148.973.612 | 99,32% | 6.099.138.000 | 5.801.356.188 | 297.781.812 | 95,12% |
| 20 | 652827 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE | 3.732.598.000 | 3.652.438.250 | 97,85% | 4.508.590.000 | 4.107.227.480 | 91,10% | 130.000.000 | 125.367.016 | 96,44% | 8.371.188.000 | 7.885.032.746 | 486.155.254 | 94,19% |
| 21 | 684003 RUTAN WEDA | 1.512.514.000 | 1.432.795.356 | 94,73% | 1.268.187.000 | 1.172.607.323 | 92,46% | 150.000.000 | 149.422.500 | 99,62% | 2.930.701.000 | 2.754.825.179 | 175.875.821 | 94,00% |
| 22 | 109153 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA | 3.420.380.000 | 3.340.343.198 | 97,66% | 2.410.699.000 | 2.118.696.929 | 87,89% | 150.000.000 | 148.976.800 | 99,32% | 5.981.079.000 | 5.608.016.927 | 373.062.073 | 93,76% |
| 23 | 418350 LAPAS PEREMPUN TERNATE | 2.992.801.000 | 2.940.415.548 | 98,25% | 1.495.018.000 | 1.377.415.637 | 92,13% | 5.916.050.000 | 5.411.905.462 | 91,48% | 10.403.869.000 | 9.729.736.647 | 674.132.353 | 93,52% |
| 24 | 626161 BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE | 2.498.234.000 | 2.321.892.888 | 92,94% | 1.352.987.000 | 1.257.735.600 | 92,96% | 150.000.000 | 147.720.480 | 98,48% | 4.001.221.000 | 3.727.348.968 | 273.872.032 | 93,16% |
| TOTAL | | 46.061.363.000 | 45.288.777.153 | 98,32% | 46.561.636.000 | 44.202.921.955 | 94,93% | 9.752.646.000 | 9.174.717.259 | 94,07% | 102.375.645.000 | 98.666.416.367 | 3.709.228.633 | 96,38% |

sumber : <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

26 Desember 2022 pukul 09.19 WIT

D. Simpulan dan Saran

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja melalui Aplikasi E-Performance serta pelaksanaan Target Kinerja B12 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah dilaksanakan 100%. Penyampaian Data Dukung seluruh satuan kerja telah terupload pada aplikasi Target Kinerja Kemenkumham. Kantor Wilayah beserta jajaran terus berkomitmen melaksanakan semua target kinerja yang telah ditentukan oleh masing masing unit eselon I dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH.1.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022. Hal tersebut merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan Anggaran lewat Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Tahun Anggaran 2022 Kantor wilayah secara keseluruhan tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya walaupun mengalami keterlambatan dalam pengesahan yang di lakukan oleh masih masing unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM. Hanya saja ada pembaharuan dalam penyampaian data dukung pelaporan pada aplikasi Target Kinerja Kemenkumham, dimana penyampaian data dukung laporan harus di sampaikan setiap bulannya, akan tetapi tetap mengikuti matriks Target Kinerja yang sudah disampaikan. Pelaksaaan target kinerja di lingkungan Kantor Wilayah mengingat ada beberapa target kinerja yang bekerja sama dengan pemerintah daerah atau kabupaten, pelaksanaannya sewaktu waktu dapat berubah dengan mempertimbangkan kondisi alam, mengingat secara geografis Provinsi Maluku Utara terdiri beberapa kepulauan sehingga faktor alam bisa menjadi kendala atau penghambat pemenuhan target kinerja yang telah disusun

pelaksanaannya. Pada TW IV kantor wilayah tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan target kinerja, dengan didukung SDM yang memadai juga didukung dengan faktor alam yakni cuaca yang mendukung dalam pelaksanaan terget kinerja pada TW IV.

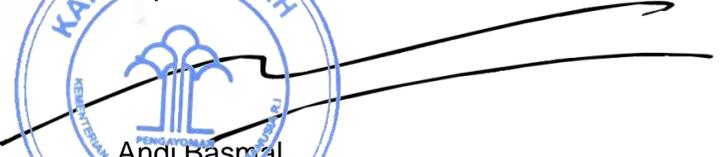
Dari beberapa faktor diatas kantor wilayah tetap berupaya untuk dapat melaksanakan target kinerja yang telah ditentukan dengan, melaksanakan kegiatan yang sudah di rencanakan baik secara luring maupun daring melihat situasi dan kondisi khususnya apabila pelaksanaan kegiatan yang harus kerkoordinasi dengan pemerintah daerah apabila terkendala dengan faktor alam (cuaca) dapat dilaksanakan secara daring atau virtual. Dengan tidak mengurangi manfaat yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah Kerja Provinsi Maluku Utara.

E. Penutup

Capaian Perjanjian Kinerja dan Capaian Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada Triwulan IV B12 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan Matriks Target Kinerja. Pelaksanaan Target Kinerja pada masing masing satuan kerja juga telah sesuai. Mulai dari tahapan kegiatan sampai dengan output / data dukung yang dihasilkan. Secara keseluruhantim evaluasi capaian target kinerja pada TW IV di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tidak menemukan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pemenuhan Target kinerja B12. Semuanya berjalan sesuai Disbursement Plan dan Rencana Kerja Tahun 2022 (Renja) yang telah disusun pada awal tahun 2022. Untuk pelaporan pada Triwulan ke IV B12 Kantor wilayah dan jajaran tetap berkomitmen dapat melaksanakan Target Kinerja dan memaksimalkan penyerapan anggaran sehingga Kinerja Kantor Wilayah Maluku Utara berkontribusi yang positif dalam pelaksanaan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Demikian Laporan Evaluasi Capaian Target Kinerja Triwulan IV B12 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Kepala kantor Wilayah dan Menteri

Ternate, 28 Desember 2022
Kepala Divisi Administrasi



Andi Basrial
NIP. 197202151992031002



LAMPIRAN DOKUMENTASI RAPAT MONITORING DAN HASIL EVALUASI PERJANJIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA TRIWULAN IV (B12)









LAPORAN EVALUASI CAPAIAN TARGET KINERJA TRIWULAN I (B03)



**REFORMASI
HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA**

Jln Cengkeh Afo No 40 Ternate
Tlp: +62.921 3122119 – 31328194 Fax: +62.921 3122118
<https://malut.kemenkumham.go.id>

4 April 2022

Nomor : W.29.PR.04.03 -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Pelaporan Capaian Kinerja Triwulan I
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2022

Yth. Kepala Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
di –
Jakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor SEK.1-PR.04.03-90 Tanggal 30 Maret 2022 hal Penyampaian Pelaporan Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan laporan evaluasi capaian kinerja triwulan I pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tahun 2022 (terlampir)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

M Adnan

Nip. 196507091986031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.



**LAPORAN EVALUASI CAPAIAN TARGET KINERJA TRIWULAN I (B03)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

I. PENDAHULUAN

- Umum

Salah satu strategi untuk peningkatan kinerja secara terstruktur dan berjenjang adalah dengan melaksanakan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.HH-1.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022. Target kinerja dilaksanakan dengan merujuk kepada target-target yang harus diselesaikan Kementerian Hukum dan HAM sepanjang tahun 2022 yang termaktub dalam RPJMN, Renstra dan RKP Tahun 2022. Target Kinerja ini juga merupakan hasil kolaborasi pemikiran dari para Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri bersamaan seluruh Pimpinan Unit Eselon I. Kantor wilayah pada tahun 2022 memiliki 39 target kinerja dan total anggaran sebesar Rp.98.467.785.000.- (Sembilan puluh delapan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pelaksanaan kinerja anggaran dibuat berdasarkan perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga, juga sebagai penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana kerja kementerian/lembaga dalam satu tahun anggaran Dibagi menjadi 4 (empat) triwulan B03, B06, B09 dan B12 dengan target penyerapan di masing masing triwulan sesuai dengan surat Sekertariat Jenderal Nomor : SEK.PR.01.04-68 tentang Penyampaian Pagu Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM TA 2022. Dengan target Disbursement Plan Rencana Penarikan dana setiap Triwulan adalah TW I : 25% , TW II : 50% , TW III : 80% dan TW IV : 100% dengan berdasarkan ketentuan tersebut diatas Kementrian Hukum dan HAM telah mencapai target pada TW I (B03) sebesar 18.82 % dengan deviasi 6.18% dari target 25% yang ditargetkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan ada beberapa satuan kerja menggunakan PNBPN, hal tersebut menyebabkan penyesuaian dengan penerimaan PNBPN sehingga ada beberapa satuan kerja yang tidak mencapai target 25%. Namun demikian target kinerja pada pelaporan TW I B03, satuan kerja sudah menyampaikan pelaporan pada aplikasi Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM dengan penyampaian pelaporan 100%.

II. CAPAIAN TARGET KINERJA TRIWULAN I (B03)

Merujuk Surat Sekertariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.PR.01.03 - 21 tanggal 18 Februari 2022 Prihal : Penyampaian Target Kinerja. Kepala Kantor Wilayah mengeluarkan Nota Dinas Nomor : W. 29.PR.05.04-1311 Prihal : Laporan Target Kinerja Bulan ke 3 (tiga) B03. Progres pelaksanaan target kinerja B01, B02 dan B03 pada website www.kinerja.kemenkumham.go.id dengan capaian target kinerja sebagai berikut :

- ✓ **Divisi Administrasi** telah melaksanakan 100% target kinerja di B01 s/d B03 dan telah melakukan upload data ke website tarja.
- ✓ **Divisi Pelayanan Hukum dan HAM** telah melaksanakan 100% target kinerja di B01 s/d B03 dan telah melakukan upload data ke website tarja.
- ✓ **Divisi Pemasyarakatan** telah melaksanakan 100% target kinerja di B01 s/d B03 dan telah melakukan upload data ke website tarja.
- ✓ **Divisi Keimigrasian** telah melaksanakan 100% target kinerja di B02 dan telah melakukan upload data ke website tarja. Mengingat Target kinerja Divisi Keimigrasian dilaporkan pada B05 mengikuti dengan target kinerja yang telah ditentukan oleh Eselon I Keimigrasian.

Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM di lingkungan Kantor Wilayah Maluku Utara pada TW I B01, B02 dan B03 telah dilaksanakan dan dilaporkan sesuai dengan Target Kinerja yang telah disusun oleh Kementerian. Tim Evaluasi kantor wilayah Maluku Utara melakukan rapat evaluasi capaian target kinerja berdasarkan data dukung yang telah di laporkan melauai aplikasi Target Kinerja Kemenkumham dengan rincian data sebagai berikut:

➤ Divisi Administrasi

SUPERVISI DATA PENDUKUNG TARGET KINERJA TAHUN 2022 5 April 2022 Pukul 08:00 WIT

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PENANGGUNG JAWAB | KETERANGAN |
|--|----------------|--|-----------------------|----------------|
| KEPALA DIVISI ADMINISTRASI | | | | |
| Peningkatan kapasitas SDM Wilayah melalui implementasi Corporate University | | | | |
| 1 | B03 | Pelaksanaan workshop/sosialisasi/bimtek terkait Zona Integritas | Kepegawaian dan Humas | Sudah Diupload |
| Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Inspektorat Jenderal) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | | | | |
| 2 | B01 | Inventarisasi data temuan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal. | Program dan Pelaporan | Sudah Diupload |
| 3 | B02 | Monitoring dan percepatan TLHP BPK dan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal | Program dan Pelaporan | Sudah Diupload |
| 4 | B03 | Pelaksanaan percepatan TLHP BPK dan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal. | Program dan Pelaporan | Sudah Diupload |

| | | | | |
|---|-----|---|--------------------------------|----------------|
| Penetapan status penggunaan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 80% | | | | |
| 5 | B01 | Evaluasi inventarisasi data penggunaan BMN berdasarkan aplikasi SIMAN pada kanwil Tahun 2021 | Keuangan dan BMN | Sudah Diupload |
| Nilai Pengawasan Kearsipan Pengelolaan Arsip Dinamis 70 | | | | |
| 6 | B01 | Pembentukan SK TIM | Kepegawaian | Sudah Diupload |
| 7 | B02 | Melakukan Sosialisasi Tata Kelola Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kantor Wilayah | Kepegawaian | Sudah Diupload |
| Penerapan Protokol Kesehatan di Perkantoran dimasa Adaptasi Kebiasaan Baru, 0 orang terpapar covid | | | | |
| 8 | B01 | 1. Evaluasi status covid 2021 2. Monitoring status covid pegawai dan WBP | Kepegawaian | Sudah Diupload |
| 9 | B02 | 1. Monitoring penerapan Prokes pada pelayanan di Unit Pelayanan Teknis; 2. Monitoring status covid pegawai dan WBP | Kepegawaian | Sudah Diupload |
| 10 | B03 | Monitoring status covid pegawai dan WBP serta Penanganan Pegawai dan WBP yang terpapar covid triwulan I | Kepegawaian | Sudah Diupload |
| Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA dan SMART) Kantor Wilayah, 95 | | | | |
| 11 | B01 | Evaluasi nilai IKPA dan SMART Kantor Wilayah dan UPT Tahun 2021 | Keuangan dan Program Pelaporan | Sudah Diupload |
| Penyelesaian Pengaduan pada Aplikasi LAPOR | | | | |
| 12 | B01 | Evaluasi pelayanan pada UPT yang mendapat pengaduan aduan pada aplikasi LAPOR! Tahun 2021 | Humas | Sudah Diupload |
| 13 | B02 | Penyelesaian pengaduan pada aplikasi LAPOR! Tahun 2022 | Humas | Sudah Diupload |
| 14 | B03 | Penyelesaian pengaduan pada aplikasi LAPOR! Tahun 2022 | Humas | Sudah Diupload |
| Pembinaan untuk Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | | | | |
| 15 | B03 | Evaluasi Triwulan Pelaksanaan SPIP | HUMAS | Sudah Diupload |
| Pelaksanaan Manajemen Risiko | | | | |
| 16 | B01 | 1. Penyusunan SK Unit Pemilik Risiko (UPR) 2. Penyusunan Matriks Manajemen Risiko | Humas | Sudah Diupload |
| 17 | B03 | Pelaksanaan Pengendalian Risiko Triwulan I | Humas | Sudah Diupload |
| Tersusunnya LKIP Kantor Wilayah dan laporan e-performance tepat waktu | | | | |
| 18 | B01 | 1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kantor | | Sudah Diupload |

➤ **Divisi Pelayanan Hukum dan HAM**

SUPERVISI DATA PENDUKUNG TARGET KINERJA TAHUN 2022
5 April 2022 Pukul 08:00 WIT

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PENANGGUNG JAWAB | KETERANGAN |
|---|----------------|--|------------------|----------------|
| KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM | | | | |
| 80% Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | | | |
| 1 | B01 | Pembentukan SK TIM | Bidang Hukum | Sudah Diupload |
| 2 | B02 | Terlaksananya kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota | Bidang Hukum | Sudah Diupload |
| 3 | B03 | Terlaksananya kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota | Bidang Hukum | Sudah Diupload |
| 40 % Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia | | | | |
| 4 | B01 | Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait | Bidang HAM | Sudah Diupload |
| 5 | B02 | 1. Evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM 2021 Provinsi, Kabupaten/Kota 2. Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait | Bidang HAM | Sudah Diupload |
| 6 | B03 | Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait | Bidang HAM | Sudah Diupload |

| 70% Desa/Kelurahan sadar hukum | | | | |
|---|-----|--|--------------|----------------|
| 7 | B02 | pengecekan kesesuaian data DSH yang disampaikan oleh BPHN dengan Data yang ada di Wilayah | Bidang Hukum | Sudah Diupload |
| 8 | B03 | evaluasi DSH secara administratif (apakah desa masih ada atau tidak atau masih tercatat pada administratif pemerintahan) Tahap I | Bidang Hukum | Sudah Diupload |
| Tersedianya rekomendasi hasil kajian/analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah | | | | |
| 9 | B01 | 1. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks integritas Organisasi 2. Data monitoring hasil Survei online IPK-IKM serta Indeks Integritas | Bidang HAM | Sudah Diupload |
| 10 | B02 | 1. Penyusunan Proposal Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas 2. Persetujuan Proposal Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah 3. Data monitoring hasil Survei online IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Februari | Bidang HAM | Sudah Diupload |
| 11 | B03 | 1. Presentasi Proposal Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas 2. Pelaksanaan verifikasi lapangan evaluasi hasil survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi 3. Data monitoring hasil Survei online IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Maret | Bidang HAM | Sudah Diupload |
| Tersedianya rekomendasi hasil analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM guna mendukung pembuatan kebijakan di wilayah | | | | |
| 12 | B01 | 1. Pembentukan SK Tim Analisis Kebijakan | Bidang HAM | Sudah Diupload |
| | | 2. Penyusunan inventarisasi dan identifikasi data pelayanan publik/permasalahan Hukum/permasalahan HAM sesuai aplikasi SIPKUMHAM | | |
| 13 | B02 | 1. Pelaksanaan verifikasi pengumpulan data lapangan 2. Pengolahan dan analisis data hasil verifikasi lapangan | Bidang HAM | Sudah Diupload |
| 14 | B03 | 1. Pembahasan draf laporan analisis kebijakan yang berisi rekomendasi 2. Penyempurnaan laporan analisis kebijakan yang berisi rekomendasi 3. Penginputan laporan analisis kebijakan pada aplikasi SIPKUMHAM 4. Penyampaian Laporan analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM kepada Kepala Kantor Wilayah | Bidang HAM | Sudah Diupload |
| Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM | | | | |
| 15 | B01 | Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Permenkumham No. 22 tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada pemerintah daerah | Bidang HAM | Sudah Diupload |
| 16 | B02 | Rapat persiapan penginputan laporan KKP HAM | | Sudah Diupload |
| 17 | B03 | Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Permenkumham No. 22 tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada pemerintah daerah | Bidang HAM | Sudah Diupload |

| | | | | |
|----|---|---|------------------------|----------------|
| | Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM | | | |
| 18 | B01 | Evaluasi dugaan pelanggaran /permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya | Bidang HAM | Sudah Diupload |
| 19 | B02 | Tindak lanjut dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya | Bidang HAM | Sudah Diupload |
| 20 | B03 | Tindak lanjut dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya | Bidang HAM | Sudah Diupload |
| | Tercapainya pelaksanaan Pengawas Wilayah dan Daerah terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah | | | |
| 21 | B01 | Pembentukan SK TIM | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diupload |
| 22 | B02 | Koordinasi awal untuk pemetaan pengawasan terkait penerapan PMPJ oleh Notaris di Wilayah | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diupload |
| 23 | B03 | Sosialisasi pemahaman audit kepatuhan secara teknis kepada Tim Audit Pengawas Kepatuhan yang telah dibentuk | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diupload |
| | Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi layanan AHU di wilayah, (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Partai Politik, Perseroan Perorangan dan Apostille) | | | |
| 24 | B01 | Pembentukan SK TIM | Bidang | Sudah Diupload |

| | | | | |
|----|--|--|------------------------|----------------|
| 25 | B02 | Persiapan dan koordinasi awal Diseminasi layanan AHU di wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Partai Politik, Perseroan Perorangan dan Apostille) | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diupload |
| 26 | B03 | Persiapan dan koordinasi awal Diseminasi layanan AHU di wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Partai Politik, Perseroan Perorangan dan Apostille) | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diupload |
| | Terlaksananya kegiatan-kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas permohonan bersama dengan stakeholder di wilayah | | | |
| 27 | B02 | Penyusunan evaluasi MoU/PKS 2021 dan rencana kerja implementasi MoU/PKS Kanwil dengan Mitra/Stakeholder tahun 2022 | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diupload |
| 28 | B03 | Persiapan pelaksanaan edukasi/Sosialisasi/Diseminasi/Webinar dll terkait dengan Tahun Cipta dan POP HC dikaitkan dengan tema IP Youth kepada stakeholder (akademisi, mahasiswa, siswa/siswi sekolah, penggiat seni, dll) | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diupload |
| | Peningkatan permohonan Indikasi Geografis melalui kerjasama dengan MPIG/Pemerintah Daerah/stakeholder terkait | | | |
| 29 | B01 | Penyusunan rencana kerja sama mendorong permohonan IG tahun 2022 | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diupload |
| 30 | B02 | Koordinasi dengan mitra/stakeholder (MPIG/Pemda) terkait rencana penyusunan permohonan Indikasi Geografis | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diupload |
| 31 | B03 | Koordinasi dengan Subdit IG DJKI terkait rencana pengajuan IG di wilayah (dapat melalui daring) | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diupload |
| | Mendorong pertumbuhan HKI di wilayah melalui pembangunan IP Clinic atau Mobile IP Clinic | | | |
| 32 | B02 | Kanwil mengikuti koordinasi konsep pelaksanaan IP Clinic atau Mobile IP Clinic oleh DJKI; - Penyusunan rencana target pelaksanaan IP Clinic/Mobile IP Clinic | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diupload |
| 33 | B03 | Koordinasi dengan Pemda Provinsi/Kota/Kab - pelaksanaan IP Clinic atau MIC terkait persiapan sarana prasarana layanan HKI; - Edukasi/Sosialisasi/Diseminasi KI | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diupload |

| | | | | |
|---|-----|---|------------------------|----------------|
| Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual | | | | |
| 34 | B01 | Menginventarisir pusat perbelanjaan dalam perencanaan sertifikasi pusat perbelanjaan/ stakeholder berbasis KI | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diupload |
| 35 | B02 | Pelaksanaan koordinasi melalui penyusunan konsep sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI dengan DJKI | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diupload |
| 36 | B03 | Pelaksanaan penyebaran Kuesioner terkait sertifikasi pusat perbelanja; - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner | Bidang Pelayanan Hukum | Sudah Diupload |

➤ **Divisi Pemasyarakatan**

SUPERVISI DATA PENDUKUNG TARGET KINERJA TAHUN 2022
5 April 2022 Pukul 08:00 WIT

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PENANGGUNG JAWAB | KETERANGAN |
|---|----------------|--|------------------|----------------|
| KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN | | | | |
| Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar, dengan terlaksananya deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas, Rutan dan LPKA | | | | |
| 1 | B01 | Pembentukan UIP pada setiap Kantor wilayah | Div PAS | Sudah Diupload |
| 2 | B02 | 1. Pembentukan UIP pada setiap Kantor wilayah 2. Profiling Unit Pelaksana Teknis pada setiap Kantor Wilayah | Div PAS | Sudah Diupload |
| 3 | B03 | 1. Konsultasi teknis terkait pembentukan UIP pada seluruh Kanwil di Indonesia 2. Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan membuat laporan kegiatan intelijen | Div PAS | Sudah Diupload |
| Seluruh Lapas, Rutan dan LPKA melaksanakan input data pada SDP Fitur Keamanan | | | | |
| 4 | B01 | 1. Sosialisasi dan internalisasi target capaian ke Lapas, Rutan dan LPKA di wilayahnya 2. Pembentukan Operator SDP tingkat wilayah dan UPT | Div PAS | Sudah Diupload |
| 5 | B02 | 1. Sosialisasi dan internalisasi target capaian ke Lapas, Rutan dan LPKA di wilayahnya 2. Pembentukan Operator SDP tingkat wilayah dan UPT | Div PAS | Sudah Diupload |
| 6 | B03 | Konsultasi teknis terkait penginputan SDP Fitur Keamanan | Div PAS | Sudah Diupload |
| Redistribusi pada UPT dengan tingkat overcrowding diatas 300% | | | | |
| 7 | B01 | Pembentukan SK TIM | Div PAS | Sudah Diupload |
| 8 | B02 | Pemetaan UPT dengan jumlah over crowding di atas 300 % | Div PAS | Sudah Diupload |
| 9 | B03 | Pemetaan UPT dengan jumlah over crowding di atas 300 % | Div PAS | Sudah Diupload |
| Penerapan SPPT-TI pada 213 UPT Lapas/Rutan/Bapas Pilot Project | | | | |
| 10 | B01 | 1. Pembentukan Tim Evaluasi SPPT TI Wilayah Tahun 2022; 2. Penetapan UPT Pelaksana Implementasi SPPT TI Tahun 2022 | Div PAS | Sudah Diupload |
| 11 | B02 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download Data SPPT TI oleh UPT Pemasyarakatan melalui Aplikasi SDP | Div PAS | Sudah Diupload |
| 12 | B03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan/Download Data SPPT TI oleh UPT Pemasyarakatan melalui Aplikasi SDP | Div PAS | Sudah Diupload |
| Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Narapidana | | | | |
| 13 | B01 | Penguatan Tim Mentor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (perubahan SK Tim Mentor bila dibutuhkan) | Div PAS | Sudah Diupload |
| 14 | B02 | Koordinasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Tahun 2022 kepada para pihak eksternal dalam mendukung penyelenggaraan layanan rehabilitasi di UPT Pemasyarakatan | Div PAS | Sudah Diupload |
| 15 | B03 | Mentoring kepada UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan oleh Tim Mentor Kantor Wilayah | Div PAS | Sudah Diupload |

SUPERVISI DATA PENDUKUNG TARGET KINERJA TAHUN 2022
5 April 2022 Pukul 08:00 WIT

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PENANGGUNG JAWAB | KETERANGAN |
|----|--|---|--------------------------------|----------------|
| | 80% Narapidana memperoleh pendidikan vokasi bersertifikasi (agribisnis, manufaktur dan jasa) | | melalui pelatihan keterampilan | |
| 16 | B01 | Pembentukan SK TIM | Div PAS | Sudah Diupload |
| 17 | B02 | Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia | Div PAS | Sudah Diupload |
| 18 | B03 | Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia | Div PAS | Sudah Diupload |
| | 45% Narapidana memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berwirausaha 1. Pengembangan Lapas Produktif sesuai dengan kebutuhan Industri saat ini; 2. Pelaksanaan Pembinaan melalui Saran Asimilasi dan Edukasi (SAE) di wilayah | | | |
| 19 | B01 | Pembentukan Sk TIM | Div PAS | Sudah Diupload |
| 20 | B02 | 1. Implementasi Lapas Produktif; 2. Implementasi Pelaksanaan pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi | Div PAS | Sudah Diupload |
| 21 | B03 | 1. Implementasi Lapas Produktif; 2. Implementasi Pelaksanaan pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi | Div PAS | Sudah Diupload |
| | 65% Narapidana yang dinilai dengan menggunakan instrumen SPPN memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian | | | |
| 22 | B02 | 1. Penetapan wali pada setiap lapas untuk melakukan penilaian pembinaan narapidana; 2. Pelaksanaan sosialisasi di wilayah tentang SPPN dan instrumen penilaian pembinaan narapidana. | Div PAS | Sudah Diupload |
| 23 | B03 | 1. Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas Lapas dalam pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana dengan menggunakan instrumen SPPN; 2. Pembentukan help-desk wilayah tentang SPPN dan instrumen penilaian pembinaan narapidana. | Div PAS | Sudah Diupload |
| | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Basan Baran Di Rupbasan | | | |
| 24 | B01 | Sosialisasi Tugas dan Fungsi Rupbasan kepada APH lainnya | Div PAS | Sudah Diupload |
| 25 | B02 | Sosialisasi Tugas dan Fungsi Rupbasan kepada APH lainnya | Div PAS | Sudah Diupload |
| 26 | B03 | Sosialisasi Tugas dan Fungsi Rupbasan kepada APH lainnya | Div PAS | Sudah Diupload |
| | Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa pada 10 kota: 1. Kota Banda Aceh, Aceh; 2. Kota Tanjung Pinang, Kepri; 3. Palembang, Sumsel; 4. Yogyakarta, DIY; 5. Tanjung Selor, Kalimantan Utara; 6. Kupang, NTT; 7. Kota Gorontalo, Gorontalo; 8. Kota Palu, Sulteng; 9. Ternate, Maluku utara; 10. Kota Jayapura, Papua. | | | |
| 27 | B01 | Konsultasi Teknis Online Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa | Div PAS | Sudah Diupload |
| 28 | B02 | Pembentukan Tim Pelaksana Sosialisasi dan Koordinasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan | Div PAS | Sudah Diupload |
| 29 | B03 | Pelaksanaan Kunjungan Koordinasi Tim Pelaksana Sosialisasi dan Koordinasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan ke Kepala Kepolisian Resor, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri | Div PAS | Sudah Diupload |

➤ Divisi Keimigrasian

SUPERVISI DATA PENDUKUNG TARGET KINERJA TAHUN 2022

| NO | TARGET KINERJA | DATA DUKUNG ACTION PLAN | PENANGGUNG JAWAB | KETERANGAN |
|--|----------------|---|------------------|----------------|
| DIVISI KEIMIGRASIAN | | | | |
| Tersedianya data cekal di Divisi Keimigrasian dan Terselenggaranya Pengusulan Cekal yang cepat, tepat dan berbasis IT | | | | |
| 1 | B02 | Uji Coba Aplikasi Cekal Online di satuan kerja | Div IM | Sudah Diupload |
| Penegakan hukum berbasis SOPAP dan Regulasi | | | | |
| 2 | B02 | Uji coba SOPAP penegakan hukum keimigrasian di UPT | Div IM | Sudah Diupload |
| Implementasi Mobile Paspor | | | | |
| 3 | B02 | 1. Penyusunan rencana kegiatan; 2. Sosialisasi layanan Mobile Paspor ke masyarakat, instansi pemerintah/BUMN/swasta/ komunitas | Div IM | Sudah Diupload |

➤ Data Capaian Kinerja TW I Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

PENYERAPAN ANGGARAN
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
PER 31 MARET 2022

| No | Kode Nama Satker | Pegawal | | | Barang | | | Modal | | | Total | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | Pagu | Real | % | Pagu | Real | % | Pagu | Real | % | Pagu | Real | Sisa | % |
| 1 | 649028 KANWIL MALUKU UTARA (HAM) | - | - | - | 273.061.000 | 75.210.000 | 27,54% | - | - | - | 273.061.000 | 75.210.000 | 197.851.000 | 27,54% |
| 2 | 632712 RUPBASAN TERNATE | 1.187.415.000 | 320.339.143 | 26,98% | 834.381.000 | 252.425.000 | 30,25% | 150.000.000 | - | 0,00% | 2.171.796.000 | 572.764.143 | 1.599.031.857 | 26,37% |
| 3 | 649030 KANWIL MALUKU UTARA (BALITBANG) | - | - | - | 235.670.000 | 61.463.450 | 26,08% | - | - | - | 235.670.000 | 61.463.450 | 174.206.550 | 26,08% |
| 4 | 497840 LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO | 1.770.543.000 | 472.505.846 | 26,69% | 1.826.908.000 | 314.720.256 | 17,23% | 150.000.000 | 149.796.044 | 99,86% | 3.747.451.000 | 937.022.146 | 2.810.428.854 | 25,00% |
| 5 | 352614 LPKA TERNATE | 2.639.715.000 | 594.403.291 | 22,52% | 1.507.204.000 | 314.713.438 | 20,88% | 150.000.000 | 149.800.000 | 99,87% | 4.296.919.000 | 1.058.916.729 | 3.238.002.271 | 24,64% |
| 6 | 649026 KANWIL MALUKU UTARA (KI) | - | - | - | 913.609.000 | 222.217.600 | 24,32% | - | - | - | 913.609.000 | 222.217.600 | 691.391.400 | 24,32% |
| 7 | 649027 KANWIL MALUKU UTARA (PP) | - | - | - | 247.000.000 | 58.678.000 | 23,76% | - | - | - | 247.000.000 | 58.678.000 | 188.322.000 | 23,76% |
| 8 | 632047 BAPAS KELAS II TIDORE | 694.184.000 | 186.352.629 | 26,84% | 1.245.000.000 | 160.172.000 | 12,87% | 150.000.000 | 149.734.881 | 99,82% | 2.089.184.000 | 496.259.510 | 1.592.924.490 | 23,75% |
| 9 | 662968 KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO | 1.418.144.000 | 305.052.524 | 21,51% | 3.816.718.000 | 799.327.861 | 20,94% | 148.400.000 | 116.595.000 | 78,57% | 5.383.262.000 | 1.220.975.385 | 4.162.286.615 | 22,68% |
| 10 | 407499 RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE | 2.907.790.000 | 631.738.630 | 21,73% | 2.579.133.000 | 478.411.897 | 18,55% | 145.765.000 | 145.485.936 | 99,81% | 5.632.688.000 | 1.255.636.463 | 4.377.051.537 | 22,29% |
| 11 | 626161 BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE | 1.909.234.000 | 478.304.328 | 25,05% | 1.360.737.000 | 252.797.100 | 18,58% | 150.000.000 | - | 0,00% | 3.419.971.000 | 731.101.428 | 2.688.869.572 | 21,38% |
| 12 | 649024 KANWIL MALUKU UTARA (PAS) | - | - | - | 1.027.254.000 | 218.225.900 | 21,24% | - | - | - | 1.027.254.000 | 218.225.900 | 809.028.100 | 21,24% |
| 13 | 652827 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE | 3.732.598.000 | 778.698.484 | 20,86% | 4.780.633.000 | 801.680.858 | 16,77% | 130.000.000 | 129.339.016 | 99,49% | 8.643.231.000 | 1.709.718.358 | 6.933.512.642 | 19,78% |
| 14 | 649029 KANWIL MALUKU UTARA (BPHN) | - | - | - | 1.199.068.000 | 236.548.500 | 19,73% | - | - | - | 1.199.068.000 | 236.548.500 | 962.519.500 | 19,73% |
| 15 | 531891 RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU | 2.723.091.000 | 383.739.438 | 14,09% | 1.533.160.000 | 334.330.818 | 21,81% | 150.000.000 | 149.859.000 | 99,91% | 4.406.251.000 | 867.929.256 | 3.538.321.744 | 19,70% |
| 16 | 109152 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO | 2.750.632.000 | 567.371.733 | 20,63% | 2.661.996.000 | 368.031.881 | 13,83% | 150.000.000 | 148.973.612 | 99,32% | 5.562.628.000 | 1.084.377.226 | 4.478.250.774 | 19,49% |
| 17 | 109153 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA | 3.013.380.000 | 594.948.063 | 19,74% | 2.496.770.000 | 415.664.758 | 16,65% | 150.000.000 | 48.766.000 | 32,51% | 5.660.150.000 | 1.059.378.821 | 4.600.771.179 | 18,72% |
| 18 | 684003 RUTAN WEDA | 972.514.000 | 215.953.324 | 22,21% | 1.225.857.000 | 168.175.349 | 13,72% | 150.000.000 | 48.030.000 | 32,02% | 2.348.371.000 | 432.158.673 | 1.916.212.327 | 18,40% |
| 19 | 649025 KANWIL MALUKU UTARA (IMIGRASI) | - | - | - | 1.462.670.000 | 260.248.884 | 17,79% | - | - | - | 1.462.670.000 | 260.248.884 | 1.202.421.116 | 17,79% |
| 20 | 649022 KANWIL MALUKU UTARA (SETJEN) | 7.217.651.000 | 1.430.409.318 | 19,82% | 5.917.838.000 | 953.306.089 | 16,11% | 304.390.000 | - | 0,00% | 13.439.879.000 | 2.383.715.407 | 11.056.163.593 | 17,74% |
| 21 | 480505 KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE | 2.826.275.000 | 638.509.750 | 22,59% | 5.700.213.000 | 1.101.972.156 | 19,33% | 1.399.631.000 | - | 0,00% | 9.926.119.000 | 1.740.481.906 | 8.185.637.094 | 17,53% |
| 22 | 407503 LAPAS KELAS III LABUHA | 1.761.309.000 | 367.358.697 | 20,86% | 2.070.896.000 | 265.941.651 | 12,84% | 150.000.000 | 38.000.600 | 25,33% | 3.982.205.000 | 671.300.948 | 3.310.904.052 | 16,86% |
| 23 | 649023 KANWIL MALUKU UTARA (AHU) | - | - | - | 2.031.284.000 | 302.080.454 | 14,87% | - | - | - | 2.031.284.000 | 302.080.454 | 1.729.203.546 | 14,87% |
| 24 | 418350 LAPAS PEREMPUAN TERNATE | 2.887.801.000 | 587.140.033 | 20,33% | 1.564.213.000 | 286.838.831 | 18,34% | 5.916.050.000 | 2.200.000 | 0,04% | 10.368.064.000 | 876.178.864 | 9.491.885.136 | 8,45% |
| TOTAL | | 40.412.276.000 | 8.552.825.231 | 21,16% | 48.511.273.000 | 8.703.182.731 | 17,94% | 9.544.236.000 | 1.276.580.089 | 13,38% | 98.467.785.000 | 18.532.588.051 | 79.935.196.949 | 18,82% |

sumber : <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

1 April 2022 pukul 09.16 WIT

III. PERMASALAHAN

Target Kinerja Tahun Anggaran 2022 Kantor wilayah secara keseluruhan tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya walaupun mengalami keterlambatan dalam pengesahan yang di lakukan oleh masih masing unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM. Hanya saja ada pembaharuan dalam penyampaian data dukung pelaporan pada aplikasi Target Kinerja Kemenkumham, dimana penyampaian data dukung laporan harus di sampaikan setiap bulannya, akan tetapi tetap mengikuti matriks Target Kinerja yang sudah disampaikan. Pelaksanaan target kinerja di lingkungan Kantor Wilayah mengingat ada beberapa target kinerja yang bekerja sama dengan pemerintah daerah atau kabupaten, pelaksanaannya sewaktu waktu dapat berubah dengan mempertimbangkan kondisi alam, mengingat secara geografis Provinsi Maluku Utara terdiri beberapa kepulauan sehingga faktor alam bisa menjadi kendala atau penghambat pemenuhan terget kinerja yang telah disusun pelaksanaannya. Pada TW I kantor wilayah tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan target kinerja, dengan didukung SDM yang memadai juga didukung dengan faktor alam yakni cuaca yang mendukung dalam pelaksanaan terget kinerja pada TW I.

Dari beberapa faktor diatas kantor wilayah tetap berupaya untuk dapat melaksanakan target kinerja yang telah ditentukan dengan, melaksanakan kegiatan yang sudah di rencanakan baik secara luring maupun daring melihat situasi dan kondisi khususnya apabila pelaksanaan kegiatan yang harus kerkoordinasi dengan pemerintah daerah apabila terkendala dengan faktor alam (cuaca) dapat dilaksanakan secara daring atau virtual. Dengan tidak mengurangi manfaat yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah Kerja Provinsi Maluku Utara.

IV. EVALUASI DAN REKOMENDASI

Capaian Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada Triwulan I (Pertama) B03 telah dilaksanakan sesuai dengan Matriks Target Kinerja. Pelaksanaan Target Kinerja pada masing masing satuan kerja juga telah sesuai. Mulai dari tahapan kegiatan sampai dengan output / data dukung yang dihasilkan. Secara keseluruhan tim evaluasi capaian target kinerja pada TW I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tidak menemukan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pemenuhan Target kinerja B03. Semuanya berjalan sesuai Disbursement Plan dan Rencana Kerja Tahun 2022 (Renja) yang telah disusun pada awal tahun 2022. Untuk pelaporan pada Triwulan ke II B06 Kantor wilayah dan jajaran tetap berkomitmen dapat melaksanakan Target Kinerja dan memaksimalkan penyerapan anggaran sehingga Kinerja Kantor Wilayah Maluku Utara berkontribusi yang positif dalam pelaksanaan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

V. KESIMPULAN

Pelaksanaan Target Kinerja B01 s/d B03 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah dilaksanakan 100%. Penyampaian Data Dukung seluruh satuan kerja telah terupload pada aplikasi Target Kinerja Kemenkumham. Kantor Wilayah beserta jajaran terus berkomitmen melaksanakan semua target kinerja yang telah ditentukan oleh masing masing unit eselon I dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH.1.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022. Hal tersebut merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan Anggaran lewat Perjanjian Kinerja Tahun2022.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Evaluasi Capaian Target Kinerja Triwulan I B03 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Kepala kantor Wilayah dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia



Ternate, 4 April 2022
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

M.Adnan
NIP. 196507091986031002

**LAMPIRAN DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI CAPAIAN TARGET KINERJA TRIWULAN I B03
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MALUKU UTARA**

KEGIATAN RAPAT EVALUASI CAPAIAN TARGET KINERJA TRIWULAN I B03

KANTOR WILAYAH



KEGIATAN RAPAT EVALUASI CAPAIAN TARGET KINERJA TRIWULAN I B03

KANTOR WILAYAH



KEGIATAN RAPAT EVALUASI CAPAIAN TARGET KINERJA TRIWULAN I B03

KANTOR WILAYAH

